



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
GRAND DESIGN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2016 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang dengan pesatnya dan memiliki peningkatan peranan yang signifikan dalam membantu organisasi mencapai tujuannya, hal ini dilakukan untuk mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good corporate governance*);
- b. bahwa dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi sangat penting untuk mewujudkan keberhasilan peran strategis yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. bahwa untuk menjamin peran strategis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung tugas Badan Narkotika Nasional, perlu disusun Peraturan Kepala tentang *Grand Design* Teknologi Informasi Komunikasi Badan Narkotika Nasional Tahun 2016-2019;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang *Grand Design* Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Narkotika Nasional Tahun 2016-2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
 7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);

8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 395);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG *GRAND DESIGN* TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2016-2019.

Pasal 1

Grand Design Teknologi Informasi dan Komunikasi dimaksudkan untuk merealisasikan tugas Badan Narkotika Nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 2

Grand Design Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Oktober 2017

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1438

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

GRAND DESIGN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN
2016 – 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“He who fails to plan, plans to fail,” adalah kutipan populer yang menunjukkan bahwa perencanaan merupakan aspek vital dalam kehidupan manusia dan organisasi. Rencana tersebut akan menjadi arahan strategis bagi organisasi (Profit maupun Non-Profit) beserta setiap komponen di dalamnya untuk berkontribusi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi tersebut.

Pada saat ini, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah berkembang dengan pesatnya dan memiliki peningkatan peranan yang signifikan dalam membantu organisasi mencapai tujuannya. Begitu pun bagi BNN, dibutuhkan satu Rencana TIK yang memenuhi standar dan kaidah perencanaan agar TIK dapat memberikan *value* yang optimal bagi organisasi, seperti: selarasnya strategi TIK dengan strategi organisasi (*strategic alignment*), terdefinisinya arsitektur TIK yang sesuai kebutuhan, terprioritaskannya inisiatif TIK ke dalam rangkaian program dan proyek investasi TIK, terhindarinya akuisisi dan pengembangan TIK yang tambal sulam, terkelolanya sumber daya TIK, termitigasinya risiko kegagalan implementasi, dsb.

Seiring dengan perkembangan dan pemanfaatan TIK yang semakin meningkat, maka diperlukan *Grand Design* TIK BNN. *Grand Design* TIK BNN ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perencanaan organisasi dalam mengelola anggaran TIK serta mengimplementasikannya,

memitigasi risiko, serta dapat menjadi alat kontrol dan alat ukur yang efektif untuk mengelola kinerja TIK.

Dokumen ini merupakan *Blueprint/Grand Design* Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Narkotika Nasional untuk tahun 2016-2019. Untuk selanjutnya, *Blueprint/Grand Design* 2016-2019 akan menjadi acuan organisasi dalam perencanaan dan implementasi hal-hal berikut:

- a. arsitektur sistem informasi;
- b. arsitektur infrastruktur; dan
- c. tata kelola TIK.

Blueprint/Grand Design TIK 2016-2019 ini akan dijadikan rujukan dalam penurunan program kerja tahunan Badan Narkotika Nasional dalam bidang TIK. Rancana, spesifikasi fungsional atau non fungsional TIK yang ada di *Blueprint/Grand Design* TIK dalam penggunaan tersebut harus direview ulang untuk memastikan kesesuaian kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Grand Design Teknologi Badan Narkotika Nasional Tahun 2016-2019 dimaksudkan untuk menjadi suatu acuan dasar dalam pelaksanaan teknologi informasi komunikasi di Lingkungan BNN.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan teknologi informasi komunikasi di lingkungan BNN agar penyelenggaraan dapat tertata dengan baik.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup *Grand Design* Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Narkotika Nasional Tahun 2016-2019 meliputi:

1. arah strategis teknologi informasi dan komunikasi Badan Narkotika Nasional;
2. arsitektur Sistem Informasi Badan Narkotika Nasional;
3. Arsitektur Infrastruktur Badan Narkotika Nasional;

4. Tata Kelola Teknologi Informasi Komunikasi Badan Narkotika Nasional;
5. GAP Analysis Pelaksanaan Teknologi Informasi Komunikasi Badan Narkotika Nasional; dan
6. Portofolio dan Belanja Teknologi Informasi Badan Narkotika Nasional.

BAB II

PROFIL ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

A. Visi Badan Narkotika Nasional

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

B. Misi Badan Narkotika Nasional

Menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.

C. Arah Kebijakan Badan Narkotika Nasional

1. Penanganan permasalahan Narkoba secara seimbang antara *demand reduction* dan *supply reduction*;
2. Mengembangkan pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba secara holistik, integral, dan berkelanjutan;
3. Penanganan jaringan sindikat narkoba dilakukan hingga tindak pidana pencucian uang; dan
4. Mengedepankan profesionalisme, dedikasi, dan tanggung jawab dalam penanganan permasalahan Narkoba.

D. Strategi Badan Narkotika Nasional

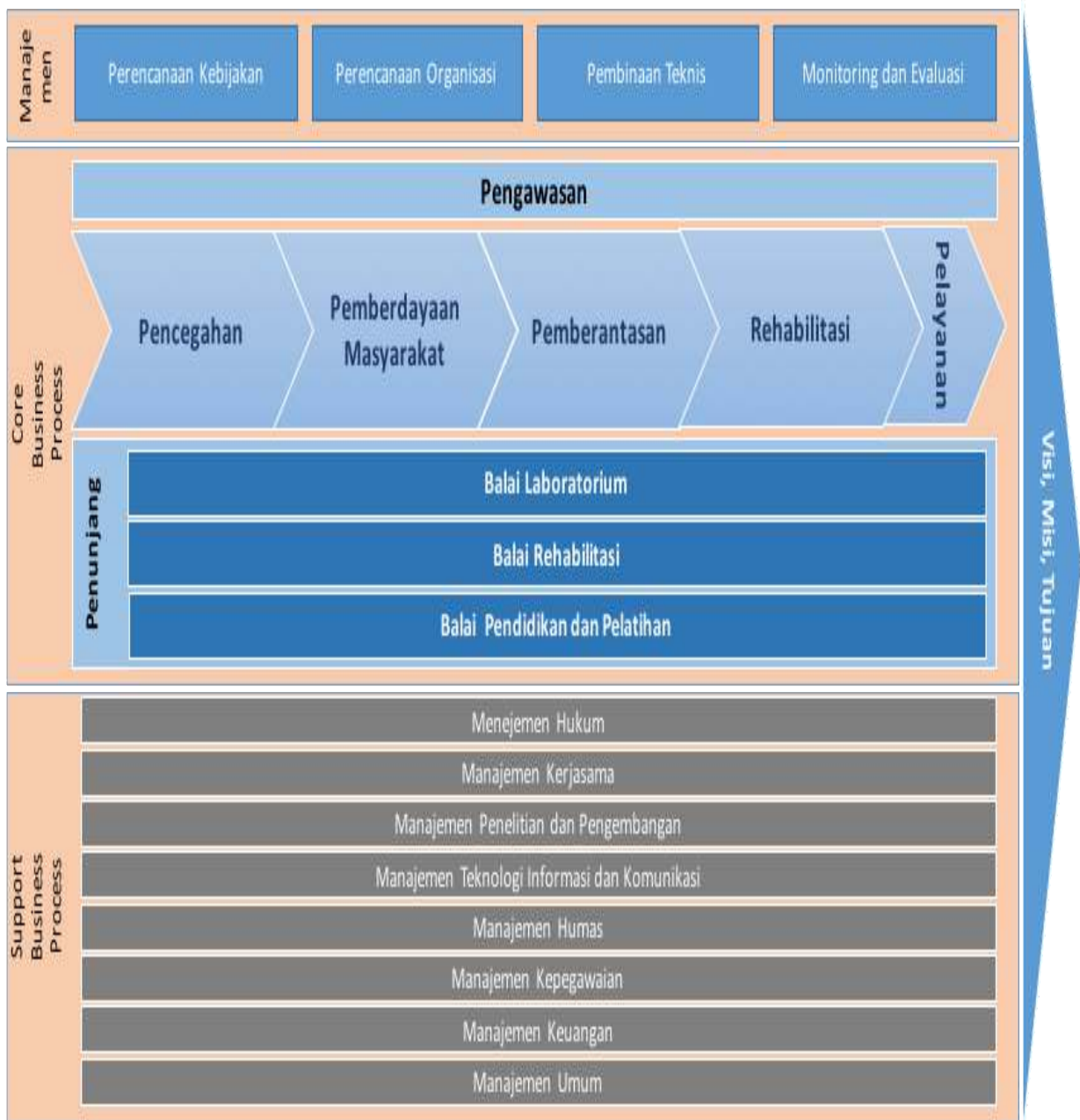
1. Melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mengintegrasikan program pencegahan penyalahgunaan narkoba ke dalam seluruh isu dan sektor pembangunan melalui konsep penganggaran berwawasan anti narkoba, kebijakan berbasis anti narkoba, serta mendorong pembangunan karakter manusia dengan memasukkan nilai-nilai hidup sehat tanpa narkoba ke dalam kurikulum pendidikan dasar sampai lanjutan atas;
2. Menumbuh-kembangkan kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dari tingkat desa/kelurahan dengan mendorong relawan-relawan menjadi pelaku P4GN secara mandiri;

3. Mengembangkan akses layanan rehabilitasi penyalah guna, korban penyalah guna, dan pecandu narkoba yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan peran Kementerian/Lembaga dalam pemanfaatan infrastruktur dan sumber daya Kementerian/Lembaga;
4. Mengungkap jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan menyita seluruh aset terkait kejahatan narkoba dengan menjalin kerjasama dan kemitraan yang harmonis dengan penegak hukum baik dalam maupun luar negeri khususnya dalam mengungkap jaringan peredaran gelap narkoba; dan
5. Melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi *good governance* dan *clean government* di Lingkungan BNN.

E. Proses Bisnis

Proses bisnis menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh BNN. Proses bisnis digambarkan secara umum menggunakan *value chain*. *Value chain* membagi proses bisnis dalam dua bagian besar yaitu *core business process* dan *support business process* ditambah dengan proses manajemen. *Core business process* BNN terbagi menjadi proses bisnis utama dan proses bisnis penunjang. Proses bisnis utama BNN terdiri dari pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan dan rehabilitasi disertai dengan pengawasan. Proses bisnis utama tersebut sangat terkait dengan pencapaian visi BNN dalam mewujudkan Indonesia bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Untuk menunjang proses bisnis utama tersebut terdapat proses bisnis penunjang yaitu proses di balai laboratorium, balai rehabilitasi dan balai pendidikan dan latihan.

Proses bisnis utama dan penunjang tersebut didukung oleh *support business process* yang meliputi manajemen hukum, kerjasama, penelitian dan pengembangan, TIK, humas, kepegawaian, keuangan dan umum. Pada tingkat manajemen terdapat proses perencanaan, pengorganisasian dan monitoring-evaluasi terhadap semua proses bisnis operasional. Diagram *value chain* BNN bisa disampaikan pada bagian bawah.



Gambar 1. Value Chain BNN yang Menggambarkan Proses Bisnis Secara Umum

Penjelasan singkat setiap proses bisnis dalam *value chain* tersebut sebagai berikut:

1. Manajemen

Proses bisnis manajemen dilakukan oleh BNN maupun BNNP. Proses bisnis manajemen tersebut dijelaskan pada bagian berikut:

- a. perencanaan kebijakan

menyusun dan merumuskan kebijakan nasional untuk pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN.

b. perencanaan Organisasi

mengorganisasikan sumberdaya organisasi untuk melaksanakan misi dan mencapai visi BNN.

c. pembinaan teknis

melakukan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada internal maupun eksternal BNN.

d. monitoring dan evaluasi

Melakukan monitoring maupun evaluasi atas pelaksanaan kebijakan, rencana yang telah ditetapkan.

2. *Core Business Process*

a. proses bisnis utama

1) pencegahan

melaksanakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terdiri dari proses diseminasi informasi dan advokasi.

2) pemberdayaan masyarakat

memberdayakan masyarakat dalam P4GN yang terdiri dari proses pengelolaan peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif.

3) Pemberantasan

memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terdiri dari proses intelijen, pemberantasan narkotika, psikotropika & prekursor, tindak pidana pencucian uang, interdiksi, penindakan & pengejaran, pengawasan tahanan & barang bukti.

4) rehabilitasi

mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

- 5) pengawasan
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan P4GN baik dalam bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan maupun rehabilitasi.
- b. proses bisnis penunjang
 - 1) balai laboratorium
melakukan uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol.
 - 2) balai rehabilitasi
melaksanakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol.
 - 3) balai pendidikan dan latihan
melaksanakan pendidikan dan pelatihan terutama untuk meningkatkan kompetensi pelaksanaan P4GN.
3. *Support Business Process*
 - a. Manajemen Hukum
Melakukan penelaahan dan perancangan perundang-undangan dan pemberian bantuan hukum.
 - b. Manajemen Kerjasama
Melaksanakan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN.
 - c. Manajemen Penelitian dan Pengembangan
Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang P4GN.
 - d. Manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi
Mengelola teknologi informasi dan komunikasi termasuk sistem informasi, jaringan dan data/informasi untuk mendukung P4GN.
 - e. Manajemen Humas
Melaksanakan urusan hubungan dengan masyarakat seperti pengelolaan media center, *press release*, maupun *placement* ke media.

f. Manajemen Kepegawaian

Melaksanakan perencanaan, pengadaan dan administrasi kepegawaian.

g. Manajemen Keuangan

Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan seperti pengelolaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi & akuntansi anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran.

h. Manajemen Umum

Melaksanakan pemberian dukungan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dokumentasi, logistik, pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

BAB III

ARAH STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

A. Visi Teknologi Informasi Komunikasi Badan Narkotika Nasional

Menjadi *Business Driver* (Penggerak Organisasi) dalam merealisasikan visi organisasi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

B. Misi Teknologi Informasi Komunikasi Badan Narkotika Nasional

1. Menyediakan solusi yang terintegrasi, efisien dan efektif untuk mendukung pertumbuhan organisasi.
2. Menyediakan Infrastruktur TI yang aman dan handal sesuai dengan perkembangan organisasi.
3. Mengembangkan kapasitas SDM TI yang merujuk kepada kompetensi internasional.
4. Meningkatkan kematangan IT *Governance* dengan merujuk kepada kepatuhan regulasi dan praktik terbaik dalam penyelenggaraan TI.

BAB IV
ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

A. *Solution Concept Diagram*

Solution concept diagram menggambarkan solusi berupa sistem informasi untuk memenuhi kapabilitas yang dibutuhkan oleh masing-masing proses bisnis. Pada *solution concept diagram* tersebut dibagi menjadi solusi utama (*core*) untuk mendukung proses bisnis utama dan solusi pendukung untuk mendukung proses bisnis pendukung. Pada solusi utama, dibagi menjadi per bidang sesuai dengan bidang yang ada dalam P4GN dan ditambah dengan pelayanan.

Terdapat dua solusi besar yang digunakan bersama-sama oleh semua bidang P4GN yaitu Sistem Informasi Narkoba (SIN) dan SI Pemetaan P4GN. Walaupun dalam realisasinya, SIN tersebut dibagi menjadi empat modul sesuai dengan pembagian bidang P4GN karena kebutuhan bidang tersebut spesifik ke bidang masing-masing. Satu solusi yaitu SIN tersebut menjamin integrasi proses di seluruh bidang P4GN untuk mendukung dalam pencapaian visi BNN. Satu solusi lagi yaitu SI Pemetaan P4GN digunakan untuk memetakan data-data yang ada di SIN ke dalam peta geografis seperti pemetaan kegiatan P4GN, peta kerawanan, peta kasus, peta lembaga rehabilitasi.

Untuk kebutuhan analisis dalam pemberantasan disediakan solusi *crime database analysis* dan *crime analysis*. Selain itu disediakan *tool* yang spesifik ke masing-masing Direktorat seperti SI *Money Laundering* untuk Direktorat TPPU, SI Interdiksi untuk Direktorat Interdiksi. Sedangkan untuk operasional Tahanan dan Barang Bukti disediakan solusi SI Tahanan dan SI Barang Bukti. Data kedua solusi tersebut akan diambil oleh SIN untuk kebutuhan bidang pemberantasan maupun bidang yang lain.

Solusi spesifik juga dibuat untuk laboratorium dan rehabilitasi yaitu SI Laboratorium, *Medical Record*, SI Farmasi dan Administrasi Pasien. *Medical Record* dan SI Farmasi spesifik digunakan untuk Balai Besar Rehabilitasi. Sedangkan Administrasi Pasien digunakan untuk semua Balai Rehabilitasi internal maupun eksternal BNN dengan harapan data-data pasien rehabilitasi bisa langsung tercatat oleh BNN. Selain itu ada solusi spesifik

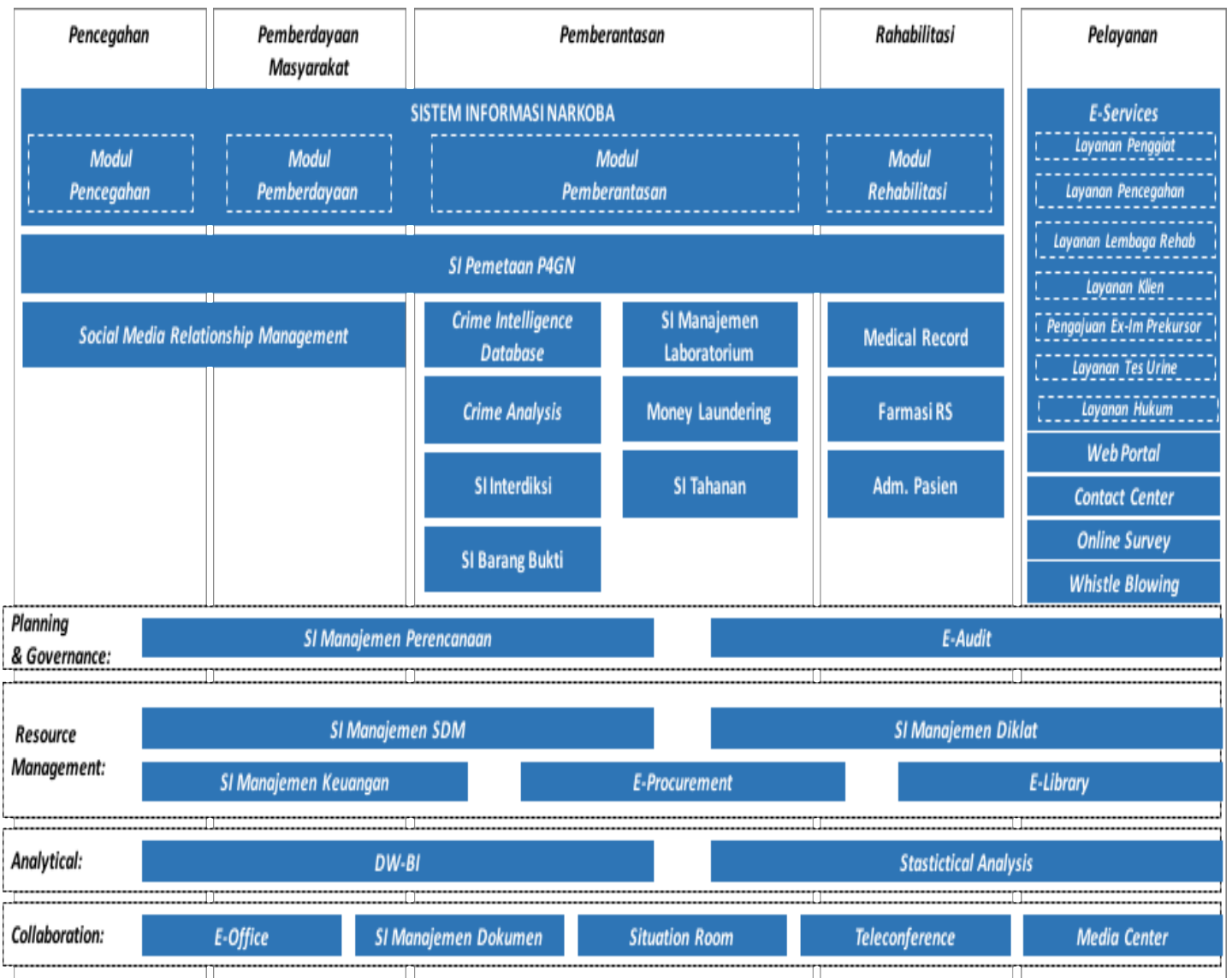
untuk pencegahan dan pemberdayaan masyarakat berupa *Social Media Relationship Management*.

Social Media Relationship Management tersebut digunakan untuk interaksi dengan masyarakat melalui sosial media dan juga digunakan mengelola media digital P4GN.

Bagian akhir solusi utama adalah solusi untuk kategori pelayanan. Solusi kategori pelayanan tersebut dikhususkan untuk solusi layanan publik BNN. Salah satu solusi dalam pelayanan tersebut yaitu *E-services*. *E-services* sebagai pintu masuk semua layanan publik BNN. Setiap masyarakat yang membutuhkan layanan publik (interaksi dua arah) dari BNN melalui *E-services* tersebut, *one stop services*. Selain *E-Services* tersebut terdapat beberapa solusi dalam kategori layanan yaitu *Web Portal*, *Contact Center*, *Online Survey* dan *Whistle Blowing*. Setiap solusi dalam *solution concept diagram* tersebut dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Gambar 2. *Solution Concept Diagram*

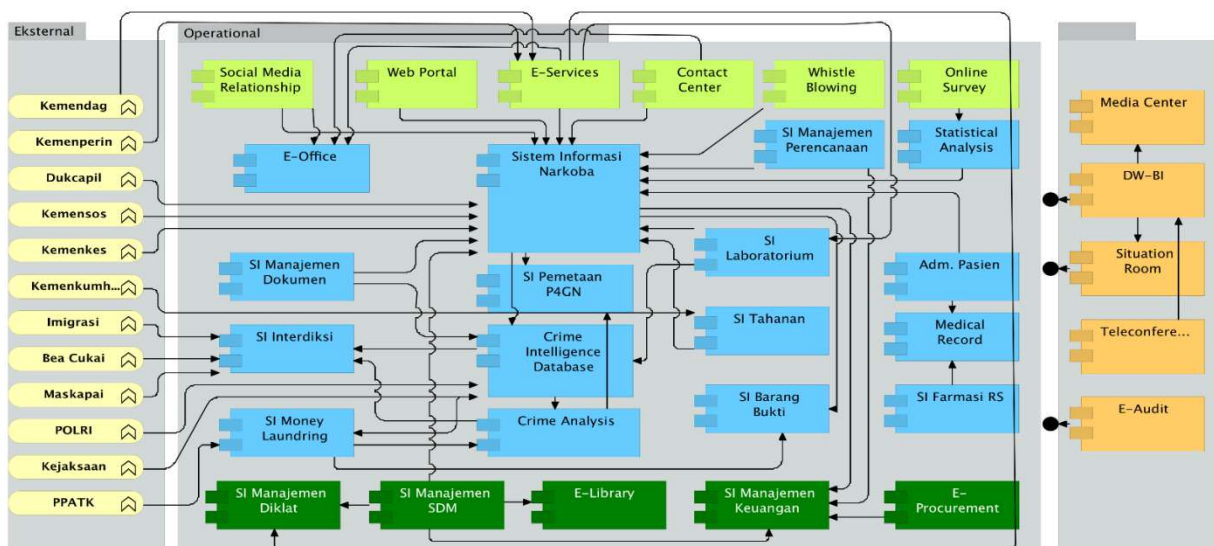
B. Pola Hubungan Aplikasi



Pola hubungan dalam aplikasi menggambarkan aliran data antar aplikasi yang disampaikan dalam *solution concept diagram*. Pada gambar pola hubungan tersebut dibagi tiga bagian yaitu kategori eksternal, operasional dan analisis. Pada kategori eksternal disampaikan semua entitas yang akan bertukar data dengan BNN. Entitas eksternal tersebut ada yang sudah siap bertukar data menggunakan aplikasi dan ada juga yang belum. Tetapi semua entitas tersebut dibutuhkan untuk melakukan pertukaran data dengan BNN. Pada kategori operasional, solusi dibagi menjadi tiga besar yaitu solusi terkait hubungan eksternal, solusi utama operasional dan solusi pendukung operasional. Pada solusi utama operasional, solusi yang paling utama adalah SIN. Hampir semua data dimasukan ke SIN sebagai sistem operasional P4GN. Data SIN tersebut dipetakan kembali ke lokasi geografis dalam SI Pemetaan P4GN dan diberikan ke *Crime Intelligence Database* untuk kebutuhan analisis dalam pemberantasan.

Sedangkan pada kategori analisis terdiri dari beberapa solusi yaitu DW-BI, *Situation Room*, *Media Center*, *E-audit* dan *Teleconference*. Solusi utama dalam analisis adalah DW-BI. Data DW-BI tersebut akan ditampilkan dalam *Situation Room* dan *Media Center*. *Situation Room* akan didukung oleh *Teleconference* dalam melakukan koordinasi dengan pihak lain di dalam maupun di luar BNN. Satu sistem lagi yaitu E-Audit akan mengambil data operasional untuk kebutuhan audit. Pertukaran data antar sistem dijelaskan pada deskripsi solusi bagian integrasi pada bagian berikutnya.

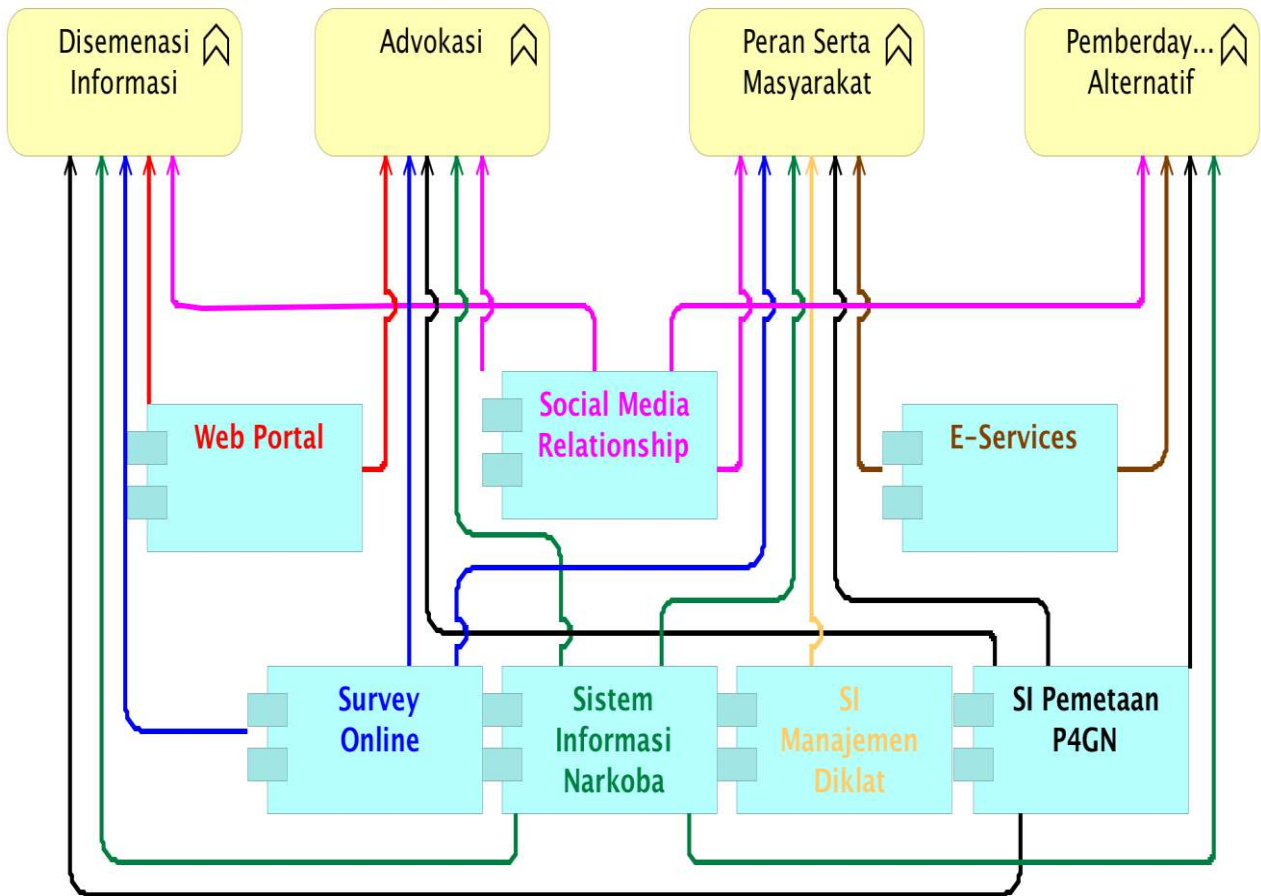
Gambar 3. Pola Hubungan antar aplikasi Badan Narkotika Nasional



C. Pemetaan Aplikasi ke Fungsi Organisasi

1. Pemetaan Satker terhadap aplikasi pada Deputi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

No	Satker	Aplikasi	Keterangan
1.	Diseminasi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Social Media Relationship Management</i> b. <i>Web Portal</i> c. <i>Survey Online</i> d. Sistem Informasi Narkoba (SIN) e. SI Pemetaan P4GN 	a. Diseminasi Informasi menggunakan SIN modul Pencegahan.
2.	Advokasi	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Social Media Relationship Management</i> b. <i>Web Portal</i> c. <i>Survey Online</i> d. Sistem Informasi Narkoba (SIN) e. SI Pemetaan P4GN 	a. Advokasi menggunakan SIN modul Pencegahan.
3.	Peran Serta Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Social Media relationship management</i> b. <i>Survey Online</i> c. Sistem Informasi Narkoba (SIN) d. SI Pemetaan P4GN e. <i>E-Services</i> f. SI Manajemen Diklat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peran Serta Masyarakat menggunakan SIN modul Pemberdayaan. b. Peran Serta Masyarakat menggunakan SI Manajemen Diklat modul <i>Knowledge Management</i>.
4.	Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Social Media relationship management</i> b. Sistem Informasi Narkoba (SIN) c. SI Pemetaan P4GN d. <i>E-Services</i> 	a. Pemberdayaan Masyarakat menggunakan SIN modul Pemberdayaan.



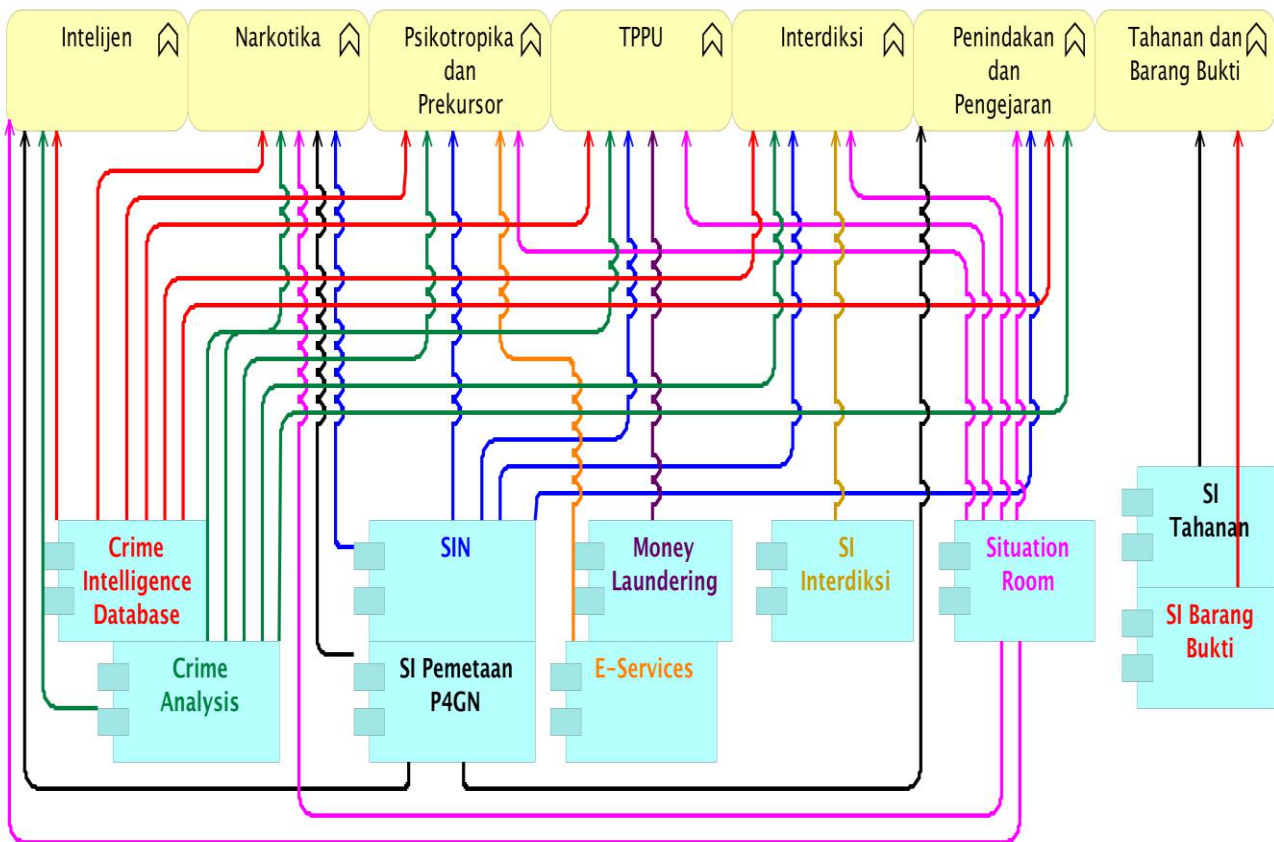
Gambar 4. Pemetaan Satker dalam Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat terhadap Aplikasi yang Digunakan

2. Pemetaan Aplikasi ke Pemberantasan

No	Satker	Aplikasi	Keterangan
1.	Intelijen	a. Sistem Informasi Narkoba (SIN) b. SI Pemetaan P4GN c. <i>Crime Intelligence Database</i> d. <i>Crime Analysis</i>	a. Direktorat Intelijen menggunakan SIN modul Pemberantasan.
2.	Narkotika	a. Sistem Informasi Narkoba (SIN) b. SI Pemetaan P4GN c. <i>Crime Intelligence</i>	a. Direktorat Narkotika menggunakan SIN modul Pemberantasan.

No	Satker	Aplikasi	Keterangan
		<p><i>Database</i></p> <p>d. <i>Crime Analysis</i></p> <p>e. <i>Situation Room</i></p>	
3.	Psikotropika dan Prekursor	<p>a. Sistem Informasi Narkoba (SIN)</p> <p>b. <i>E-Services</i></p> <p>c. <i>Crime Intelligence Database</i></p> <p>d. <i>Crime Analysis</i></p> <p>e. <i>Situation Room</i></p>	<p>a. Direktorat Psikotropika dan Prekursor menggunakan SIN modul Pemberantasan.</p> <p>b. Direktorat Psikotropika dan Prekursor menggunakan SIN modul Ex-Im Precursor.</p>
4.	Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	<p>a. Sistem Informasi Narkoba (SIN)</p> <p>b. <i>Crime Intelligence Database</i></p> <p>c. <i>Crime Analysis</i></p> <p>d. <i>Money Laundering</i></p> <p>e. <i>Situation Room</i></p>	<p>a. Direktorat TPPU menggunakan SIN modul Pemberantasan.</p>
5.	Interdiksi	<p>a. Sistem Informasi Narkoba (SIN)</p> <p>b. SI Interdiksi</p> <p>c. <i>Crime Intelligence Database</i></p> <p>d. <i>Crime Analysis</i></p> <p>e. <i>Situtation Room</i></p>	<p>a. Direktorat Interdiksi menggunakan SIN modul Pemberantasan.</p>

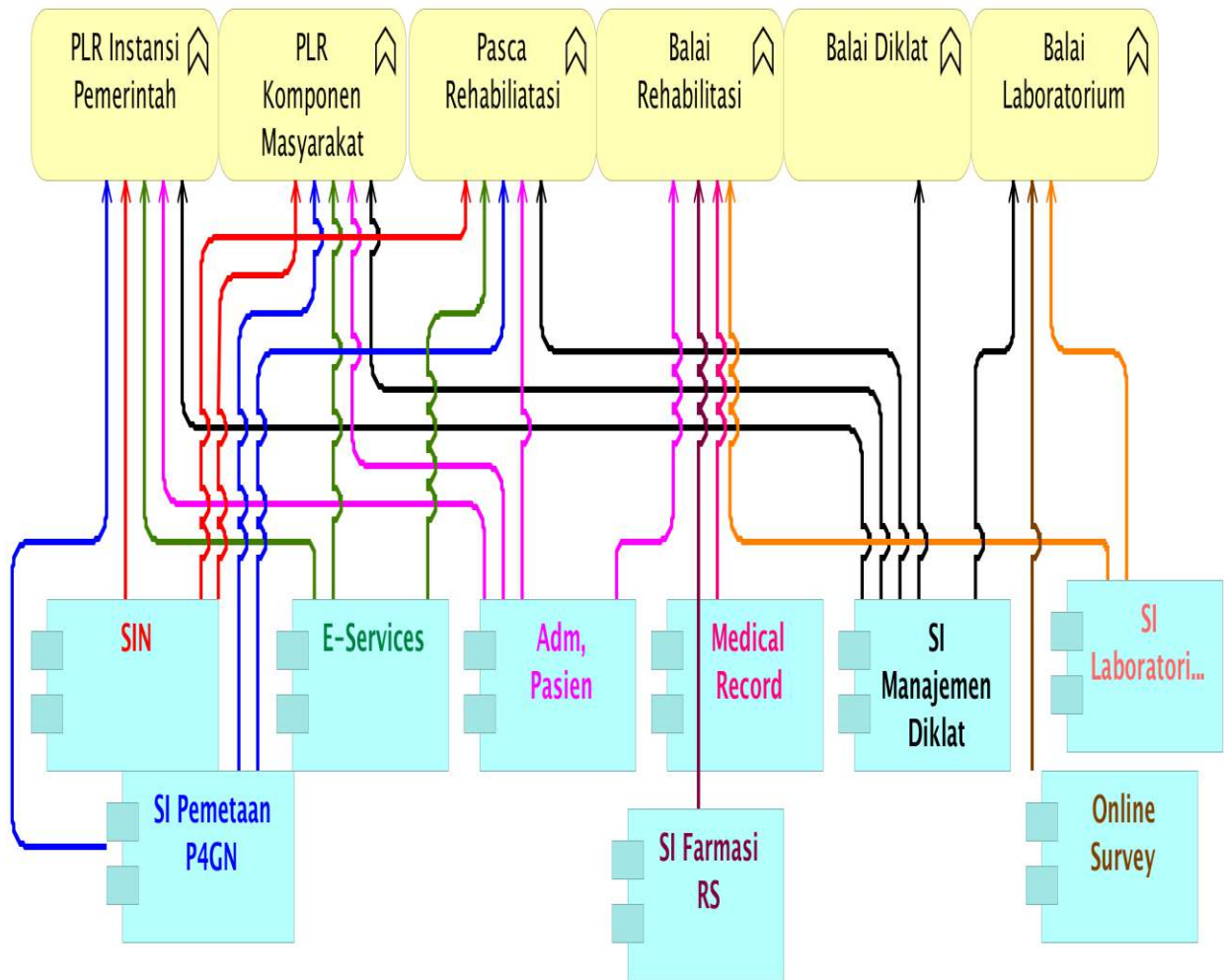
No	Satker	Aplikasi	Keterangan
6.	Penindakan dan Pengejaran	a. Sistem Informasi Narkoba (SIN) b. SI Pemetaan P4GN c. <i>Crime Intelligence Database</i> d. <i>Crime Analysis</i> e. <i>Situation Room</i>	a. Direktorat Penindakan dan Pengejaran menggunakan SIN modul Pemberantasan.
7.	Tahanan dan Barang Bukti	a. SI Tahanan b. SI Barang Bukti	a. Data SI Tahanan dan SI Barang Bukti digunakan oleh SIN dan sebaliknya.



Gambar 5. Pemetaan Satker dalam Deputi Pemberantasan terhadap Aplikasi yang Digunakan

3. Pemetaan Aplikasi ke Rehabilitasi dan Balai

No	Satker	Aplikasi	Keterangan
1.	PLR Instansi Pemerintah	a. Sistem Informasi Narkoba (SIN) b. SI Pemetaan P4GN c. <i>E-Services</i> d. Adm. Pasien e. SI manajemen Diklat	a. Direktorat PLR Instansi Pemerintah menggunakan SIN modul Rehabilitasi.
2.	PLR Komponen Masyarakat	a. Sistem Informasi Narkoba (SIN) b. SI Pemetaan P4GN c. <i>E-Services</i> d. Adm. Pasien e. SI manajemen Diklat	a. Direktorat PLR Komponen Masyarakat menggunakan SIN modul Rehabilitasi.
3.	Pasca Rehabilitasi	a. Sistem Informasi Narkoba (SIN) b. SI Pemetaan P4GN c. <i>E-Services</i> d. Adm. Pasien e. SI manajemen Diklat	a. Direktorat Pasca Rehabilitasi menggunakan SIN modul Rehabilitasi.
4.	Balai Rehabilitasi	a. Medical Record b. SI Farmasi RS c. Adm. Pasien d. SI Laboratorium	-
5.	Balai Diklat	a. SI Manajemen Diklat	-
6.	Balai Laboratorium	a. SI Laboratorium b. SI Manajemen Diklat c. Online Survey	-

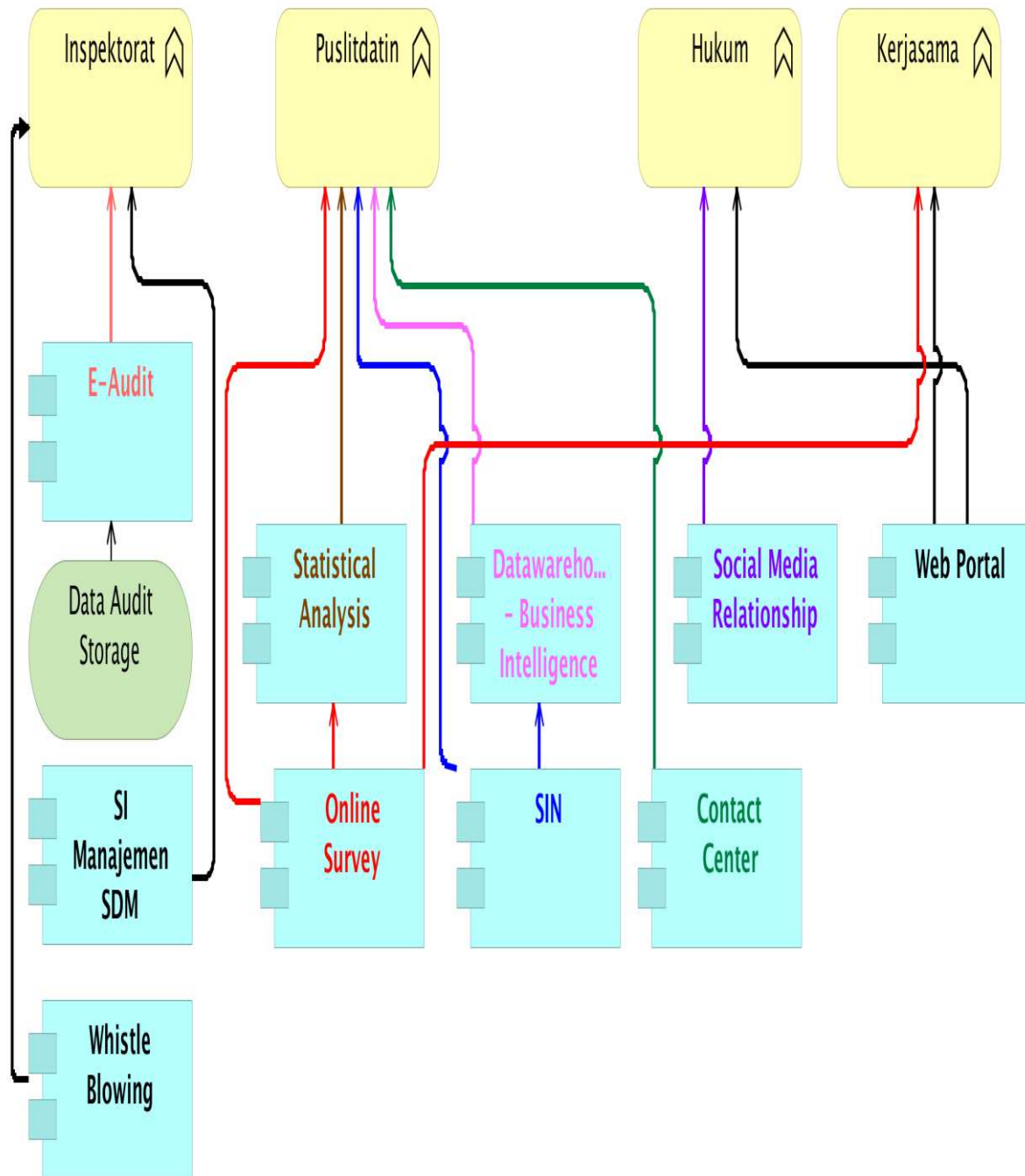


Gambar 6. Pemetaan Satker dalam Deputi Rehabilitasi dan Balai-Balai Terhadap Aplikasi yang Digunakan

4. Pemetaan Aplikasi ke Inspektorat, Puslitdatin, Hukum dan Kerjasama

No	Satker	Aplikasi	Keterangan
1.	Inspektorat	a. <i>E-Audit</i> b. <i>Whistle Blowing</i> c. SI Manajemen SDM	a. Inspektorat mengakses SI Manajemen SDM modul Verifikasi Serah Terima Jabatan.
2.	Puslitdatin	a. Online Survey b. <i>Statistical Analysis</i> c. Sistem Informasi Narkoba (SIN) d. DW-BI e. Contact Center	-
3.	Hukum	a. <i>Web Portal</i> b. <i>Social media</i>	b. Bagian Hukum menggunakan <i>E-Services</i> modul Hukum.

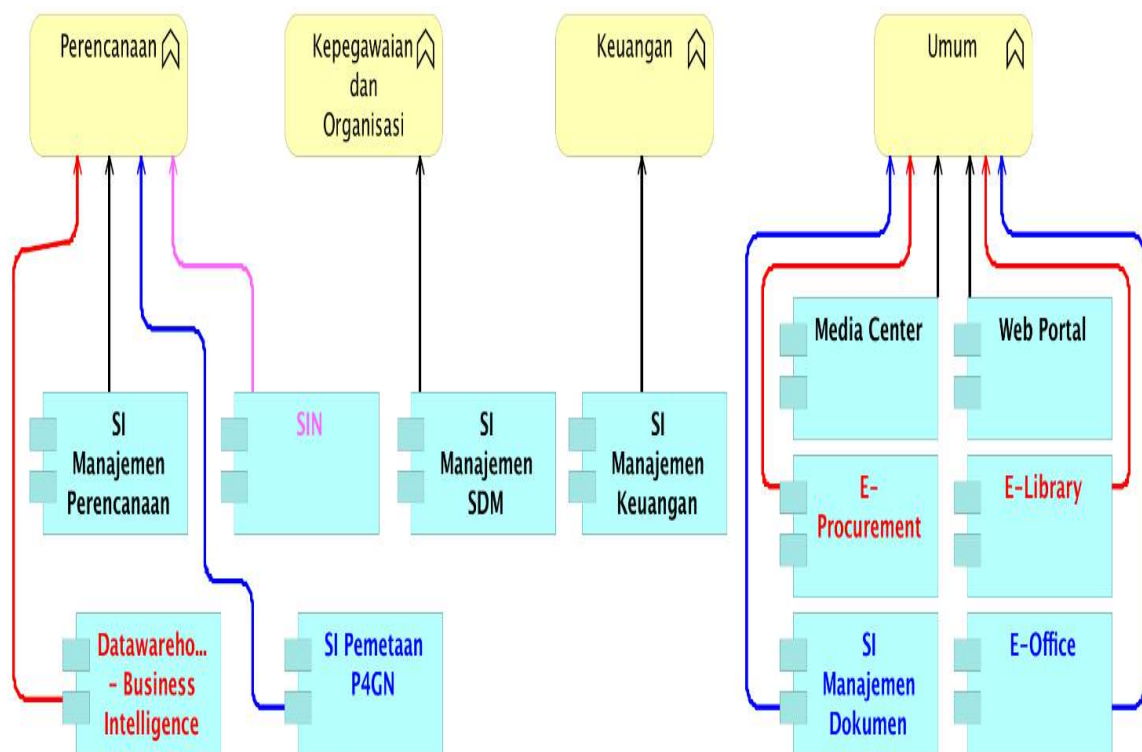
No	Satker	Aplikasi	Keterangan
		<i>Relationship</i> <i>c. E-Services</i>	
4.	Kerjasama	<i>a. Web Portal</i> <i>b. Online Survey</i>	-



Gambar 7. Pemetaan Satker Inspektorat, Puslitdatin, Hukum dan Kerjasama Terhadap Aplikasi yang Digunakan

5. Pemetaan Aplikasi ke Perencanaan, Kepegawaian dan Organisasi, Keuangan dan Umum

No	Satker	Aplikasi	Keterangan
1.	Perencanaan	a. SI Manajemen Perencanaan b. DW-BI c. Sistem Informasi narkoba (SIN) d. SI Pemetaan P4GN	-
2.	Kepegawaian dan Organisasi	a. SI Manajemen SDM	-
3.	Keuangan	a. SI Manajemen Keuangan	-
4.	Umum	a. Media Center b. Web Portal c. E-Procurement d. E-Library	-



Gambar 7. Pemetaan Satker Perencanaan Kepegawaian dan Organisasi, Keuangan dan Umum Terhadap Aplikasi yang Digunakan

D. Deskripsi Aplikasi

Pada bagian berikut akan dijelaskan deskripsi masing-masing aplikasi yang terdiri dari penjelasan fungsional dan integrasi aplikasi atau pertukaran data antar aplikasi. Penjelasan sesuai dengan kategori aplikasi dalam *solution map diagram*.

1. Core Services

a. Sistem Informasi Narkoba

1) Modul Pencegahan

ASPEK	DESKRIPSI
Modul Fungsional	<p>1. Pengelolaan Program dan Kegiatan Advokasi: Memfasilitasi perencanaan hingga pelaksanaan pengelolaan kegiatan advokasi (jejaring/audiensi, asistensi penguatan/tindak lanjut, supervisi, dan intervensi serta sosialisasi) baik yang dilaksanakan BNN Tingkat Pusat maupun tersebar pada BNNP/BNNK maupun permintaan dari <i>stakeholder</i> (instansi pemerintah, swasta, pendidikan, dan masyarakat)</p> <p>2. Pengelolaan Dokumentasi Program dan Kegiatan Advokasi: Memfasilitasi dokumentasi kegiatan (jejaring/audiensi, asistensi penguatan/tindak lanjut, supervisi, dan intervensi serta sosialisasi) baik berupa gambar maupun MoU/Kerjasama yang telah dilaksanakan pada level tersebut baik yang dilaksanakan BNN Tingkat Pusat maupun tersebar pada BNNP/BNNK maupun permintaan dari <i>stakeholder</i> (instansi pemerintah, swasta, pendidikan, dan masyarakat)</p> <p>3. Pengelolaan <i>information exchange</i> Advokasi: Memfasilitasi pengelolaan <i>information exchange</i> Advokasi baik secara internal maupun eksternal dengan <i>stakeholder</i> (instansi pemerintah, swasta, pendidikan, dan masyarakat) melalui pemanfaatan forum komunikasi dan koordinasi pencegahan pada tingkat BNNP dan BNNK</p>

4. Rekapitulasi Hasil advokasi dan tindak lanjut:

Memfasilitasi Rekapitulasi Hasil Advokasi dan tindak lanjut kedepan yang dilaksanakan pada *stakeholder* (instansi pemerintah, swasta, pendidikan, dan masyarakat) baik yang termasuk program prioritas maupun permintaan dari *stakeholder* tersebut termasuk juga pemantapan database *stakeholder* untuk ditindaklanjuti satker lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Advokasi:

Memfasilitasi pelaksanaan pemantauan rencana aksi yang telah dilakukan *stakeholder* serta mengukur pencapaian target serta evaluasi kegiatan (jejaring/audiensi, asistensi penguatan/tindak lanjut, supervisi, dan intervensi serta sosialisasi) baik yang dilaksanakan BNN Tingkat Pusat maupun tersebar pada BNNP/BNNK serta yang aktif dilaksanakan mandiri oleh *stakeholder*.

6. Pengelolaan Kebutuhan Layanan Advokasi Pencegahan:

Memfasilitasi *upload* dan *download* konten Advokasi pencegahan yang dapat dimanfaatkan bagi *stakeholder* (instansi pemerintah, swasta, masyarakat, dan pendidikan) dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi tatap muka maupun pemanfaatan media komunikasi internal yang dimiliki *stakeholder* tersebut.

7. Pengelolaan dan Kegiatan Diseminasi:

Memfasilitasi pengelolaan kegiatan Diseminasi termasuk perencanaan kegiatan Diseminasi oleh BNN/BNNP/BNNK maupun permintaan dari masyarakat.

8. Pengelolaan Kegiatan Diseminasi:

Memfasilitasi dokumentasi Kegiatan Diseminasi termasuk pendataan detail peserta serta dokumentasi kegiatan dan lokasi.

9. Rekapitulasi Data Diseminasi:

Memfasilitasi rekapitulasi data Diseminasi dan tindak lanjut rekapitulasi data tersebut.

10. Monitoring Kegiatan:

Memfasilitasi Monitoring kegiatan pencegahan dalam bentuk peta pencegahan dan grafik.

	<p>11. Monitoring Manajemen Proyek: Memfasilitasi Monitoring Manajemen proyek atau konten Media Elektronik / Media Non Elektronik.</p> <p>12. Monitoring Konten: Memfasilitasi Bisnis konten proses pengelolaan konten Media Elektronik.</p>
Integrasi dengan Sistem Lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. E-KTP: Menerima data identitas penduduk 2. SI Manajemen Perencanaan: Menerima data program kerja tahunan 3. SI Manajemen Keuangan: Memberikan data realisasi kegiatan untuk pelaporan. 4. SI Pemetaan P4GN: Memberikan data rencana dan realisasi kegiatan pencegahan termasuk peserta kegiatan dan lokasinya. 5. Statistical Analysis: Memberikan data realisasi kegiatan termasuk peserta kegiatan advokasi dan diseminasi. 6. DW-BI: Memberikan data operasional pencegahan untuk kebutuhan analisis/pelaporan. 7. E - audit: Menerima data operasional pencegahan untuk keperluan audit.

2) Modul Pemberdayaan Masyarakat

ASPEK	DESKRIPSI
Modul Fungsional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Program dan Kegiatan: Memfasilitasi perencanaan jadwal program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu terkait penggiat anti narkoba intervensi daerah rawan dan rentan serta tes urine 2. Dokumentasi Program dan Kegiatan: Memfasilitasi pendokumentasian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu terkait penggiat anti narkoba, intervensi daerah rawan dan rentan serta tes urine. Pendokumentasian ini tidak hanya melibatkan internal BNN namun juga pihak lain yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan program/kegiatan seperti penggiat anti narkoba 3. Rekapitulasi Program dan Kegiatan: Memfasilitasi penyajian data program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan dari waktu ke waktu, yaitu terkait penggiat anti narkoba, tes urine , alih fungsi lahan, alih jenis

	<p>profesi dan alih jenis usaha serta monitoring kegiatan pelatihan dan pembinaan.</p> <p>4. Pengelolaan Komponen Masyarakat: Memfasilitasi pengelolaan data penggiat anti narkoba (pemerintah, swasta, kelompok masyarakat, lingkungan pendidikan formal/informal), pemantauan rencana aksi penggiat anti narkoba, serta penilaian komponen masyarakat</p> <p>5. Monitoring Alih Fungsi lahan dan Jenis Profesi : Mengukur keberhasilan pembinaan terhadap kawasan rentan dari sisi alih fungsi lahan dan jenis profesi</p>
Integrasi dengan Sistem Lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. E-KTP: Menerima data identitas penduduk 2. E-Services: Menerima data pengajuan tes uji narkoba, permintaan penggiat anti narkoba. 3. SI Manajemen Perencanaan: Menerima data program kerja tahunan 4. SI Manajemen Keuangan: Memberikan data realisasi kegiatan untuk pelaporan. 5. SI Pemetaan P4GN: Memberikan data rencana dan realisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat termasuk peserta kegiatan, data penggiat, lembaga/instansi dan keompok masyarakat termasuk lokasinya. 6. Statistical Analysis : Memberikan data realisasi kegiatan termasuk peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat. 7. DW-BI: Memberikan data operasional pemberdayaan untuk kebutuhan analisis/pelaporan. 8. E - audit : Menerima data operasional pemberdayaan masyarakat untuk keperluan audit.

3) Modul Pemberantasan

ASPEK	DESKRIPSI
Modul Fungsional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Penyidikan: Memfasilitasi pengelolaan progress penyidikan mencakup penginputan data berkas dan perubahan status 2. Manajemen Kasus <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dashboard Kasus: Memfasilitasi pengelolaan informasi terkait kasus termasuk pencarian, penginputan, dan pengumuman

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dashboard Penyidik: Memfasilitasi pengelolaan kasus yang ditangani, mengirim pesan terkait kasus ▪ Pengelolaan Operasi: Memfasilitasi pengelolaan perencanaan operasi, pengelolaan komando dan pengendalian operasi, pencatatan hasil pelaksanaan operasi, menampilkan laporan hasil operasi <p>3. Monitoring dan Evaluasi: Memfasilitasi monitoring progress penyidikan dan monitoring capaian kinerja baik di tingkat pusat, per wilayah, maupun kinerja keseluruhan</p> <p>4. Rekapitulasi Data Kasus: Memfasilitasi penyajian data terkait kasus seperti tersangka, barang bukti</p>
Integrasi dengan Sistem Lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. E-KTP: Menerima data identitas penduduk 2. E-Services: menerima data pengajuan ekspor-impor precursor. 3. SI Manajemen Perencanaan: Menerima data program kerja tahunan 4. SI Manajemen Keuangan: Memberikan data realisasi kegiatan untuk pelaporan. 5. SI Pemetaan P4GN: Memberikan data kasus termasuk pelaku, barang bukti, aset terkait, disertai lokasinya. 6. Criminal Intelligence Database: menerima dan mengirim data kasus. 7. Money Laundrying: Mengirim data terkait kasus. 8. SI Interdiksi: Mengirim data terkait kasus. 9. Statistical Analysis: Memberikan data kasus untuk kepentingan analisis statistik. 10. DW-BI: Memberikan data pemberantasan termasuk kasus untuk kebutuhan analisis/pelaporan. 11. E - audit : Menerima data pemberantasan untuk keperluan audit.

- 4) Modul Rehabilitasi Komponen Masyarakat, Instansi Pemerintah dan Pasca Rehabilitasi

ASPEK	DESKRIPSI
Modul Fungsional	<p>1. Pengelolaan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat, Instansi Pemerintah dan Pasca Rehabilitasi : Memfasilitasi pengelolaan lembaga</p>

	<p>rehabilitasi untuk Komponen Masyarakat, Instansi Pemerintah dan Pasca Rehabilitasi termasuk perencanaan dan pengelolaan status lembaga rehabilitasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengelolaan Pelatihan Konselor : Mengelola pelatihan konselor termasuk pendataan konselor yang melakukan pelatihan dan jenis pelatihan yang diikuti. 3. Dokumentasi kegiatan rehabilitasi : Memfasilitasi dokumentasi kegiatan rehabilitasi seperti aktifitas pelatihan & konseling. 4. Pengelolaan Akreditasi : Memfasilitasi pengelolaan penilaian akreditasi termasuk akreditasi untuk lembaga rehabilitasi Komponen Masyarakat, Instansi Pemerintah dan Pasca Rehabilitasi serta akreditasi untuk SDM. Akreditasi bertujuan untuk pemeringkatan kualitas lembaga dan SDM agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait kualitas lembaga rehabilitasi. 5. Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi Lembaga Rehabilitasi untuk Komponen Masyarakat, Instansi Pemerintah dan Pasca Rehabilitasi : Memfasilitasi aktivitas monitoring dan evaluasi lembaga rehabilitasi Komponen Masyarakat, Instansi Pemerintah dan Pasca Rehabilitasi. Monitoring bertujuan mengukur pencapaian keberhasilan program; menyusun perencanaan pengembangan kualitas layanan; menyusun perencanaan peningkatan jenis layanan; dan menyusun perencanaan pengembangan perluasan jangkauan layanan, sedangkan evaluasi bertujuan menilai kemajuan dan perkembangan lembaga rehabilitasi Komponen Masyarakat, Instansi Pemerintah dan Pasca Rehabilitasi. 6. Pengelolaan Klaim Lembaga Rehabilitasi : Memfasilitasi pengelolaan klaim seperti pengajuan klaim oleh lembaga rehabilitasi, administrasi data dukung klaim, verifikasi klaim dan pelaporan daftar pembayaran klaim untuk lembaga rehabilitasi Komponen Masyarakat, Instansi Pemerintah dan Pasca Rehabilitasi 7. Pengelolaan Data Klien : Memfasilitasi pengelolaan data klien termasuk identitas tunggal dan siklus terapi klien sampai dengan pasca rehabilitasi. 8. Monitoring Klien : Memfasilitasi monitoring klien setelah proses rehabilitasi berkelanjutan
Integrasi dengan Sistem Lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. E-KTP: Menerima data identitas penduduk 2. E-Services: Menerima dan memberikan data lembaga rehabilitasi untuk Komponen Masyarakat, Instansi Pemerintah dan Pasca Rehabilitasi (misal registrasi, proposal, pelaporan, klaim).

	<p>3. Adm. Klien: Menerima data klien.</p> <p>4. SI Manajemen Perencanaan: Menerima data program kerja tahunan.</p> <p>5. SI Manajemen Keuangan: Memberikan data realisasi kegiatan untuk pelaporan.</p> <p>6. SI Pemetaan P4GN: Memberikan data lembaga rehabilitasi untuk Komponen Masyarakat, Instansi Pemerintah dan Pasca Rehabilitasi, klien, beserta lokasinya.</p> <p>7. Statistical Analysis : Memberikan data klien, data lembaga rehabilitasi Komponen Masyarakat, Instansi Pemerintah dan Pasca Rehabilitasi untuk analisis statistik.</p> <p>8. DW-BI: Memberikan data klien, lembaga rehabilitasi untuk kebutuhan analisis/pelaporan.</p> <p>9. E - audit : Menerima data operasional lembaga rehabilitasi untuk Komponen Masyarakat, Instansi Pemerintah dan Pasca Rehabilitasi untuk keperluan audit.</p>
--	--

b. SI Pemetaan P4GN

ASPEK	DESKRIPSI
Modul Fungsional	<p>1. Pemetaan: memfasilitasi pemetaan data secara geospasial yang digunakan untuk program dan kegiatan P4GN oleh berbagai bidang terkait, yang mencakup</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemetaan Prevalensi, menggambarkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di tiap wilayah kabupaten/kota ▪ Pemetaan Wilayah Rawan, menggambarkan wilayah dengan tingkat peredaran narkoba yang tinggi baik di Perkotaan maupun Pedesaan ▪ Pemetaan Kelompok Rentan, menggambarkan sebaran kelompok masyarakat yang rentan terhadap serangan narkoba seperti anak jalanan, PSK, pekerja dan pengunjung tempat hiburan ▪ Pemetaan Instansi, menggambarkan sebaran instansi baik Pemerintah maupun Swasta ▪ Pemetaan Kelompok Masyarakat, menggambarkan sebaran kelompok masyarakat

	<ul style="list-style-type: none">▪ Pemetaan Penggiat Anti Narkoba, menggambarkan sebaran penggiat anti narkoba yang berasal dari pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat▪ Pemetaan Lembaga Rehabilitasi, menggambarkan sebaran lembaga rehabilitasi milik BNN dan seluruh fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat, instansi pemerintah, dan pasca rehabilitasi.▪ Pemetaan Klien, menggambarkan sebaran klien program rehabilitasi dan pasca rehabilitasi▪ Pemetaan Kasus, menggambarkan sebaran kasus terkait P4GN di seluruh wilayah kabupaten/kota▪ Pemetaan Kegiatan, menggambarkan sebaran kegiatan operasional BNN yang mencakup advokasi, sosialisasi, penyuluhan, dan intervensi▪ Pemetaan Hasil Intervensi, menggambarkan sebaran hasil kegiatan intervensi yang mencakup alih fungsi lahan, alih jenis profesi, dan alih jenis usaha▪ Pemetaan NPS, melakukan pemetaan untuk narkotika jenis terbaru
Integrasi dengan Sistem Lain	<ol style="list-style-type: none">1. E-KTP: Menerima data identitas penduduk2. SIN Modul Pencegahan: Mengirim data pemetaan, menerima data instansi3. SIN Modul Pemberantasan: Mengirim data pemetaan, menerima data terkait kasus4. SIN Modul Pemberdayaan Masyarakat: Mengirim data pemetaan, menerima data penggiat anti narkoba5. SIN Modul Rehabilitasi: Mengirim data pemetaan, menerima data klien6. SI Lembaga Rehabilitasi: Menerima data lembaga rehabilitasi, klien rehabilitasi.7. Crime Analysis: Menerima data analisis penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

c. *Social Media Relationship Management*

ASPEK	DESKRIPSI
Modul Fungsional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi Otomatis : Memfasilitasi publikasi konten secara otomatis ke sosial media. 2. Kolaborasi sosial : Memfasilitasi pengelolaan kolaborasi sosial yang mengacu pada proses yang membantu beberapa orang atau kelompok dari berbagai lapisan masyarakat untuk berinteraksi dan berbagi informasi dalam mencapai tujuan bersama. Berbagi konsep pada lingkungan kolaborasi digital sering memfasilitasi proses "<i>brainstorming</i>", di mana ide-ide baru mungkin muncul karena kontribusi dari bervariasi individu. 3. Manajemen Kontak : Memfasilitasi pendataan kontak dari beberapa orang atau suatu kelompok tertentu 4. Manajemen Konten : Memfasilitasi pengelolaan konten multimedia seperti gambar dan video terkait informasi pencegahan ke sosial media. 5. Penjadwalan Posting : Memfasilitasi penjadwalan posting konten secara otomatis 6. Social Engagement & Monitoring : Memfasilitasi monitoring aktivitas di sosial media. Fungsi di dalamnya berupa percakapan, diskusi, tanggapan, pencarian percakapan/diskusi, komentar. 7. Chat / grup Diskusi : Memfasilitasi komunikasi dua arah dan grup diskusi terkait informasi pencegahan kepada stakeholder. 8. Social media Analytics : Media analisis terhadap respon dari pengguna. Di dalamnya terdapat fungsi seperti <i>like post</i>, <i>like page</i>, <i>pelaporan post</i>, <i>pelaporan page</i>, pengelolaan keluhan.
Integrasi dengan Sistem Lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. E-Office : Menyampaikan data dari publik yang harus didisposisikan ke internal 2. SIN: Mendapatkan data-data untuk disampaikan ke publik.

d. *Crime Intelligence Database*

ASPEK	DESKRIPSI
Modul Fungsional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desainer: memfasilitasi pengelolaan <i>database</i> pemberantasan yang mencakup desain <i>database</i>, pembuatan <i>database</i> baru, pembaruan <i>database</i>, konfigurasi <i>database</i> serta pemeliharaan <i>database</i> 2. Pengguna: memfasilitasi pengguna untuk melakukan

	penambahan, perubahan, dan penghapusan <i>record</i> jika diperlukan; melakukan <i>query</i> dan analisa data; serta pembuatan laporan atau grafik
Integrasi dengan Sistem Lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIN Modul Pemberantasan: Menerima dan mengirimkan data terkait kasus termasuk identitas penduduk (dari E-KTP). 2. Money Laundering: Menerima data terkait kasus TPPU (data jaringan dan aset) 3. SI Interdiksi: Menerima data terkait kasus interdiksi (pergerakan orang dan barang) 4. SI Pemetaan P4GN: Mengirim data terkait kasus (lokasi dan waktu) 5. SI Tahanan: Menerima data terkait tahanan 6. SI Barang Bukti: Menerima data terkait barang bukti

e. *Crime Analysis*

ASPEK	DESKRIPSI
Modul Fungsional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Association Analysis: memfasilitasi analisis keterkaitan antar hal dalam suatu kasus kriminal. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisis Relasi: Analisis relasi antar entitas, seperti orang dan organisasi serta memvisualisasikan bagaimana keterhubungannya ▪ Analisis Kronologi: Analisis kronologi kejadian serta memvisualisasikan bagaimana urutan kejadiannya sepanjang waktu ▪ Analisis Komunikasi: Analisis komunikasi antar orang serta memvisualisasikan kemungkinan keterhubungannya berdasarkan intensitas komunikasi sepanjang waktu ▪ Analisis Temporal: Analisis aktivitas (terutama transaksi) tersangka yang mencurigakan atau yang dilakukan lebih banyak pada satu lokasi dan waktu tertentu serta memvisualisasikan bagaimana pola aktivitasnya sepanjang waktu ▪ Analisis Aliran Komoditas: Analisis aliran komoditas beserta nilainya serta memvisualisasikan bagaimana pola pergerakannya sepanjang waktu 2. Geospatial Analysis: Kombinasi antara analisis temporal dan data geospasial yang dapat memvisualisasikan pergerakan tersangka dari waktu ke waktu

Integrasi dengan Sistem Lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Criminal Intelligence Database: Menerima data kasus untuk dianalisis 2. SI-Pemetaan P4GN: Memberikan data peta penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
------------------------------	--

f. Money Laundering

ASPEK	DESKRIPSI
Modul Fungsional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Orang: memfasilitasi analisis terkait orang yang terlibat dalam pencucian uang, yang memungkinkan dilakukannya pencarian data pemilik rekening, pencarian data orang dengan id yang sama (ktp, sim, paspor), pencarian transaksi orang (baik dari rekening ke orang, orang ke orang, orang ke rekening, rekening ke rekening), serta analisis volume dan frekuensi transaksi orang 2. Analisis Entitas Bisnis: memfasilitasi analisis terkait entitas bisnis yang terlibat dalam pencucian uang, yang memungkinkan dilakukannya pencarian data pemilik entitas bisnis, pencarian transaksi entitas bisnis, serta analisis volume dan frekuensi transaksi entitas bisnis 3. Analisis Rekening: memfasilitasi analisis terkait rekening yang digunakan dalam pencucian uang, yang memungkinkan dilakukannya pencarian data rekening, pencarian transaksi rekening (masuk dan keluar), serta analisis volume dan frekuensi transaksi rekening 4. Analisis Demografi: memfasilitasi analisis demografi dalam pencucian uang, yang memungkinkan dilakukannya pencarian data orang dengan data cif (alamat, no. hp) yang sama, pencarian transaksi internasional, serta analisis volume dan frekuensi transaksi berdasarkan area (provinsi, kota) 5. Analisis Aset Jaringan: memfasilitasi analisis aset jaringan yang merupakan bentuk pencucian uang yaitu berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak
Integrasi dengan Sistem Lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOC (PPATK): Menerima data transaksi Manajemen Keuangan 2. Criminal Intelligence Database: Menerima data kasus, identitas penduduk 3. Crime Analysis: Menerima data peta narkoba.

g. SI Interdiksi

ASPEK	DESKRIPSI
Modul Fungsional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Pergerakan Orang: memfasilitasi pencarian data pergerakan orang serta analisis volume dan frekuensi pergerakan orang 2. Analisis Pergerakan Barang: memfasilitasi pencarian data pergerakan barang serta analisis volume dan frekuensi pergerakan barang
Integrasi dengan Sistem Lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. SI Manajemen Keimigrasian (SIMKim): Mendapat informasi mengenai data identitas dan lalulintas orang yang keluar masuk wilayah Indonesia yang terkait dengan peredaran gelap narkoba. 2. Bea Cukai: Mendapat informasi manifest orang dan barang yang diduga narkoba melalui sistem eksisting <i>Passenger Analysis Unit (PAU)</i> dan <i>Container Control Programme (CCP)</i>, <i>Passenger Name Record</i>. 3. Criminal Intelligence Database: Menerima data kasus termasuk identitas penduduk dan memberikan data-data interdiksi. 4. Crime Analysis: Menerima data analisis narkoba. 5. E- KTP : Memberikan informasi data orang yang diduga terlibat dalam peredaran gelap narkoba 6. PJT (perusahaan jasa kiriman barang) : Memberikan informasi paket barang dari luar negeri yang diduga narkoba 7. Dirjen PAS (Pemasyarakatan): Memberikan informasi tentang penghuni lapas dan status hukuman

h. SI Tahanan

ASPEK	DESKRIPSI
Modul Fungsional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Tahanan: Memfasilitasi pencatatan data tahanan, pencatatan administrasi masuk seperti penerimaan Tahanan Baru, pencatatan Penahanan BNN selama 20 hari, Perpanjangan penahanan JPU (Jaksa Penuntut Umum) 40 hari, PN I (Pengadilan Negeri 1) : 30 hari PN II (Pengadilan Negeri II) : 30 hari, Penerimaan Tahanan kembali setelah pembantaran, dan penerimaan titipan Narapidana dari Lapas/Rutan oleh penyidik Pencatatan administrasi tahanan keluar seperti Pengeluaran Tahanan Tahap 2, Pengeluaran Tahanan Pembantaran, dan Pengeluaran Narapidana Untuk Dikembalikan ke lapas/Rutan Asal;

	<p>2. Monitoring Tahanan: Memfasilitasi data tahanan yang ada di Rutan BNN dengan cepat dan akurat</p> <p>3. Kunjungan Tahanan : Memfasilitasi pendaftaran (registrasi pengunjung), kontrol kunjungan (pengawasan kegiatan kunjungan), penyediaan database pengunjung serta dokumentasi dan laporan</p>
Integrasi dengan Sistem Lain	<p>1. SIN Modul Pemberantasan: Memberikan data terkait tahanan, menerima data terkait tahanan termasuk identitas penduduk (dari E-KTP).</p>

i. SI Barang Bukti

ASPEK	DESKRIPSI
Modul Fungsional	<p>1. Administrasi Barang Bukti: Memfasilitasi pencatatan administrasi keluar masuk barang bukti. Pencatatan administrasi keluar barang bukti seperti pencatatan penyimpanan diklat iptek sedangkan pencatatan administrasi barang bukti keluar seperti pencatatan terkait pemusnahan dan penyesihan barang bukti guna kepentingan diklat iptek instansi lain.</p> <p>2. Inventory Barang Bukti: Memfasilitasi pengelolaan penyimpanan barang bukti termasuk lokasi penyimpanannya</p> <p>3. Monitoring Barang Bukti: Memfasilitasi data barang bukti yang ada di tempat penyimpanan barang bukti dengan cepat dan akurat</p>
Integrasi dengan Sistem Lain	<p>1. SIN Modul Pemberantasan: Menerima data terkait kasus dan memberikan data terkait barang bukti.</p> <p>2. Integrated Human Capital Management: mengecek identitas pegawai</p>

j. SI Manajemen Laboratorium

ASPEK	DESKRIPSI
Modul Fungsional	<p>1. Pendaftaran Online SKBN : Memfasilitasi pendaftaran online untuk surat keterangan bebas narkoba</p> <p>2. Manajemen Laboratorium : Memfasilitasi pengelolaan pada proses laboratorium meliputi penerimaan, penimbangan, analisa (uji <i>screening</i> dan konfirmasi), Berita acara, Pembungkusan dan Pemberkasan serta Pengembalian dan Pelaporan</p>

	<p>3. Pengecekan Proses Pengujian : Memfasilitasi pendataan proses pengujian dan Analisa untuk bahan dan persediaan barang bukti narkotika serta spesimen biologi dan toksikologi misalnya urine pengguna</p> <p>4. Pengecekan Hasil Pengujian : Memfasilitasi pengelolaan berita acara yang menjelaskan hasil dari pengujian</p>
Integrasi dengan Sistem Lain	<p>1. E-Services: Menerima data-data pengajuan uji narkoba, memberikan data-data pengujian baik kemajuan atau hasil akhirnya.</p> <p>2. SI Pemetaan P4GN : Menerima data dari pemetaan Narkotika jenis NPS dan profiling.</p> <p>3. Crime Inteligence Database: Memberikan data-data hasil pengujian.</p> <p>4. Survey Online : Memberikan data kuesioner <i>online</i> mengenai kepuasan pelayanan.</p>

k. SI Adm. Klien

ASPEK	DESKRIPSI
Modul Fungsional	<p>1. Registrasi Klien : Memfasilitasi pendaftaran klien secara online di Balai Besar Rehabilitasi.</p> <p>2. Screening Klien : Memfasilitasi <i>assessment</i> untuk tahap penerimaan awal untuk menentukan diagnosa dan rencana perawatan yang akan diberikan kepada klien. Tahap penerimaan awal ini meliputi: wawancara; pemeriksaan fisik; pemeriksaan psikis; dan pemeriksaan laboratorium (bagi yang mendapatkan dukungan dari BNN).</p> <p>3. Assesment User: Memfasilitasi penilaian untuk tenaga professional baik medis/paramedik terkait kemajuan klien/ dalam proses rehabilitasi. Penilaian ini terkait kondisi fisik dan psikis klien dalam menjalankan proses pemulihannya.</p> <p>4. Monitoring status klien : Memfasilitasi pemantauan posisi klien dalam tahap pelaksanaan rehabilitasi. Posisi ini terkait tahap rehabilitasi yang sedang dilakukan oleh klien.</p>
Integrasi dengan Sistem Lain	<p>1. SIN Modul Rehabilitasi: Menerima data identitas penduduk, memberikan data-data klien.</p>

l. *Medical Record*

ASPEK	DESKRIPSI
Modul Fungsional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tracking dokumen fisik: Memfasilitasi pencatatan medical record fisik. (masa transisi selama masih ada yang manual) 2. Tindakan medik : Memfasilitasi pencatatan semua tindakan medik oleh medik/paramedik. 3. Data penunjang medik : Memfasilitasi data penunjang medik seperti image radiologi dsb 4. Kodifikasi MedRec : Memfasilitasi kodifikasi catatan medrec dengan kode standard medical record
Integrasi dengan Sistem Lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adm. Klien : Menerima data klien dan memberikan data-data klien pada pemeriksaan sebelumnya. 2. SI Farmasi RS: Menerima data-data obat yang diberikan kepada klien yang akan dimasukkan ke rekam medis.

m. *SI Farmasi RS*

ASPEK	DESKRIPSI
Modul Fungsional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transfer Stok : Memfasilitasi transfer stok IN/OUT dari dan ke gudang medic 2. Pra-Purchase Request : Memfasilitasi kebutuhan stok sebagai bahan perencanaan gudang medik untuk membuat PR 3. Monitoring Stok Farmasi : Memfasilitasi monitoring stok obat di bagian farmasi
Integrasi dengan Sistem Lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Medical Record : Memberikan data-data obat yang digunakan klien dan menerima data-data tentang klien terkait dengan pemberian obat.

2. *Pelayanan*

a. *E-Services*

ASPEK	DESKRIPSI
Modul Fungsional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Penggiat Anti Narkoba: layanan yang ditujukan kepada penggiat anti narkoba yang mencakup pengelolaan penggiat anti narkoba (pendaftaran penggiat, pengajuan proposal program dan kegiatan, verifikasi proposal, dokumentasi dan pelaporan kegiatan), serta akses ke learning management system

- 2. Layanan Lembaga Rehabilitasi:** layanan yang ditujukan kepada lembaga rehabilitasi yang mencakup registrasi lembaga, registrasi program pengembangan, pelaporan serta pengajuan klaim
- 3. Layanan Klien:** layanan yang ditujukan kepada klien untuk dapat mengetahui informasi terkait klien (nama, jenis perawatan, lama perawatan, relapse) serta riwayat rehabilitasinya (lokasi, penggunaan obat)
- 4. Pengajuan Impor/Ekspor Prekursor:** layanan yang ditujukan kepada perusahaan importir/eksportir prekursor yang terdiri dari
 - Manajemen Akun Perusahaan Terdaftar
 - Manajemen Pengajuan
 - Pengajuan Permohonan sebagai Importir Terdaftar
 - Pengajuan Perpanjangan Importir Terdaftar
 - Pengajuan Permohonan Rekomendasi Impor Prekursor
 - Pengajuan Permohonan Rekomendasi Ekspor Prekursor
 - Manajemen Importir
 - Daftar Importir
 - Proses Verifikasi Importir Terdaftar
 - Pemberian Rekomendasi Impor
 - Monitoring Rekomendasi Importir
 - Daftar Realisasi Impor
 - Manajemen Eksportir
 - Daftar Eksportir
 - Pemberian Rekomendasi Ekspor
 - Monitoring Rekomendasi Eksportir
 - Manajemen Pelaporan
 - Pelaporan Importir Terdaftar
 - Pelaporan Importir Produsen
- 5. Layanan Tes Urine:** memfasilitasi pengajuan tes urine, baik yang diajukan oleh perorangan maupun lembaga. Pengajuan lembaga/kolektif disampaikan ke Pemberdayaan Masyarakat oleh perorangan disampaikan ke Laboratorium.
- 6. Layanan Hukum:** memfasilitasi pengelolaan layanan hukum oleh BNN seperti informasi hukum, konsultasi hukum dari masyarakat.

Integrasi dengan Sistem Lain	1. SIN Modul Pemberdayaan Masyarakat: mengirim data pengajuan tes uji narkoba
------------------------------	--

b. *Web Portal*

ASPEK	DESKRIPSI
Modul Fungsional	<p>1. Portal Pencegahan: portal publik yang ditujukan untuk pencegahan P4GN yang terdiri dari beberapa fitur seperti</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berita dan Artikel ▪ Unduh Konten Pencegahan ▪ Survey Efektifitas Pencegahan <p>2. Portal Informasi: portal publik yang ditujukan untuk informasi layanan yang diberikan oleh BNN terkait layanan rehabilitasi dan layanan pasca rehabilitasi</p> <p>3. Portal Hukum: portal publik yang ditujukan untuk informasi dan layanan hukum yang mencakup informasi peraturan perundang-undangan serta bantuan hukum non-litigasi</p> <p>4. Portal Kerjasama: portal publik yang ditujukan untuk sosialisasi event kerjasama yang telah dilakukan BNN baik di tingkat Nasional, Regional, maupun Internasional. Event kerjasama yang sifatnya privat hanya dapat diakses oleh internal BNN saja.</p>
Integrasi dengan Sistem Lain	<p>1. SIN Modul Pemberdayaan Masyarakat: mengirim data dari portal penggiat anti narkoba</p> <p>2. SIN Modul Rehabilitasi: menerima data klien</p> <p>3. SI Lembaga Rehabilitasi: mengirim data dari portal lembaga rehabilitasi</p>

c. *Contact Center*

ASPEK	DESKRIPSI
Modul Fungsional	<p>1. Call Center : Memfasilitasi layanan pengaduan pelanggan terpusat untuk menerima dan menyambungkan panggilan telepon dalam jumlah besar</p> <p>2. Call Recording: Memfasilitasi rekaman percakapan telepon melalui PSTN atau VoIP dalam format file digital audio.</p>
Integrasi dengan Sistem Lain	4. SIN Modul Pencegahan: mendapatkan data pencegahan

	<p>5. SIN Modul Pemberdayaan: mendapatkan data pemberdayaan</p> <p>6. SIN Pemberantasan: mendapatkan data pemberantasan</p> <p>7. SIN Rehabilitasi: mendapatkan data rehabilitasi</p> <p>8. E-Office: menyampaikan surat atau dokumen dari publik ke pihak terkait.</p>
--	---

d. *Online Survey*

ASPEK	DESKRIPSI
Modul Fungsional	<p>1. Questionnaire : Memfasilitasi pendataan dan pengisian kuesioner secara <i>online</i></p> <p>2. Interview Schedule: Memfasilitasi penjadwalan wawancara kepada narasumber</p> <p>3. Data Collection : Memfasilitasi pengumpulan data baik data yang dihasilkan dari kuesioner online maupun secara <i>offline</i></p>
Integrasi dengan Sistem Lain	<p>1. Statistical Analysis : Menerima data kuesioner online</p> <p>2. Laboratorium Information System : Menerima data kuesioner <i>online</i> mengenai kepuasan pelayanan</p> <p>3. Social Media Relationship Management : Menerima data kuesioner online</p>

e. *Whistle Blowing*

ASPEK	DESKRIPSI
Modul Fungsional	<p>1. Pelaporan publik: publik dapat melaporkan kemungkinan pelanggaran prinsip atau praktik tata kelola oleh staff BNN yang akan diterima oleh APIP; pelaporan disertai dengan bukti yang akan jadi dasar untuk tindak lanjut.</p> <p>2. Pelaporan internal: staf internal dapat melaporkan kemungkinan pelanggaran prinsip atau praktik tata kelola oleh staff BNN lainnya (baik kolega maupun atasan) yang akan diterima oleh APIP; pelaporan disertai dengan bukti yang akan jadi dasar untuk tindak lanjut</p> <p>3. Review dan filterisasi pengaduan: pemilahan pelaporan yang masuk untuk menentukan ke layanan tindak lanjut, berdasarkan ketersediaan bukti pelaporan.</p>

	<p>4. Tindak Lanjut atas pelaporan: dokumentasi kegiatan tindak lanjut serta rekomendasi yang dihasilkan, termasuk menetapkan status <i>closing</i> atas pelaporan.</p>
Integrasi dengan Sistem Lain	<p>1. Datawarehouse-Business Intelligence: akan menjadi sumber data untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaporan yang masuk, yang layak ditindaklanjuti dan status tindak lanjut pelaporan.</p>

3. *Planning and Governance*

i. *SI Manajemen Perencanaan*

ASPEK	DESKRIPSI
Modul Fungsional	<p>1. Strategic Planning: Memfasilitasi perencanaan strategis BNN yang diturunkan menjadi indikator kinerja dari tingkat BNN ke tingkat BNNP sampai dengan tingkat BNNK termasuk rencana kerja tahunan BNN;</p> <p>2. Planning & Budgeting: Memfasilitasi perencanaan rencana kerja dan anggaran BNN, termasuk penyalarsan anggaran dan review RKA/RKL oleh APIP;</p> <p>3. Pengendalian Anggaran: memfasilitasi pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebijakan pengendalian anggaran;</p> <p>4. Evaluasi Kinerja & Anggaran: Evaluasi kinerja secara rutin dan insidental serta evaluasi anggaran secara berkala.</p> <p>5. Pelaporan : Menyusun laporan kinerja dan penggunaan anggaran dari tingkat wilayah sampai tingkat pusat.</p>
Integrasi dengan Sistem Lain	<p>1. SIN Modul Pencegahan : Memberikan data rencana kerja pencegahan</p> <p>2. SIN Modul Pemberdayaan Masyarakat : Memberikan data rencana kerja pemberdayaan masyarakat</p> <p>3. SIN Modul Rehabilitasi: Memberikan data rencana kerja rehabilitasi</p> <p>4. SIN Modul Pemberantasan: Memberikan data rencana kerja pemberantasan</p>

	<p>5. SI Manajemen Kepegawaian: Memberikan data rencana kerja pengembangan SDM</p> <p>6. SI Manajemen Keuangan: Memberikan data rencana kerja untuk realisasi dan pelaporan</p>
--	---

ii. *E-Audit*

ASPEK	DESKRIPSI
Modul Fungsional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Risiko : Melakukan penilaian risiko dan kontrol dalam proses audit 2. Penjadwalan audit dan tim audit : Memfasilitasi waktu pelaksanaan audit dan pemilihan tim audit 3. Pelacakan Proyek audit dan masalah : Memfasilitasi pelacakan proyek audit dan permasalahan audit 4. Dokumentasi audit : Memfasilitasi pendataan dan dokumentasi hasil pelaksanaan prosedur audit serta pendataan dan dokumentasi temuan 5. Pengelolaan Tindak Lanjut : Memfasilitasi pengelolaan tindak lanjut audit untuk memastikan tindak lanjut tersebut dilaksanakan. 6. Review dan catatan hasil audit : Memfasilitasi tinjauan ulang dan masukan terhadap hasil audit. 7. Analisis Data : Melakukan analisa data operasional yang diperlukan untuk keperluan audit. Analisis data tersebut termasuk akses ke semua data operasional.
Integrasi dengan Sistem Lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua Sistem Operasional : Menerima data operasional untuk keperluan audit 2. SI Manajemen Keuangan: Menerima data keuangan untuk keperluan audit 3. SI Manajemen Perencanaan: Menerima data perencanaan untuk keperluan audit 4. SI Manajemen Kepegawaian: Menerima data kepegawaian untuk keperluan audit

4. *Resource Management*

a. SI Manajemen SDM

ASPEK	DESKRIPSI
Modul Fungsional	<ol style="list-style-type: none"> 1. HR Administration : Memfasilitasi pengelolaan data pegawai termasuk biodata pegawai (riwayat hidup, pendidikan, kompetensi dan jabatan, sanksi administrasi); 2. Manajemen Organisasi : Mengelola struktur organisasi termasuk hirarki, kewenangan, jalur eskalasi, jobdesc, kompetensi yang dibutuhkan;

	<p>3. Manajemen Kinerja : Memfasilitasi pengelolaan Kinerja pegawai, pendataan angka kredit dan SMK (untuk Polri/TNI)/SKP (untuk PNS) dan penilaian pegawai seperti penilaian Kepangkatan, TPA (Tes Potensi Akademik).</p> <p>4. Presensi : mengelola presensi pegawai yang terintegrasi dengan sistem operasional.</p> <p>5. Penempatan Pegawai : Mengelola penempatan pegawai sesuai dengan struktur organisasi, analisa beban kerja dan jabatan.</p> <p>6. Pengelolaan Program Pengembangan SDM : Memfasilitasi pengelolaan program pengembangan SDM, termasuk identifikasi potensi, pelatihan , pengembangan karir dan kompetensi</p> <p>7. Pengelolaan kepangkatan & Mutasi Jabatan : Memfasilitasi pendataan daftar usulan kenaikan pangkat reguler, daftar usulan kenaikan pangkat, usulan pensiun dan mutasi jabatan dll.</p> <p>8. Analisis Beban Kerja : Memfasilitasi analisis beban kerja pegawai untuk alokasi SDM.</p> <p>9. Pengelolaan Daftar Diklat : Memfasilitasi pengelolaan daftar diklat seperti pendaftaran peserta diklat, pendataan diklat prajabatan, pemilihan jenis diklat yang diikuti dan periode diklat yang diselenggarakan.</p> <p>10. Talent Management : Memfasilitasi pengelolaan <i>talent</i> pegawai termasuk identifikasi, pengembangan dan kompetensi.</p> <p>11. Verifikasi serah terima jabatan : Memverifikasi setiap hak terkait fasilitas yang melekat kepada pejabat yang melakukan pergantian atau mutasi.</p> <p>12. Pengelolaan Statistik Kepegawaian : Memfasilitasi Pendataan komposisi Pegawai berdasarkan jumlah, golongan/Ruang, Jabatan, Jenjang Pendidikan dan Umur</p> <p>13. Monitoring : Memfasilitasi monitoring kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan Pensiun.</p> <p>14. Pelaporan : Menampilkan dan mencetak detail daftar Riwayat Hidup dan Kepangkatan.</p>
Integrasi dengan Sistem Lain	<p>1. SI Manajemen Diklat: Memberikan data-data pegawai terkait diklat, Program pengembangan SDM, menerima hasil Diklat.</p> <p>2. SI Manajemen Keuangan: Memberikan data pegawai, data kinerja pegawai</p> <p>3. E – Library : Menerima data pegawai perpustakaan</p> <p>4. SIN : Menerima data pegawai operator SIN</p>

b. SI Diklat

ASPEK	DESKRIPSI
Modul Fungsional	<ol style="list-style-type: none">1. Analisis kebutuhan diklat: Memfasilitasi analisa kebutuhan kegiatan diklat2. E-Registrasi : Memfasilitasi pendaftaran dan pendataan kebutuhan diklat masing-masing satker3. Pengelolaan Diklat : Memfasilitasi perencanaan diklat seperti pengelolaan hasil analisis kebutuhan diklat ke dalam jadwal program diklat termasuk perencanaan kurikulum, silabus dan pematery serta mengakomodir pengelolaan seleksi, presensi peserta dan penilaian peserta diklat4. E-Learning : Memfasilitasi kegiatan diklat dalam bentuk non-klasikal (secara online) kepada peserta. Adapun Modul E- learning adalah sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">a. Data Peserta dan Instruktur : Memfasilitasi pendataan data peserta dan instruktur diklatb. Master mata pelajaran : Memfasilitasi pendataan jenis bidang ajar yang dapat diakses oleh peserta diklatc. Latihan dan Ujian : Memfasilitasi pengelolaan dan distribusi materi untuk bahan latihan dan ujian untuk para peserta diklatd. Penugasan : Memfasilitasi penugasan oleh tenaga pengajar / instruktur kepada para peserta diklate. Penilaian Kemajuan : Memfasilitasi sistem penilaian peserta diklatf. Kolaborasi Bidang Ajar : Memfasilitasi kolaborasi pengajaran dengan bidang dan materi yang berbedag. Manajemen Konten : Memfasilitasi pengelolaan bahan ajar/ materi diklat untuk pesertah. Penjadwalan : Memfasilitasi penjadwalan waktu diklati. Pelaporan : Memfasilitasi pelaporan – pelaporan terkait operasional diklat5. Manajemen Pengetahuan : Memfasilitasi dokumentasi berbagai konten tidak terstruktur atau terstruktur. Mengelola taksonomi pengetahuan berdasarkan lingkup pengetahuan yang dikelola di organisasi. Konten tersebut antara lain :

	<p>a. Informasi Teknis : Memfasilitasi mengenai informasi – informasi teknis seperti informasi teknis terkait jenis narkoba terbaru</p> <p>b. Metode dan Penelitian : Memfasilitasi metode dan penelitian terbaru yang dilakukan termasuk penelitian tentang jenis narkoba terbaru ataupun metode terkait penyembuhan pecandu narkoba</p> <p>c. SOP : Memfasilitasi dokumentasi prosedur pelaksanaan kegiatan di seluruh unit BNN</p> <p>d. Regulasi BNN : Memfasilitasi dokumentasi mengenai regulasi – regulasi yang dikeluarkan oleh BNN</p> <p>e. Publikasi Hasil Diklat: Memfasilitasi pendataan dan penyimpanan publikasi hasil diklat.</p> <p>6. Database Alumni: Memfasilitasi penyimpanan data-data alumni diklat</p> <p>7. Monitoring dan Evaluasi : Memfasilitasi monitoring dan evaluasi peserta pasca diklat termasuk analisa kebutuhan diklat bagi alumni</p> <p>8. Pelaporan : Memfasilitasi keperluan pelaporan tiap kegiatan diklat ke SIDA (Sistem Informasi Diklat Aparatur) dan BNN.</p>
Integrasi dengan Sistem Lain	<p>1. SI Manajemen SDM: Menerima data peserta Diklat, pengembangan pegawai, memberikan data hasil Diklat.</p> <p>2. E-Service: Memberikan konten yang diperlukan untuk publik.</p> <p>3. SIDA (Sistem Informasi Diklat Aparatur): Menerima data Peserta Diklat, diharapkan integrasi ini dapat mempercepat proses registrasi peserta di SIDA serta perolehan nomor registrasi peserta dari SIDA</p> <p>4. Laboratorium Information System : Menerima data informasi teknis terkait jenis narkoba terbaru</p>

c. SI Manajemen Keuangan

ASPEK	DESKRIPSI
Modul Fungsional	<p>1. Penganggaran: memfasilitasi pengelolaan anggaran yang mencakup penyusunan anggaran (SBK, RKAKL, KPJM, dll) dan pelaksanaan anggaran (DIPA, POK, Perencanaan Kas)</p> <p>2. Komitmen: memfasilitasi pengelolaan supplier dan kontrak</p>

- 3. Gaji Pegawai:** memfasilitasi pengelolaan data pegawai dan gaji pegawai termasuk perhitungan gaji, kekurangan gaji, permintaan persekot, perhitungan uang makan, perhitungan tunjangan kinerja
- 4. Perjalanan Dinas:** memfasilitasi pengelolaan terkait perjalanan dinas pegawai yang mencakup pembuatan surat tugas, surat perjalanan dinas, kuitansi, daftar nominatif, daftar pengeluaran riil, daftar monitoring
- 5. Pembayaran:** memfasilitasi pengelolaan terkait pembayaran yang mencakup proses resume tagihan dan proses surat perintah membayar (SPM)
- 6. Bendahara:** memfasilitasi pengelolaan terkait perbendaharaan yang mencakup pengelolaan uang persediaan (UP) dan tambahan uang persediaan (TUP), pengelolaan dana titipan, pengelolaan penerimaan PNBPF fungsional, serta penyusunan LPJ bendahara penerimaan atau pengeluaran
- 7. Persediaan:** memfasilitasi pengelolaan terkait persediaan yang mencakup pencatatan keluar masuk barang persediaan, opname fisik, serta pembuatan laporan
- 8. Aset Tetap:** memfasilitasi pengelolaan terkait aset tetap yang mencakup
 - Penatausahaan Barang Milik Negara
 - Penatausahaan dan pencatatan semua transaksi mutasi BMN
 - Pengakuntansian BMN sebagai aset tetap dengan basis akrual
 - Perhitungan dan pengakuntansian penyusutan Aset Tetap
- 9. Pelaporan dan Akuntansi:** memfasilitasi pelaporan dan akuntansi keuangan yang terdiri dari
 - Sistem akuntansi, terintegrasi dengan modul-modul lain yang terkait
 - Sistem pelaporan manajerial (statistik)
 - Sistem rekonsiliasi dan konsolidasi pelaporan
- 10. Perhitungan dan Pelaporan Pajak:** memfasilitasi perhitungan dan pelaporan pajak (PPN, PPh, PPh 21, PPh 23)

	<p>11. Informasi Nilai Kas Brankas: memberikan informasi nilai kas brankas baik dalam bentuk cash maupun rekening di BNN, seluruh BNNP, dan seluruh BNNK</p>
<p>Integrasi dengan Sistem Lain</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrated Human Capital Management: menerima data terkait kehadiran pegawai 2. SI Pengadaan: menerima data penganggaran 3. Cash Management System: mengirimkan informasi nilai kas brankas dalam bentuk cash 4. E-Audit BPK: mengirim data laporan pertanggungjawaban keuangan 5. SIN Modul Pencegahan: menerima data program dan kegiatan pencegahan 6. SIN Modul Pemberdayaan: menerima data program dan kegiatan pemberdayaan 7. SIN Modul Pemberantasan: menerima data program dan kegiatan pemberantasan 8. SIN Modul Rehabilitasi: menerima data program dan kegiatan rehabilitasi 9. BRI Cash Management System: menerima informasi nilai kas brankas dalam bentuk rekening

d. E-Library

ASPEK	DESKRIPSI
<p>Modul Fungsional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Katalog : Memfasilitasi pengelolaan Katalog untuk memudahkan pencarian buku oleh pengguna maupun pustakawan dengan merujuk nama pengarang sebuah buku, tajuk buku manapun subjek buku terbit. 2. Manajemen Sirkulasi (Keluar Masuk Buku): memfasilitasi Transaksi peminjaman dan pengembalian buku / keluar masuk buku 3. OPAC system: Memungkinkan sistem katalog terpasang dapat diakses secara umum 4. Barcode Scanning RFID : Memfasilitasi validasi data pada sirkulasi buku menggunakan RFID 5. Statistik Perpustakaan : Memfasilitasi perhitungan statistik terkait jumlah kunjungan ke perpustakaan maupun jumlah peminjam koleksi buku tertentu 6. Gate System : Memfasilitasi kendali akses operasional kunjungan ke perpustakaan 7. Drop Box System : Memfasilitasi pengembalian buku dalam satu wadah dengan identifikasi menggunakan RFID

Integrasi dengan Sistem Lain	1. SI Manajemen SDM: mendapatkan data SDM peminjaman.
------------------------------	--

5. *Analytical*

a. *Datawarehouse – Business Intelligence*

ASPEK	DESKRIPSI
Modul Fungsional	<p>1. Konsolidasi Data Korporat : Memfasilitasi Konsolidasi dalam bentuk data terstruktur dan disimpan dalam datawarehouse untuk mempresentasikan informasi historis seluruh kategori informasi organisasi.</p> <p>2. Pelaporan : Memfasilitasi penyampaian laporan hasil analisis data konsolidasi. Laporan tersebut untuk membantu, mempermudah dan menyederhanakan semua pihak di lingkungan organisasi terutama pimpinan. Hal ini akan mengakomodir akurasi dan validitas data karena hanya data dasar yang digunakan dan dipakai sebagai acuan konsolidasi laporan tersebut.</p>
Integrasi dengan Sistem Lain	<p>1. Semua Sistem Operasional: mendapatkan data operasional.</p> <p>2. Situation Room: menyampaikan report analisis untuk internal</p> <p>3. Media Center: menyampaikan report analisis untuk eksternal.</p>

b. *Statistical Analysis*

ASPEK	DESKRIPSI
Modul Fungsional	<p>1. Analytical Decision Management : Memfasilitasi pengelolaan pengambilan keputusan secara analitical.</p> <p>2. Modeling Algorithms : Memfasilitasi berbagai model-model algoritma statistika berdasarkan klasifikasi variable dalam menyelesaikan kasus tertentu.</p> <p>3. Automated Modeling : Memfasilitasi model statistika dari variabel input secara otomatis</p>
Integrasi dengan Sistem Lain	<p>1. Online Survey : Menerima data kuesioner online</p> <p>2. Modul Pencegahan : Menerima data peserta kegiatan advokasi dan diseminasi</p> <p>3. Modul Rehabilitasi : Menerima data klien rehabilitasi</p>

6. *Collaboration*

a. *E-Office*

ASPEK	DESKRIPSI
Modul Fungsional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registrasi Surat : Memfasilitasi registrasi semua surat termasuk surat keluar dan masuk 2. Disposisi Surat Masuk : Memfasilitasi digitasi surat hardcopy, indexing, dan klasifikasi surat 3. Pembuatan Surat Keluar : Memfasilitasi pembuatan surat termasuk mengelola persetujuan surat oleh pihak berwenang 4. Pengelolaan Memo : Mengelola memo yang digunakan untuk kepentingan internal termasuk menyampaikan memo ke pihak terkait. 5. Laporan Surat : Memfasilitasi pengelolaan laporan surat keluar dan surat masuk.
Integrasi dengan Sistem Lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Document Management : memberikan surat arsip hasil digitasi untuk diarsipkan;

b. *SI Manajemen Dokumen*

c.

ASPEK	DESKRIPSI
Modul Fungsional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Dokumentasi : Memfasilitasi penyimpanan arsip secara sistematis serta pengelolaan kerahasiaan arsip 2. Digitasi : Memfasilitasi digitasi dokumen <i>hardcopy</i> sehingga memudahkan untuk melakukan diseminasi, penyimpanan maupun retrieval 3. Searching : Memfasilitasi pencarian dokumen/arsip yang dibutuhkan. 4. Back Up Document : Memfasilitasi penyalinan dan pembuatan dokumen cadangan secara elektronik sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan.
Integrasi dengan Sistem Lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. E - Office : Menerima data surat arsip hasil digitasi untuk diarsipkan;

d. *Situation Room*

ASPEK	DESKRIPSI
Modul Fungsional	<p>1. Pusat Monitoring Data : Memfasilitasi pengawasan terhadap semua data antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Data Pemetaan P4GN : <ul style="list-style-type: none"> a. Pemetaan Prevalensi b. Pemetaan Wilayah Rawan c. Pemetaan Klien d. Pemetaan Kasus e. Pemetaan Kegiatan f. Pemetaan Penggiat anti narkoba g. dsb ii. Summary Data Penting <ul style="list-style-type: none"> a. Summary data kasus b. Summary data tersangka c. Summary data tahanan d. Summary data barang Bukti e. Summary Peserta Sosialisasi f. Summary Klien g. dsb iii. Data teleconference <p>2. Komunikasi dan Koordinasi : Memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara petugas <i>command center</i> dengan <i>stackholder</i>, terkait pengambilan keputusan tertentu</p>
Integrasi dengan Sistem Lain	<p>1. Teleconference : Memberikan data teleconference</p> <p>2. Pemetaan P4GN : Memberikan data pemetaan P4GN</p> <p>3. Business Intelligence : Memberikan data analisis pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat</p>

e. *Teleconference*

ASPEK	DESKRIPSI
Modul Fungsional	<p>1. Multipoint Video Conference : Memfasilitasi konferensi video dengan banyak pihak.</p> <p>2. Gateway Service : Memfasilitasi video dan audio berjalan dalam format yang sama</p> <p>3. Lecture Mode : Memfasilitasi lokasi video, audio dan data dapat diakses oleh banyak pihak.</p>
Integrasi dengan Sistem Lain	<p>1. Situation Room : memfasilitasi <i>teleconference</i>.</p>

e. Media Center

ASPEK	DESKRIPSI
Modul Fungsional	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="480 338 1402 418">1. News Update: Menyajikan informasi seputar kegiatan BNN terbaru secara <i>up to date</i><li data-bbox="480 431 1402 558">2. Kiosk Informasi: Pusat informasi dalam bentuk layar sentuh interaktif yang menyediakan informasi umum seperti program, layanan, dan profil dari BNN<li data-bbox="480 570 1402 650">3. Permohonan Informasi: Memfasilitasi permohonan informasi publik secara cepat<li data-bbox="480 662 1402 789">4. Pelayanan Keluhan: Memfasilitasi pelayanan keluhan mencakup penyampaian keluhan, penyampaian tanggapan, dan <i>track</i> keluhan
Integrasi dengan Sistem Lain	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="480 807 1402 839">1. DW-BI : menerima data analisis untuk publik.

BAB V
ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

A. Arsitektur Jaringan Komunikasi

Desain arsitektur jaringan BNN memiliki dua prinsip utama. Prinsip tersebut menjadi panduan untuk menyusun segmen utama dan fungsi aliran data utama sebagai berikut.

1. Fungsionalitas segmen jaringan yang mencerminkan ketersediaan layanan dan aliran data. Prinsip pertama ini mencerminkan fungsi availabilitas yang berupa backup, atau menghindari resiko akibat adanya *single point failure*.
2. Pembagian jaringan pada segmen-segmen fungsional. Segmentasi tersebut membentuk modularitas yang menunjukkan aspek skalabilitas fungsi jaringan. Prinsip ke dua mencerminkan bahwa penambahan atau pengurangan skala jaringan dapat dilakukan dengan mudah, tanpa mengubah jaringan eksisting secara keseluruhan. Prinsip ini juga berarti penambahan fungsi, misalnya pemasangan *firewall*, dapat dilakukan dengan mudah berdasar pada arsitektur eksisting.

a. Jaringan BNN Global dan BNN

Pada model desain ini, jaringan BNN akan memiliki segmen-segmen dengan kelengkapan sebagai berikut:

- 1) Layanan konektivitas internal kantor, yang berupa LAN (*Local Area Network*). Jaringan LAN sebagai subnet layanan bagi *user* internal BNN.
- 2) Layanan ketersediaan data dan aplikasi untuk internal organisasi. Segmen ini berupa Data Center, yang salah satunya berfungsi sebagai subnet server untuk keperluan internal BNN. Server yang diakses oleh cabang juga ditempatkan pada subnet ini.
- 3) Layanan aplikasi dan data bagi pihak eksternal, yaitu segmen *Internet Server* dan *Extranet Server*.
- 4) Layanan konektivitas antar BNN, Instansi Vertikal yang ada di BNN, yang terhubung ke penyedia jasa DRC

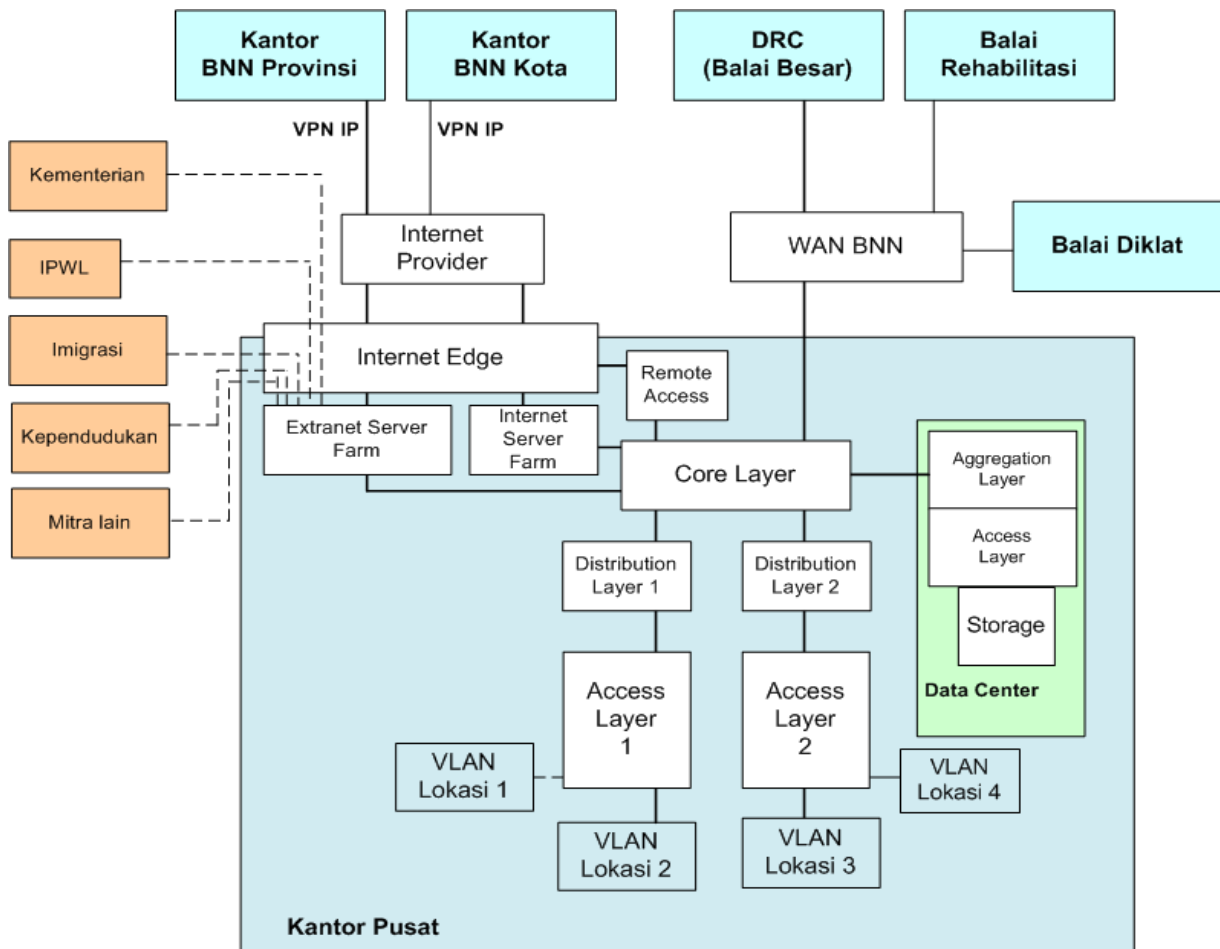
(*Disaster Recovery Center*). Koneksi ini disebut WAN (*Wide Area Network*). Bagi *user* di luar Kantor BNN yang berpindah-pindah, disediakan segmen *Remote Access* untuk layanan ke dalam jaringan internal dan Data Center.

- 5) Layanan konektivitas bagi pihak eksternal ke BNN menggunakan layanan Internet publik. Koneksi WAN dan BNN (segmen *Internet Edge*) oleh *provider* terhubung ke Internet, menyediakan komunikasi antara pihak eksternal, Instansi Vertikal yang ada di BNN, penyedia layanan (*provider*) dan BNN.

Sedangkan fungsi utama jaringan, yaitu menyediakan aliran data untuk layanan aplikasi disusun dari :

- 1) Pada internal BNN, Data Center menjadi pusat penyedia layanan yang berupa data dan aplikasi bagi BNN melalui LAN dan WAN dengan Instansi Vertikal yang ada di BNN, dan *remote user*. Sehingga untuk *user* BNN secara luas akan ada aliran data :
 - a) antara *user* internal (LAN) dengan Data Center.
 - b) aliran data antara Instansi Vertikal yang ada di BNN dan *remote user* dengan Data Center.
- 2) Data Center ini memiliki *backup* pada DRC yang berupa layanan *provider* di luar BNN. Contoh aliran data pada bagian ini berupa *backup* periodik terdapat antara DC dan DRC.
- 3) Aliran data dan layanan aplikasi antara pihak eksternal dan BNN, terhubung pada segmen *Internet Server* dan *Extranet Server*. Kedua segmen layanan eksternal ini dapat di *hosting* pada Data Center dengan isolasi yang memadai.

Dengan diagram, maka desain di atas dapat dimodelkan pada gambar berikut.



Gambar 8. Model Jaringan BNN Global dan BNN

Segmen-segmen disimbolkan menggunakan persegi panjang. Fungsi segmen dimodelkan menjadi dua persegi panjang yang merupakan model modularitas. Modularitas ini bertujuan untuk:

- 1) Fungsi redundansi, menyediakan *backup* layanan
- 2) Fungsi skalabilitas, menyediakan kemudahan untuk menambah atau mengurangi segmen tambahan tanpa mengubah fungsi utamanya

Arsitektur LAN Internal saat ini sudah memiliki kelengkapan segmentasi dengan modularitas di bawah ini :

- 1) *Core Layer* : merupakan segmen inti penghubung antara koneksi Internet dan WAN, koneksi ke Data Center, dan LAN Internal. *Core Layer* ini merupakan segmen kritis karena merupakan segmen inti penghubung aliran data.

- 2) *Distribution Layer* : merupakan segmen pemisah *traffic* antara *end user (Access Layer)* dan *Core Layer*. Segmen ini memamanajemeni akses end user, ke Internet, ke WAN (kantorcabang) dan ke Data Center.
- 3) *Access Layer* : segmen khusus end user internal BNN yang dibagi menjadi beberapa VLAN. VLAN ini menunjukkan pembagian LAN berdasarkan fungsi departemen/lantai pada BNN.

Aliran data terdapat pada LAN ini dengan Data Center, antara LAN dengan Instansi Vertikal yang ada di BNN, BNN dengan Data Center.

Sedangkan Arsitektur Data Center pada BNN memiliki pembagian sebagai berikut:

- 1) *Aggregation Layer* : merupakan segmen bagi perangkat yang menyediakan layanan pada semua server aplikasi dan data pada Data Center.
- 2) *Access Layer* : merupakan segmen menyediakan konektivitas *Layer 2 (switching)* bagi server aplikasi dan data. Fungsi *Access Layer* pada Data Center berbeda dengan fungsi *Access Layer* pada modularitas LAN. *Access Layer* pada Data Center ini dibagi menjadi bagian sesuai dengan arsitektur aplikasi. Jika misalnya arsitektur aplikasi berupa *three tier*, maka akan menjadi tiga, yaitu :
 - a) *Front End Layer* : berfungsi menyediakan layanan *front-end*
 - b) *Application Layer* : berfungsi menyediakan lapisan *business logic*
 - c) *Back End Layer* : berfungsi menyediakan sistem *database*
- 3) Jika data disimpan pada sistem khusus, biasanya terdapat *Storage Layer* yang terhubung pada sistem *database*.

Aplikasi yang menggunakan data pada sistem *database* membentuk layanan dan aliran data ke LAN. Aliran data antara Data Center dan Instansi Vertikal yang ada di BNN melalui WAN. Sedangkan aliran data berupa *backup* data dan aplikasi terdapat antara Data Center dan DRC.

Pada segmentasi WAN (*Wide Area Network*) BNN secara nasional berfungsi menyediakan konektivitas antara :

- 1) LAN dan DC pada BNN dengan Instansi Vertikal yang ada di BNN
- 2) Antara BNN-Instansi Vertikal yang ada di BNN
- 3) DC dan DRC, koneksi ini dapat berupa VPN jika menggunakan koneksi langsung antar ISP (Penyedia Jasa Internet) dan DRC *Provider*

Untuk akses ke DC bagi *user* yang berpindah-pindah, disediakan segmen *Remote Access*. Segmen ini berguna untuk penyediaan layanan akses VPN dan autentikasi bagi *user* yang bergerak/*mobile user*.

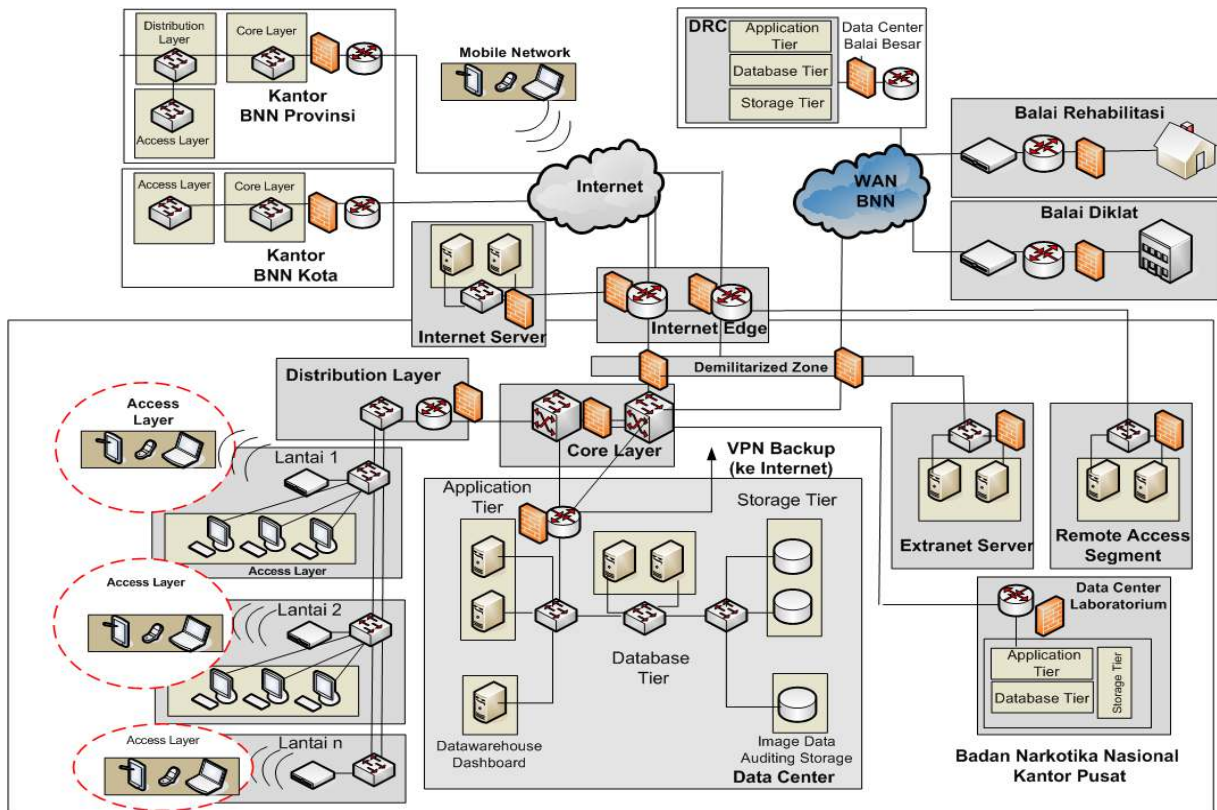
Layanan LAN BNN menuju WAN nasional ini menggunakan dua ISP sebagai redundansi dengan manajemen aliran data dan akses pada segmen *Internet Edge*, yang berupa DMZ.

Pada segmentasi untuk layanan pihak eksternal BNN:

- 1) *Internet Server Farm* : subnet untuk server layanan Internet, misalnya web server, DNS server, mail server.
- 2) *Extranet Server Farm* : subnet untuk server layanan pihak eksternal yang berhubungan langsung dengan aktivitas organisasi, misalnya server layanan pengadaan *online* untuk *partner* atau pemasok.

Aliran data terdapat antara publik dan *partner* dengan server di atas. Selain itu terdapat koneksi dari segmen tersebut, salah satunya untuk fungsi administrasi server dari LAN.

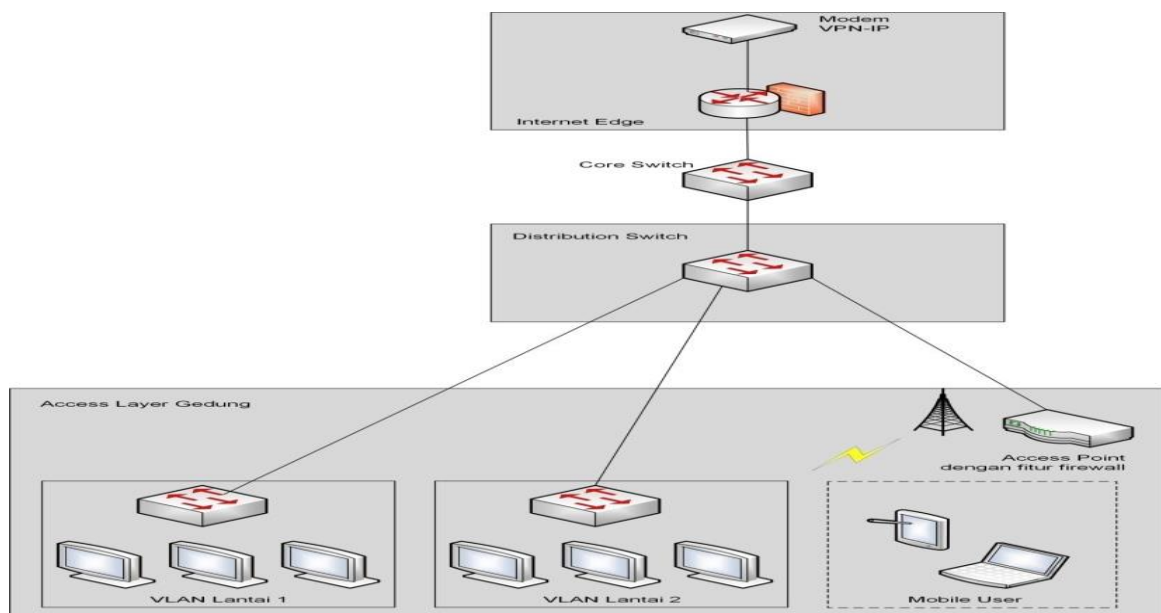
Apabila dirincikan maka model arsitektur jaringan BNN terdapat pada gambar berikut:



Gambar 9. Model Arsitektur Jaringan BNN

b. Jaringan BNNP atau BNNK

Koneksi BNNP atau BNNK ke BNN menggunakan internet sesuai dengan model rincian jaringan BNN global. Sedangkan untuk arsitektur jaringan komunikasi di BNNP atau BNNK direkomendasikan sebagai berikut:



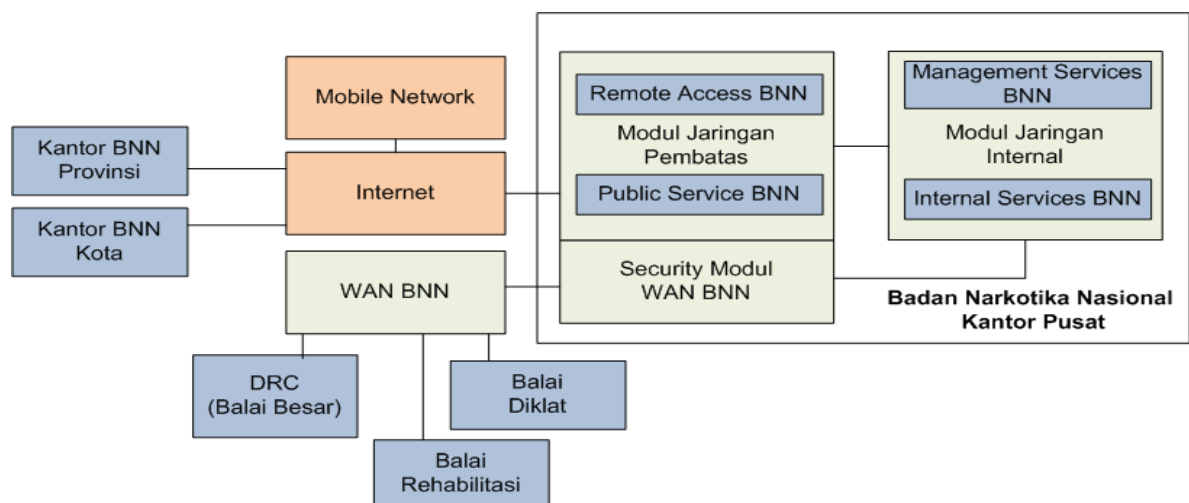
Gambar 10. Arsitektur Jaringan Komunikasi di BNNP atau BNNK

Komponen jaringan pada BNNP atau BNNK antara lain WAN/Internet dengan VPN-IP, *Internet Edge*, *Core Layer*, *Distribution Layer* dan *Access Layer*. Konektivitas dan aliran data dibentuk atas LAN, WAN dan Internet Provider. Model tersebut memberikan dasar modularitas jaringan.

Pada saat ini, layanan koneksi dan aliran data bersifat mendukung proses bisnis, dan bukan merupakan proses bisnis inti. Sehingga belum membutuhkan rancangan *backup* untuk kebutuhan kritis. Sedangkan keamanan aliran data didukung dengan menggunakan layanan VPN IP pada tiap koneksi, untuk kebutuhan-kebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan. Misalnya jika ke depan akan diimplementasikan *teleconference* antara BNN dengan BNNP.

B. Arsitektur Keamanan Jaringan

Sistem keamanan memiliki arsitektur yang dimodelkan menggunakan modul-modul untuk skalabilitas dan fleksibilitas implementasi dan pengembangan jaringan. Pada intinya, model arsitektur ini memberikan jaringan yang berfungsi sebagai pembatas, *screening*, dan *filtering*, seperti yang ditawarkan oleh DMZ (*Demilitarized Zone*). Jaringan pembatas ini merupakan node-node transisi akses jaringan eksternal dan jaringan internal BNN. Jaringan eksternal, berupa *on-demand connection*, direpresentasikan dengan *Remote Access Network* yang implementasinya berupa *phone system* atau jaringan seluler.

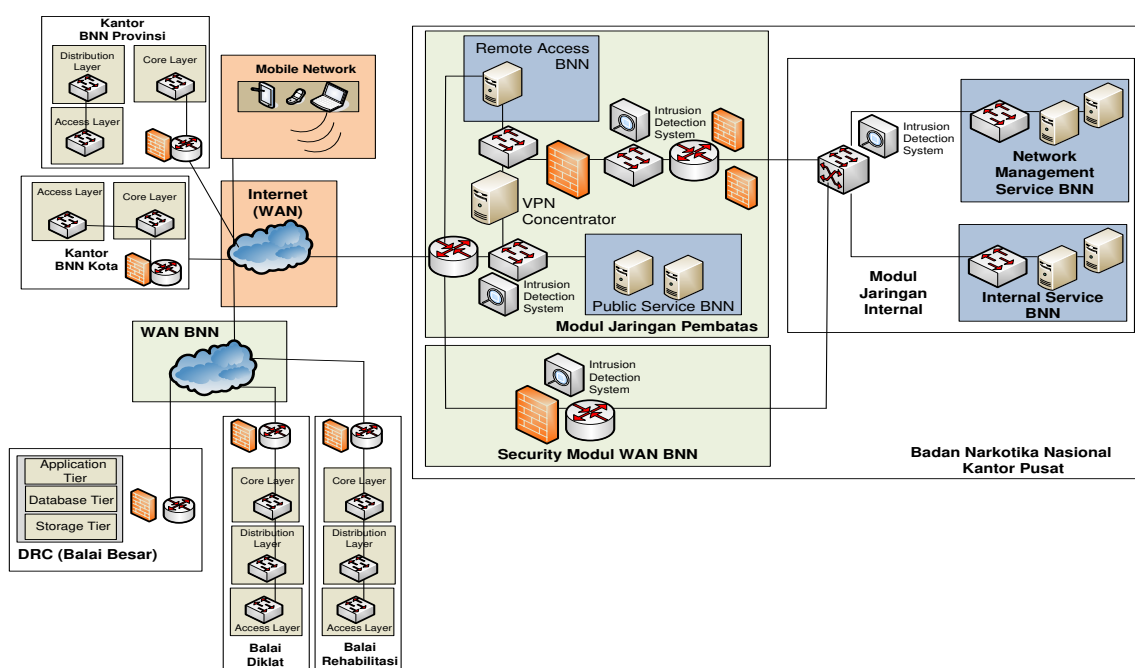


Gambar 11. Model Arsitektur Keamanan Jaringan

Untuk *dedicated connection*, digunakan koneksi ke ISP (*Internet Service Provider*) untuk memberikan layanan yang boleh diakses oleh masyarakat. Layanan akses yang menggunakan *dedicated connection* ini disebut *Public Service Access*, dapat berupa subnet yang berisi server-server Internet. Layanan yang terdapat pada subnet ini biasanya adalah *web server*, *ftp server*, *mail server*, *DNS server*, dan *proxy server*.

Sedangkan jaringan internal BNN direpresentasikan dengan modul jaringan yang terdiri atas *management system* dan *internal services* BNN. *Internal services* ini dapat berupa Intranet BNN dengan sambungan ke VLAN. Dari *multilayer switch*, koneksi dapat dihubungkan dengan *multilayer switch* yang berada pada subnet *Network Operation Center*.

Dengan demikian, pada model arsitektur keamanan ini, setiap trafik data yang melintasi jaringan pembatas baik dari jaringan internal ataupun eksternal akan dapat dimonitor dan diperiksa dahulu. Untuk koneksi internal BNN, koneksi antar BNN Provinsi, atau dari BNN ke BNN Provinsi dan sebaliknya, direpresentasikan dengan modul WAN (*Wide Area Network*) BNN. WAN ini terpisah secara logik dari jaringan eksternal.



Gambar 12. Model Arsitektur Keamanan Jaringan

Fokus pada model arsitektur keamanan ini berada pada jaringan pembatas yang memungkinkan untuk melakukan monitoring akses dan pemeriksaan koneksi. Terdapat subnet untuk menangani *on-demand* dan individual koneksi, yang terdiri atas *Remote Access Server* dan *VPN Concentrator*. *VPN Concentrator* melayani sistem autentikasi dan layanan enkripsi dari *dial-on-demand connection* yang menggunakan *mobile phone system* atau koneksi yang menggunakan Internet. Subnet *Public Service* dapat terpisah secara fungsional menggunakan VLAN dengan dukungan sistem pendeteksi penyusupan (*Intrusion Detection System*). Subnet-subnet dapat dipisahkan secara fisik pada lokasi ruangan yang berbeda-beda.

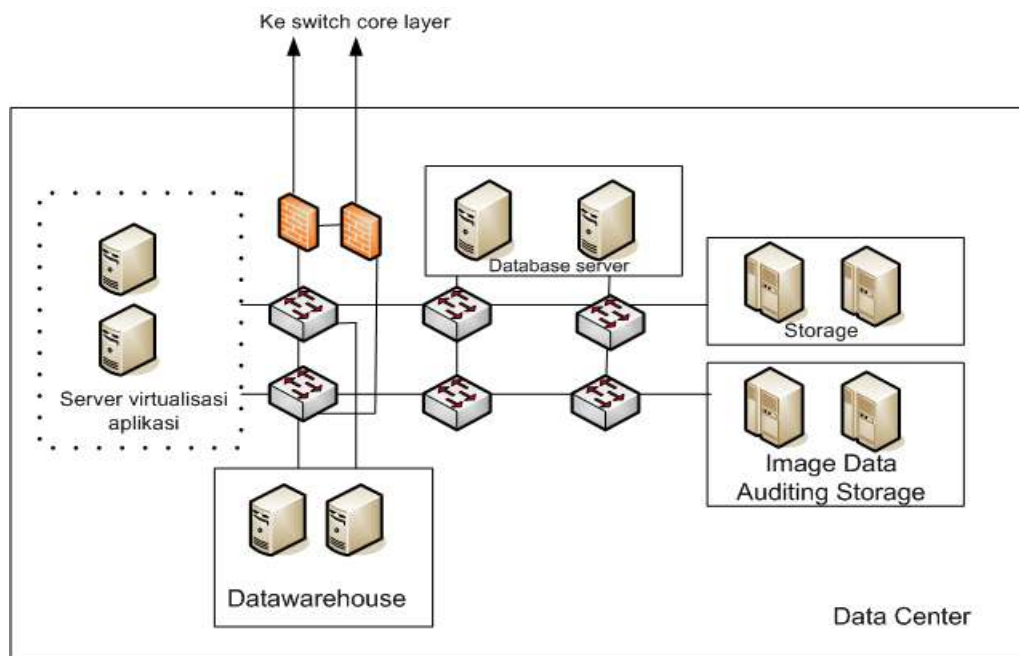
Firewall utama berupa *hardware* dan *software* kelas *high-end* dengan kemampuan pemroses yang tinggi. Subnet-subnet dibagi secara fisik untuk mendukung NIDS (*Network Intrusion Detection System*). NIDS ini dilengkapi dengan sistem monitoring, *early warning system*, dan mendukung implementasi *logging*. Pada server yang berada pada *Public Service*, dapat digunakan HIDS (*Host Intrusion Detection System*).

Router dapat berupa *router* yang dilengkapi dengan fitur *firewall software*. Kelas *router* disesuaikan dengan kapasitas koneksi maksimum jaringan untuk mencegah kongesti dan saturasi jaringan. *Router* ini berada pada titik-titik terluar dari jaringan pembatas dan merupakan node awal untuk melakukan *traffic screening* dan *filtering* yang masuk dan keluar jaringan pembatas. Sesuai dengan *policy* keamanan jaringan, paket-paket data dapat di-filter, di-*screening*, atau diubah. Sedangkan *traffic* yang berupa koneksi akses jaringan dapat dibelokkan, ditolak, atau diteruskan. Paket-paket yang ditolak dapat di-*logging* untuk keperluan dokumentasi.

Beberapa server dapat berfungsi untuk pengamanan akses, misalnya *proxy server* untuk *content-filtering*, atau *content-based intrusion detection system*. Untuk efisiensi, misalnya antivirus *updating*, klien-klien yang menggunakan *workstation* cukup melakukan koneksi ke arah *proxy server* yang melakukan *downloading* dan *updating* antivirus secara kontinu.

C. Arsitektur Data Center atau *Disaster Recovery Center*

Model arsitektur Data Center BNN memiliki bagian segmen server aplikasi yang tervirtualisasi, segmen server ini juga disebut *segmen front-end*. Kemudian segmen ini juga dapat berfungsi sebagai *server backend*, yang menangani proses bisnis aplikasi. Sebagai segmen data, terdapat dua bagian, yaitu segmen *database engine*, dan segmen penyimpanan data. Model desain ini terdapat pada gambar berikut. Terdapat dua segmen tambahan, yaitu segmen untuk *datawarehouse* atau *business intelligence*, dan server penyimpanan *backup data auditing*.



Gambar 13. Model Arsitektur Keamanan Jaringan

Semua segmen tersebut saling terhubung ke *switch* data center. Dan sebagai layanan, terhubung ke *switch Core Layer*.

Di luar segmen data center ini, terdapat data center laboratorium yang terpisah secara fisik dan logis dari segmen data center ini. Data center laboratorium juga terhubung pada *switch Core Layer*.

D. Arsitektur Fasilitas Fisik

Arsitektur fasilitas fisik data center menggunakan referensi TIA 942. Tingkatan fasilitas fisik pada TIA 942 sebagai berikut.

Parameter	Tier 1	Tier 2	Tier 3	Tier 4
Tingkat ketersediaan	99.671%	99.741%	99.982%	99.995%
Sifat terhadap gangguan	Rentan	Agak Rentan	Tidak rentan terhadap gangguan terencana (karena sudah ada skenario penanggulangan), namun masih rentan terhadap gangguan tidak terencana	Tidak rentan
Keadaan power dan cooling distribution	<i>Single path with no redundancy</i>	<i>Single path with redundant component (N+1)</i>	<i>Multiple power and cooling distribution path</i> tetapi hanya satu <i>path</i> yang aktif, termasuk yang redundant (N+1)	<i>Multiple active power and cooling distribution path</i> termasuk komponen yang redundant 2(N+1)
Ketersediaan raised floor, UPS, generator	Bisa ada, bisa tidak	Harus memiliki <i>raised floor</i> , <i>UPS</i> dan <i>generator</i>	Harus memiliki <i>raised floor</i> , <i>UPS</i> dan <i>generator</i>	Harus memiliki <i>raised floor</i> , <i>UPS</i> dan <i>generator</i>
Downtime tahunan	28.8 jam	22.0 jam	1.6 jam	0.4 jam
Cara untuk melakukan maintenance	Harus di <i>shutdown</i> keseluruhan	Hanya untuk <i>power path</i>	Memiliki kapasitas tambahan dan	Memiliki kapasitas tambahan

Parameter	Tier 1	Tier 2	Tier 3	Tier 4
preventif		dan beberapa bagian lain dari infrastruktur yang memerlukan proses <i>shutdown</i>	distribusi yang cukup untuk menampung beban yang dimiliki sistem utama ketika sistem tersebut di <i>maintenance</i>	dan distribusi yang cukup untuk menampung beban yang dimiliki sistem utama ketika sistem tersebut di <i>maintenance</i>
Skala data center yang cocok dibangun	Kecil	Sedang	Besar (skala <i>enterprise</i>)	Besar (skala <i>enterprise</i>)

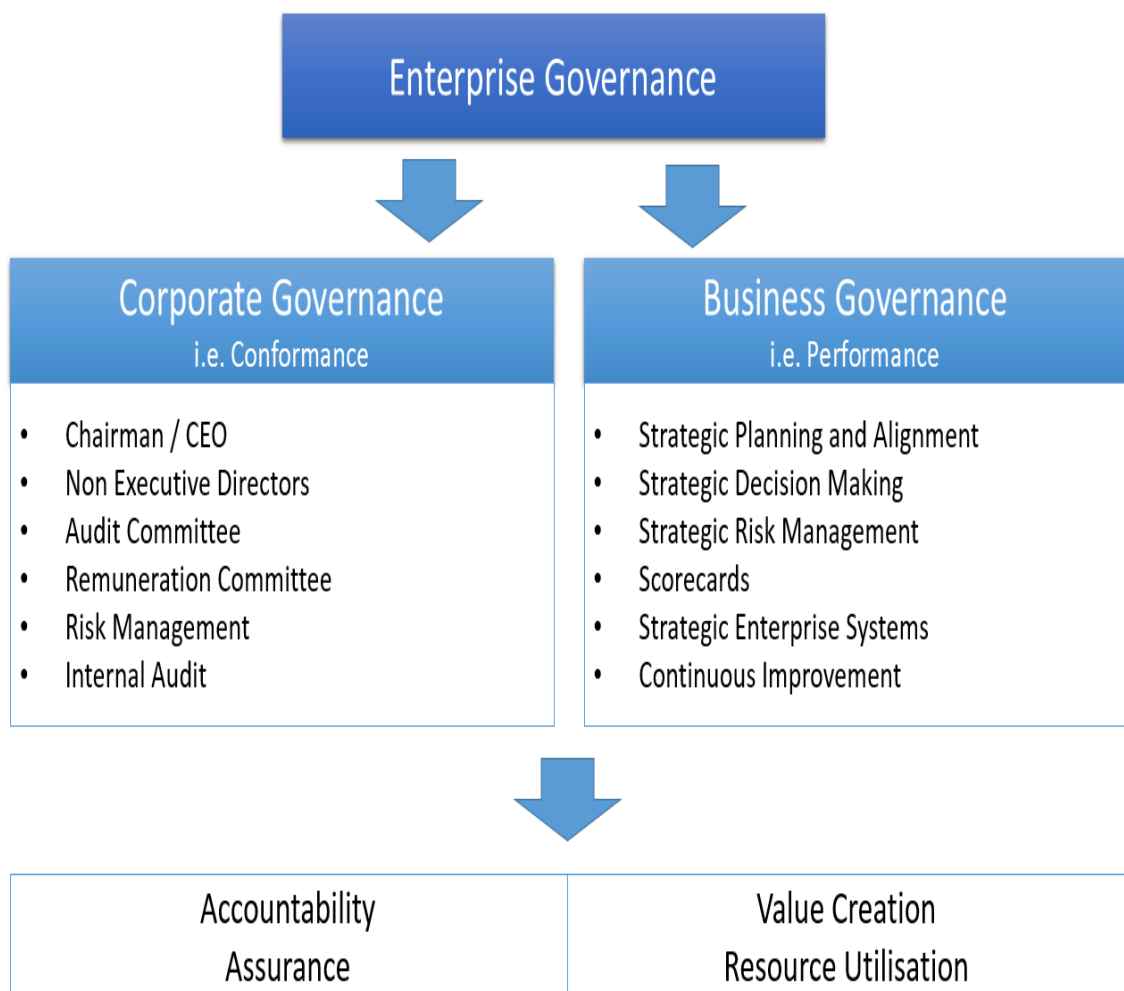
Jika fasilitas DC atau DRC dikembangkan secara mandiri oleh BNN, maka direkomendasikan minimal memenuhi Tier 2. Sedangkan jika menggunakan jasa pihak ketiga, direkomendasikan minimal memenuhi Tier 3.

BAB VI
DESAIN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

A. *Framework* Tata Kelola Teknologi Informasi

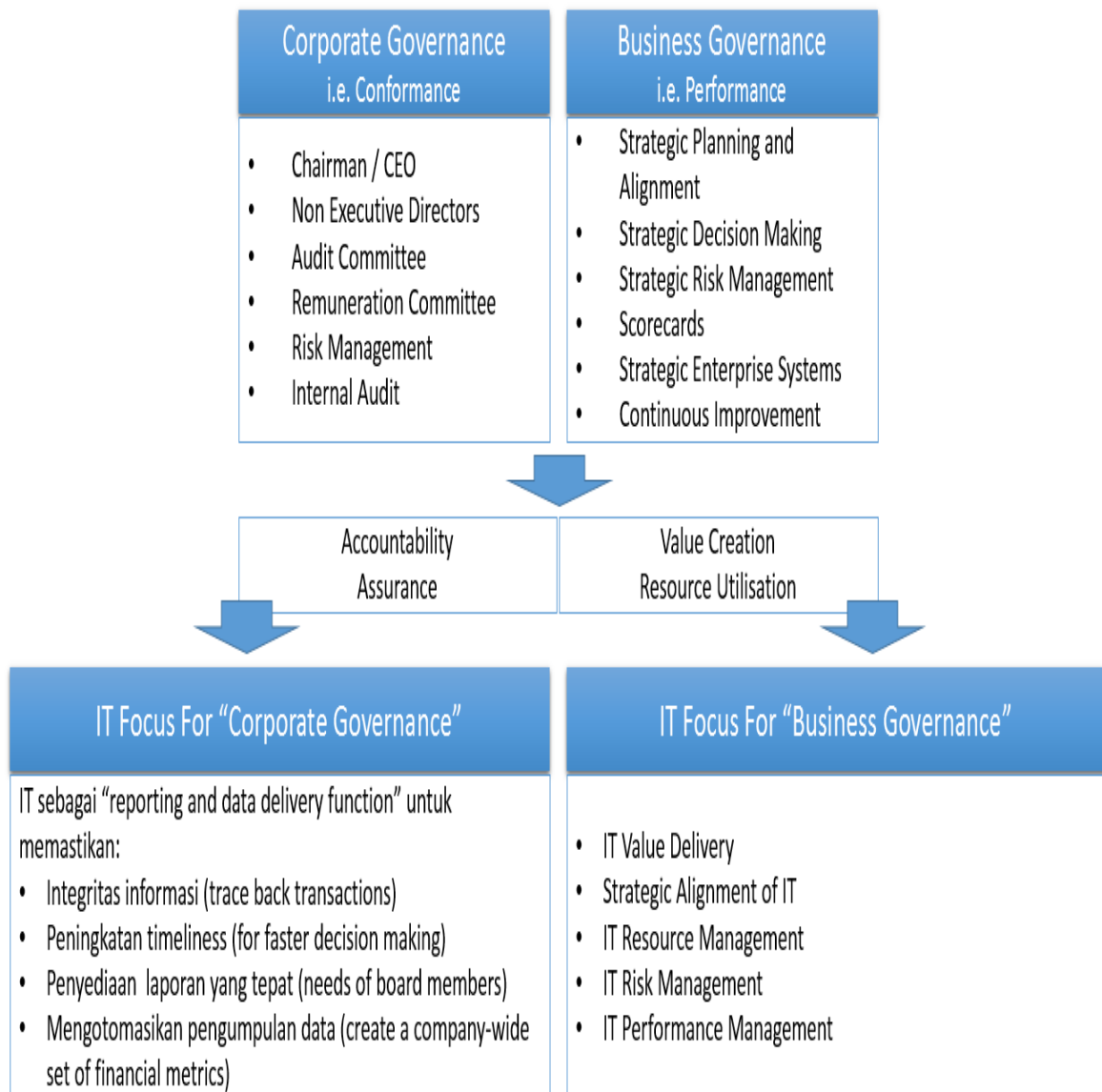
Enterprise Governance: “A set of responsibilities and practices exercised by the board and executive management with the goal of providing strategic direction, ensuring that objectives are achieved, ascertaining that risks are managed appropriately and verifying that resource are used responsibly” (ISACA)

Secara garis besar, *Enterprise Governance* memiliki 2 domain utama: *Corporate Governance* dan *Business Governance*. Keberadaan TI harus dapat menjawab kebutuhan dari masing-masing kelompok tersebut. Fokus pada masing-masing domain berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang berbeda pula.

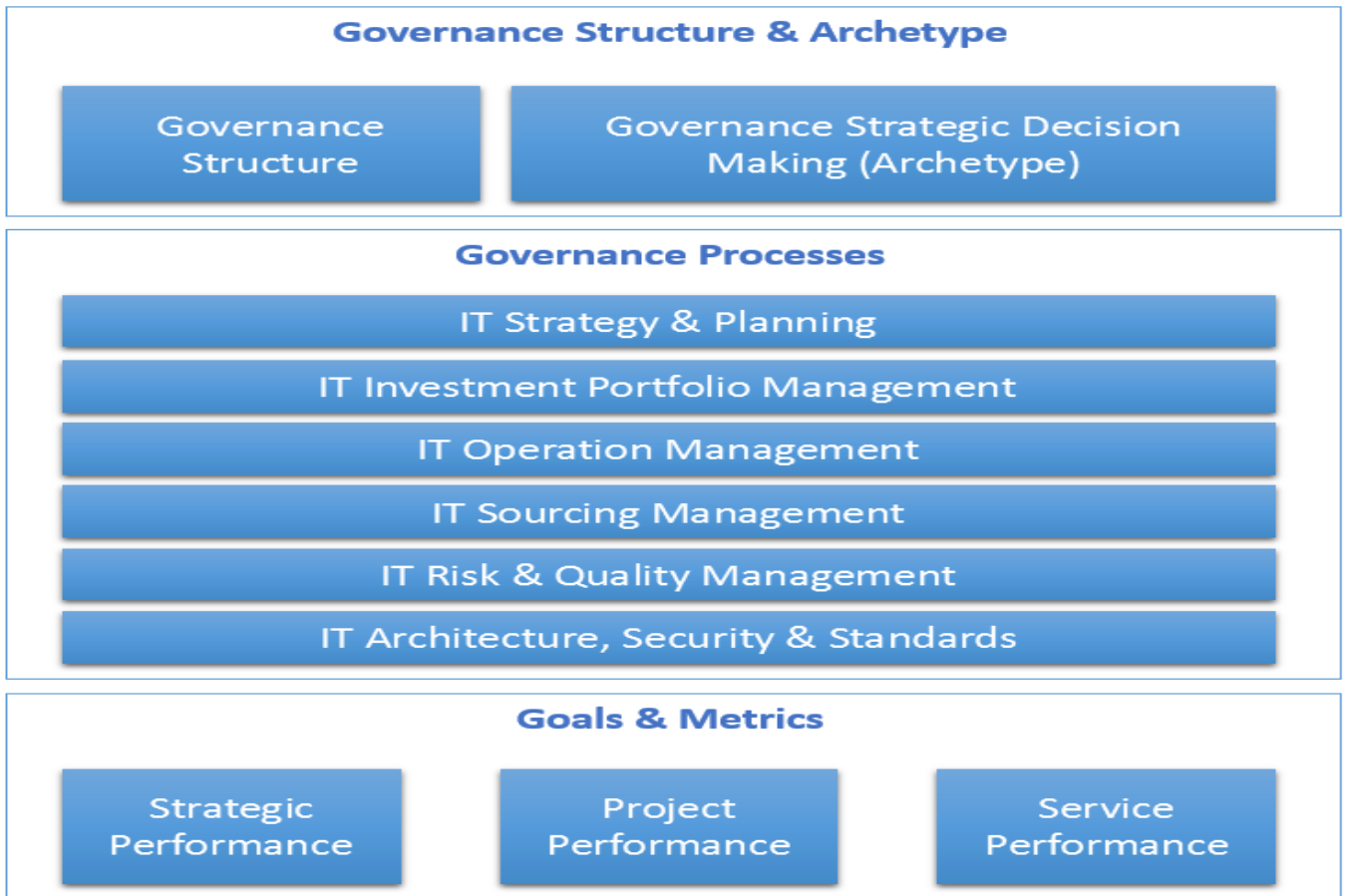


Sumber: IFAC (2003)

Tata Kelola TI difokuskan pada domain *Business Governance*. Sedangkan pada domain *Corporate Governance*, fokusnya adalah Tata Kelola Data (*Data Governance*).



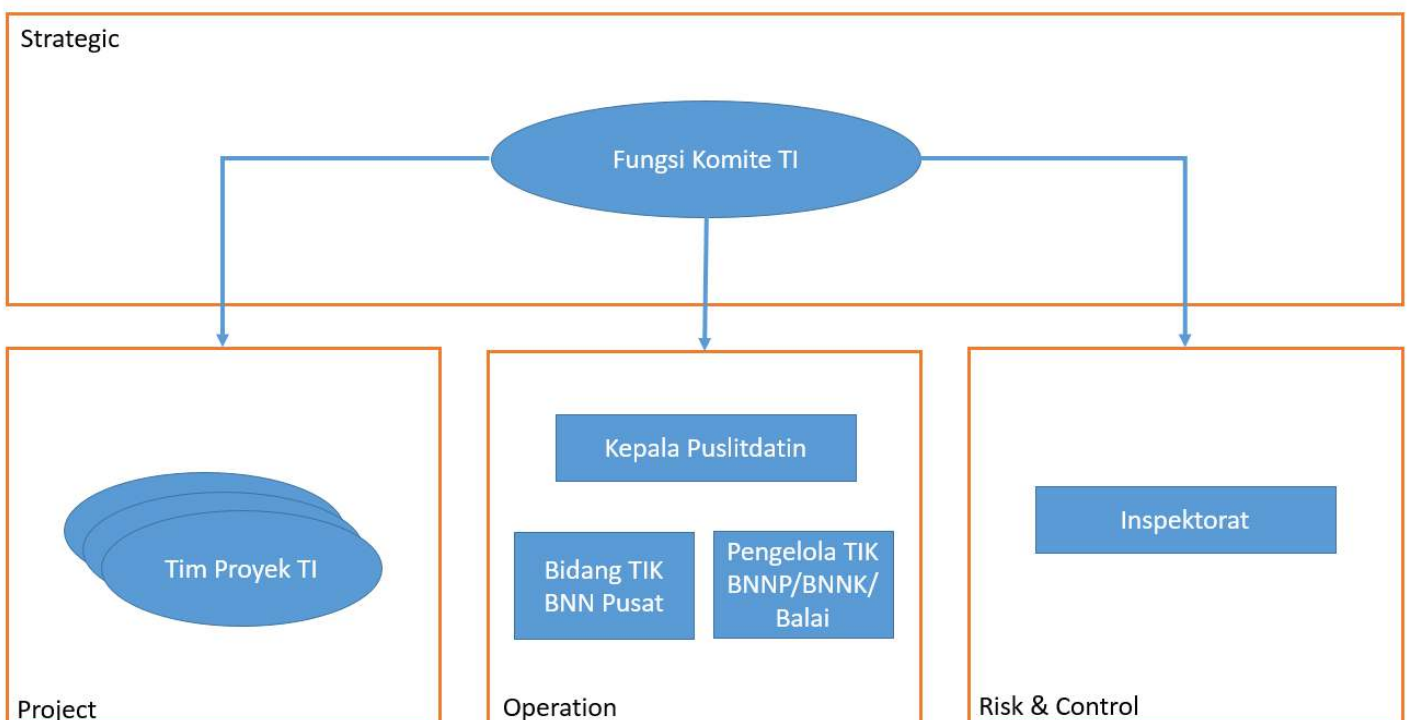
Framework dalam ISO 38500 ini memberikan gambaran tentang komponen-komponen utama yang diimplementasikan untuk merealisasikan Tata Kelola TI Organisasi. Komponen-komponen utama tata kelola TI adalah struktur, proses, dan metrik.



B. Struktur Tata Kelola TI

1. Struktur Umum Tata Kelola

Struktur Tata Kelola TI sekurang-kurangnya harus memenuhi beberapa aspek, yakni: kebutuhan pengambilan keputusan pada level strategis, pengelolaan harian kegiatan TI, pengelolaan proyek TI, dan pengelolaan risiko-kontrol yang terkait dengan



implementasi TI.

No	Kategori Fungsi	Deskripsi	Pelaksana Fungsi
1	Strategi (<i>Strategic</i>)	Fokus Kategori Fungsi ini adalah memastikan keterkaitan dan keselarasan antara TI dengan strategi pencapaian visi dan misi Badan Narkotika Nasional. Kategori Fungsi ini menghasilkan keputusan-keputusan strategis terkait investasi TI beserta anggaran yang dibutuhkan.	Komite Teknologi Informasi
2	Pengembangan & Proyek (<i>Project</i>)	Fokus Kategori Fungsi ini adalah mengelola dan mengimplementasikan proyek-proyek TI Badan Narkotika Nasional agar sesuai dengan keputusan dan arahan dari Kategori Fungsi Strategi.	Tim Proyek Teknologi Informasi
3	Operasional (<i>Operation</i>)	Fokus Kategori Fungsi ini adalah mengelola operasional dan pemeliharaan layanan TI di lingkungan Badan Nasional Narkotika.	1) Organisasi Pengelola TI di BNN dan BNNP/BNNK/Balai 2) Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis
4	Pengendalian (<i>Risk & Control</i>)	Fokus Kategori Fungsi ini adalah mengelola risiko dan kontrol yang terkait dengan implementasi TI	Inspektorat

No	Kategori Fungsi	Deskripsi	Pelaksana Fungsi
		Badan Nasional Narkotika.	

2. Komite TI

Tujuan, tugas pokok dan fungsi Komite TI sebagai berikut:

KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL	
Tujuan	Komite TI dibentuk untuk membantu Kepala Badan dalam pengelolaan dan pengawasan berbagai hal yang berhubungan dengan Teknologi Informasi Badan Narkotika Nasional
Tugas Pokok	<p>Komite TI memiliki tugas pokok sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan peninjauan dan memberikan persetujuan atas Rencana-Rencana TI sebelum ditetapkan oleh Kepala Badan, mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Master Plan TI (dan pemutakhirannya secara reguler sesuai kebutuhan) b. Rencana TI Tahunan yang akan dituangkan dalam RKAP (merujuk kepada kebutuhan masing-masing unit kerja) c. Rencana-rencana lain di luar RKAP TI yang bersifat mendesak (mempertimbangkan kebutuhan organisasi terkini) 2. Menetapkan kebijakan dan SOP terkait Tata Kelola TI dan Tata Kelola Data Badan Narkotika Nasional. 3. Melakukan pengawasan dan evaluasi keberlangsungan proyek-proyek TI bersifat strategis yang memiliki pengaruh kritikal terhadap Badan Narkotika Nasional. 4. Melakukan pemantauan ketercapaian KPI (Key Performance Indicators) penyelenggaraan Tata Kelola TI dan Tata Kelola Data, baik yang menjadi tanggung jawab Pengelola TI maupun unit kerja.

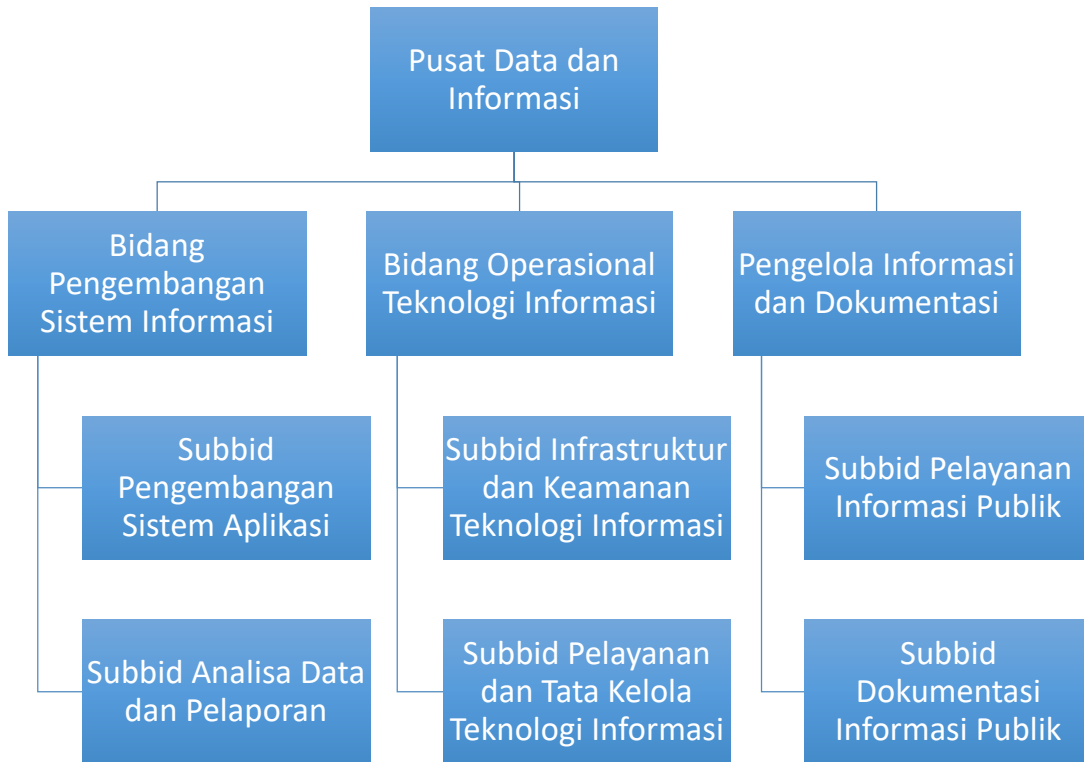
KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL	
	5. Memberikan arahan perbaikan lebih lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi proyek TI yang bersifat strategis dan pencapaian KPI (Key Performance Indicators) Tata Kelola TI dan Tata Kelola Data.
Fungsi	Komite TI menjalankan fungsi Strategis dalam Tata Kelola TI, yakni memastikan kesesuaian antara implementasi TI dengan strategi pencapaian visi dan misi Badan Narkotika Nasional, serta menghasilkan keputusan-keputusan strategis terkait anggaran yang dibutuhkan.
Keanggotaan	Fungsi Komite TI dijalankan oleh Rapim Deputi/Direktur/Kapus.
Rapat	<ul style="list-style-type: none">• Komite mengadakan rapat setidaknya satu kali dalam 3 (tiga) bulan.• Komite harus melaporkan temuan, rekomendasi, dan resume setiap rapat kepada Kepala Badan.

3. Struktur Organisasi TI BNN

Analisis dan desain Organisasi TI Badan Narkotika Nasional didasarkan pada beberapa prinsip, sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya kelengkapan fungsional dalam Organisasi TI agar organisasi dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.
- b. Terpenuhinya prinsip pemisahan tugas dan tanggung jawab (*segregation of duties*) yang diterapkan untuk mendapatkan kinerja yang optimal, menghindari kemungkinan bertumpuknya tanggung jawab fungsi kritis pada personel tertentu, serta mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan pengelolaan aset TI.

- c. Terpenuhinya perangkat koordinasi lintas unit kerja sedemikian hingga proses-proses tata kelola TI dapat dilaksanakan secara



- d. efektif dan efisien.

Fungsi	Deskripsi Tugas
Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengarahan, pengoordinasian, dan pengawasan atas pelaksanaan fungsi IT <i>Management</i> terkait proses-proses yang menjadi lingkup Bidang Pengembangan Sistem Informasi.
Sub Bidang Pengembangan Sistem Aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan Badan Narkotika Nasional terhadap Sistem Aplikasi. Menyusun desain dan spesifikasi kebutuhan Badan Narkotika Nasional terkait Sistem Aplikasi bersama dengan unit kerja terkait. Melakukan evaluasi terhadap penawaran solusi dari pihak ketiga penyedia Sistem Aplikasi bersama-sama dengan unit kerja terkait.

Fungsi	Deskripsi Tugas
	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan <i>quality assurance</i> pengembangan Sistem Aplikasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. • Atas eskalasi dari Sub Bidang Pelayanan dan Tata Kelola TI, memberikan dukungan teknis pada Sistem Aplikasi yang telah dioperasikan. • Melakukan training Sistem Aplikasi pada pengguna. • Melakukan kajian terhadap tren teknologi terkait aplikasi dan <i>database</i> untuk peningkatan kinerja dan optimasi layanan TI Badan Narkotika Nasional secara efisien.
Sub Bidang Analisa Data dan Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengembangan <i>datawarehouse – business intelligence</i> atau layanan pengambilan keputusan lainnya. • Melakukan pemeliharaan <i>datawarehouse – business intelligence</i> atau layanan pengambilan keputusan lainnya. • Melakukan analisis data yang diperlukan oleh Badan Narkotika Nasional. • Melakukan penyusunan pelaporan yang diperlukan oleh Badan Narkotika Nasional.
Kepala Bidang Operasional Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengarahan, pengoordinasian, dan pengawasan atas pelaksanaan fungsi IT <i>Management</i> terkait proses-proses yang menjadi lingkup Bidang Operasional Teknologi Informasi
Sub Bidang Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana pengembangan infrastruktur yang selaras dengan pengembangan sistem informasi. • Melakukan pemeliharaan jaringan komunikasi dan perangkat keras. • Melakukan pemeliharaan Data Center dan fasilitas pendukungnya.

Fungsi	Deskripsi Tugas
	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemeliharaan dan monitoring keamanan TI yang terkait seluruh sumber daya TI Badan Narkotika Nasional, yaitu data, aplikasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. • Membantu Sub Bidang Pelayanan dan Tata Kelola TI dalam pemenuhan permintaan, penanganan insiden dan permasalahan terkait infrastruktur dan keamanan informasi Badan Narkotika Nasional yang tidak dapat ditangani oleh Sub Bidang Pelayanan dan Tata Kelola TI. • Melakukan <i>review</i> dan mengusulkan perbaikan prosedur pengelolaan keamanan informasi kepada Sub Bidang Pelayanan dan Tata Kelola TI.
<p>Sub Bidang Pelayanan dan Tata Kelola Teknologi Informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalankan fungsi <i>single point of contact</i> bagi pengguna untuk insiden maupun permintaan layanan. • Memberikan layanan pada pengguna di <i>layer</i> pertama terkait perangkat <i>end-user</i> dan layanan TI lainnya. • Menerima menangani insiden dan permasalahan TI yang disampaikan oleh pengguna. • Melakukan eskalasi kepada Sub Bidang yang terkait ketika tidak mampu melakukan pemenuhan permintaan layanan, serta penanganan insiden dan permasalahan yang diterima dari pengguna. • Memantau, mencatat, dan mengevaluasi insiden yang dilaporkan oleh pengguna.

Fungsi	Deskripsi Tugas
	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan dukungan desktop management (instalasi, konfigurasi, dan dukungan teknis perbaikan atas permasalahan pengguna). • Menyusun, <i>me-review</i>, dan memutakhirkan serta melakukan sosialisasi program-program tata kelola TI Badan Narkotika Nasional yang berupa kebijakan, standar, dan prosedur TI. • Melakukan pemantauan dan pengelolaan tingkat kepatuhan tata kelola TI Badan Narkotika Nasional terhadap aturan-aturan yang mengikat Kementerian/Lembaga, termasuk Pemingkatan <i>e-Government</i> Indonesia.
Kepala Bidang Pengelola Informasi dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengarahan, pengoordinasian, dan pengawasan atas pelaksanaan fungsi Management terkait proses-proses yang menjadi lingkup Bidang Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
Sub Bidang Pelayanan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemantauan dan memberikan pelayanan terhadap permohonan informasi publik melalui email, website, media sosial, surat/fax, atau melalui datang langsung. • Melakukan komunikasi, klarifikasi, dan memberikan penjelasan kepada pemohon informasi. • Melakukan tugas-tugas administrasi terkait permohonan informasi. • Melakukan tugas-tugas lainnya terkait Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Fungsi	Deskripsi Tugas
Subbid Dokumentasi Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none">• Menyimpan, mengklasifikasikan, dan menyediakan informasi atau dokumen publik di bidang P4GN.• Melakukan pemutakhiran dokumentasi informasi publik.• Membuat laporan layanan informasi publik secara berkala.• Melakukan tugas-tugas administrasi terkait dokumentasi informasi publik.

4. Pengelola TI BNNP/BNNK/Balai

Struktur pengelola TI BNNP/BNNK/Balai sebagai berikut.



Tugas pokok jabatan fungsional TI di BNNP / BNNK / Balai, mencakup:

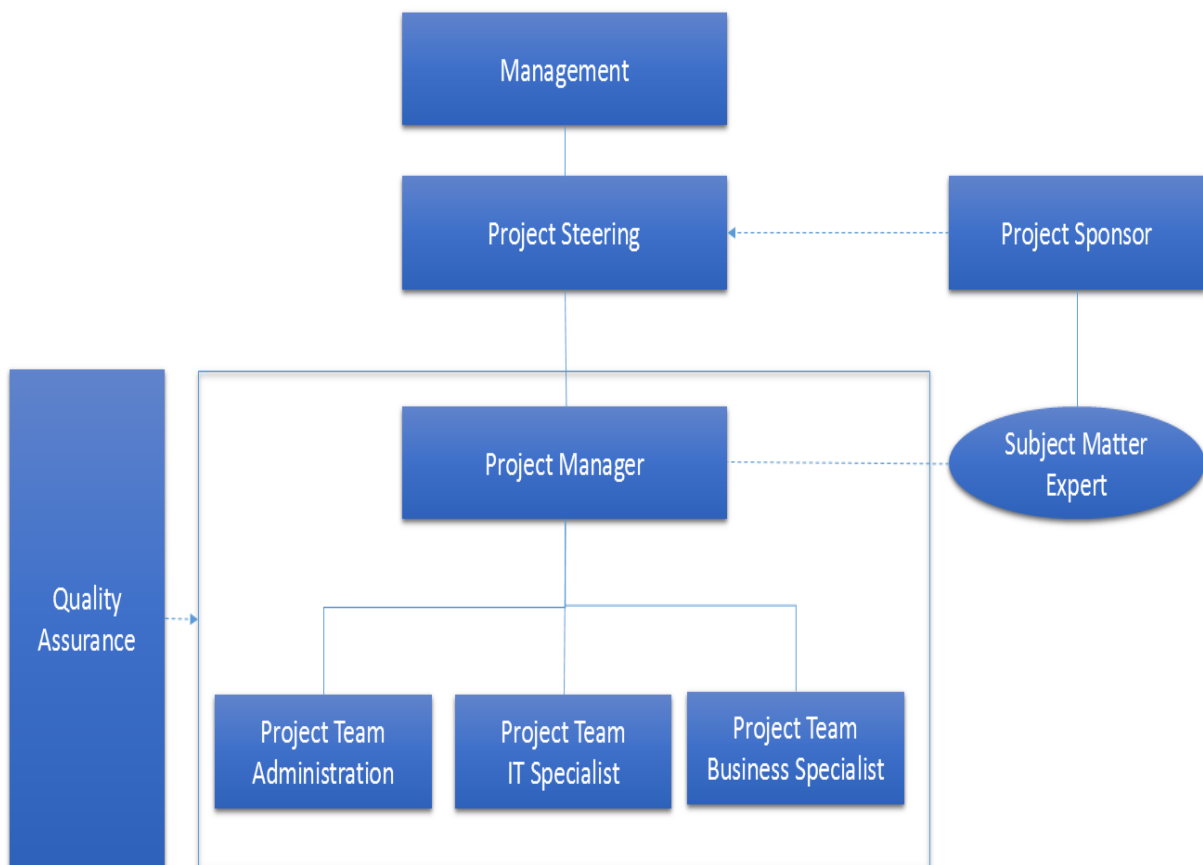
- a. Menjalankan fungsi koordinasi dan komunikasi dengan Pusat terkait pengembangan sistem informasi yang dilakukan di BNNP / BNNK / Balai.
- b. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan jaringan dan perangkat keras di BNNP / BNNK / Balai.
- c. Menjalankan fungsi single point of contact bagi pengguna di BNNP / BNNK / Balai terkait insiden maupun permintaan layanan
- d. Membantu menyelesaikan insiden pada pengguna dan jika diperlukan melakukan eskalasi ke Pusat.

- e. Memberikan layanan pada pengguna terkait perangkat end-user.
- f. Memantau, mencatat, dan mengevaluasi insiden yang dilaporkan pengguna.

5. Struktur Proyek TI

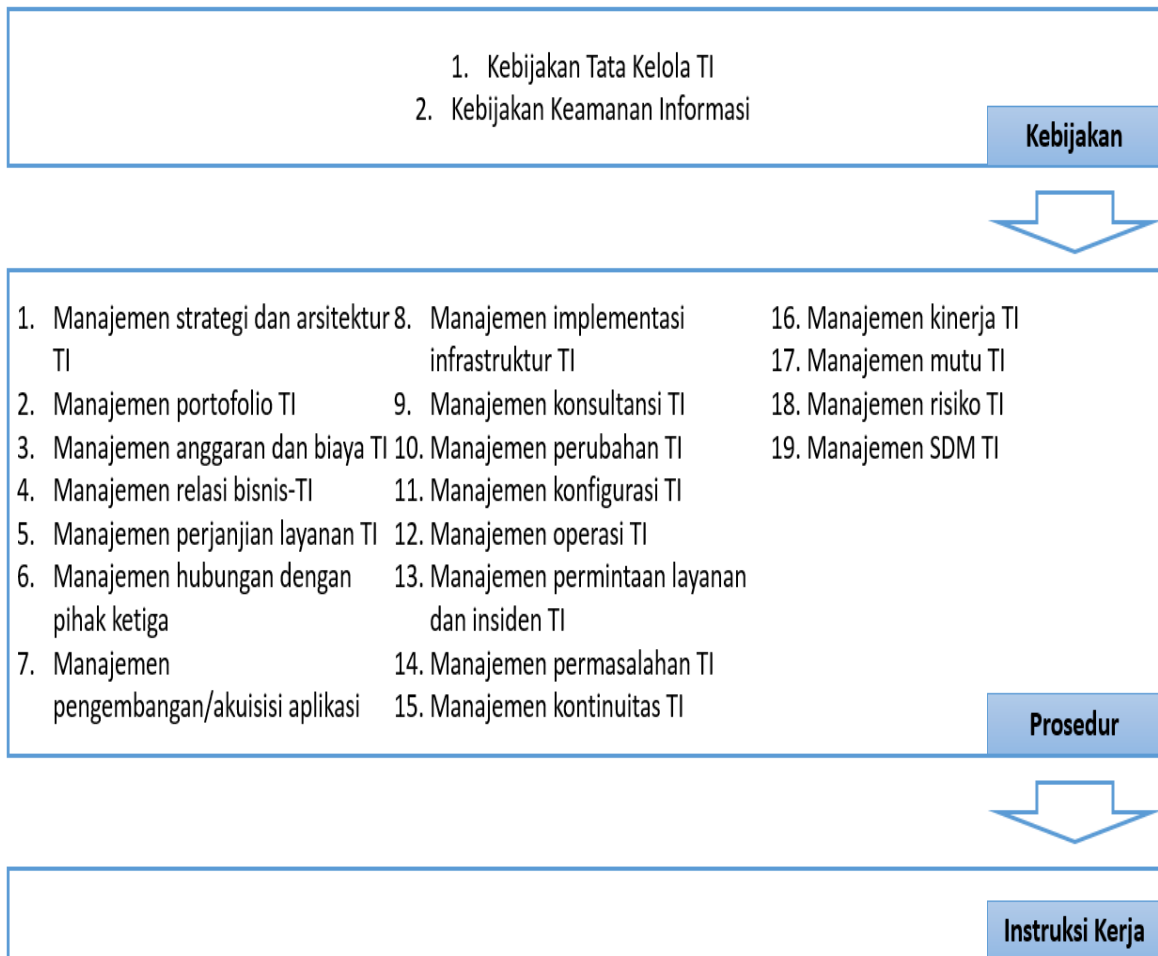
Struktur Tim Proyek akan terkait dengan jenis dan nilai strategis proyek yang dilaksanakan. Untuk proyek yang sangat terkait dengan proses bisnis akan melibatkan unit kerja secara intensif. Keterlibatan tersebut pada *project steering*, *project manager*, *project team* dan *Subject Matter Expert (SME)*. Sedangkan untuk proyek yang sangat teknis seperti proyek infrastruktur, pelaksanaan proyek tidak banyak melibatkan unit kerja lain.

Fungsi *Quality Assurance* terlibat dari awal sampai dengan akhir proyek, khususnya proyek strategis TI. Berikut ini gambaran struktur lengkap untuk proyek TI:



C. Proses Tata Kelola TI

Struktur proses Tata Kelola TI yang diusulkan sebagai berikut.



Proses Tata Kelola TI akan menjadi efektif apabila dilengkapi dengan Kebijakan, Prosedur, dan instrumen aturan lain yang ditetapkan oleh Organisasi. Standarisasi proses Tata Kelola TI sekaligus juga menjadi indikator tingkat kematangan Tata Kelola TI.

Secara umum, lingkup Kebijakan, Prosedur, dan Instruksi Kerja adalah sebagai berikut:

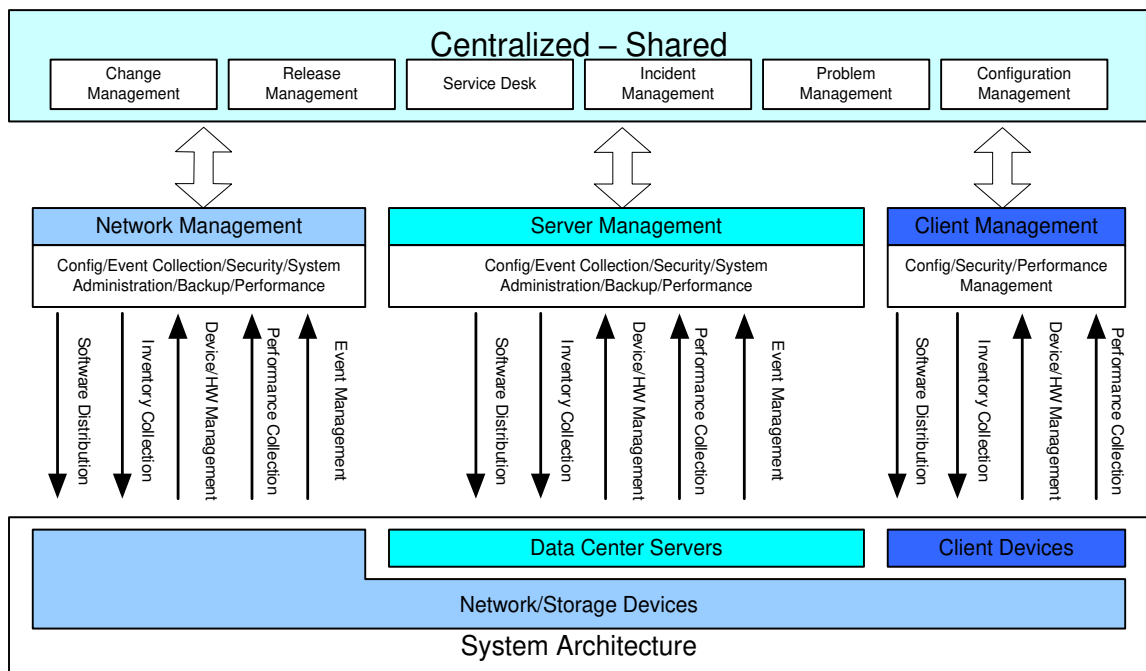
1. Kebijakan adalah pernyataan secara *high level* tentang konsep dan ekspektasi dalam Tata Kelola TI.
2. Prosedur mencakup tahap-tahap detail yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah tugas, termasuk hasil yang diharapkan dan kondisi-kondisi yang dibutuhkan untuk eksekusi prosedur.

Prosedur juga berisi tahap-tahap yang dibutuhkan jika hasil yang diharapkan tidak terjadi.

3. Instruksi Kerja berisi informasi yang akan membantu ketika mengeksekusi prosedur, dapat berupa kebergantungan, usulan atau contoh, informasi tambahan yang mungkin bermanfaat, tool yang dapat digunakan, dan lain-lain.

D. Tool Pendukung Tata Kelola TI

Tool pendukung yang berupa *Service Management* dan *Application & Infrastructure Management* diperlukan untuk mendukung keberjalanan



Tata Kelola TI.

Service Management membantu pengelolaan proses-proses Tata Kelola TI, antara lain: *Change Management*, *Release Management*, *Service Desk*, *Incident Management*, *Problem Management*, dan *Configuration Management*. Sedangkan *Application & Infrastructure Management* sebagai alat bantu dalam monitoring aplikasi dan infrastruktur TI.

Service Management dan *Application & Infrastructure Management* didesain terintegrasi sedemikian hingga membentuk lingkungan pengelolaan TI yang terotomasi.

BAB VII
ANALISIS

A. Analisis Kesenjangan Sistem Informasi

NO	SISTEM INFORMASI	SISTEM EKSISTING	PEMENUHAN	PELUANG PENGEMBANGAN
1.	Sistem Informasi Narkoba	▪ Sistem Informasi Narkoba	Medium	<ul style="list-style-type: none">▪ Modul Pencegahan: pengelolaan kegiatan dan dokumentasi pencegahan.▪ Modul Pemberdayaan Masyarakat: pengelolaan kegiatan dan dokumentasi pemberdayaan masyarakat.▪ Modul Pemberantasan: administrasi penyidikan, manajemen kasus dan monitoring evaluasi.▪ Modul Rehabilitasi: pengelolaan lembaga rehab, pengelolaan pelatihan,

NO	SISTEM INFORMASI	SISTEM EKSISTING	PEMENUHAN	PELUANG PENGEMBANGAN
				<p>pengelolaan akreditasi, monitoring lembaga rehab dna pengelolaan klaim lembaga rehabilitasi.</p>
2.	SI Pemetaan P4GN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ GIS P4GN 	Medium	<p>Pemetaan prevalensi, wilayah rawan, kelompok rentan, instansi, kelompok masyarakat, penggiat anti narkoba, lembaga rehab, klien lembaga rehab, kasus narkoba, hasil intervensi dan pemetaan NPS.</p>
3.	<i>Social Media Relationship Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Social Media</i> ▪ <i>Social Media Analytics (Free)</i> ▪ <i>Trello</i> 	Medium	<p>Manajemen konten, penjadwalan posting, <i>social media analytics</i> dan optimalisasi untuk koordinasi dengan eksternal.</p>
4.	<i>Crime Intelligence Database</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum ada aplikasi 	None	<p>Semua fitur di <i>Crime Intelligence Database</i>.</p>

NO	SISTEM INFORMASI	SISTEM EKSISTING	PEMENUHAN	PELUANG PENGEMBANGAN
5.	<i>Crime Analysis</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sudah menggunakan tool tetapi belum berlisensi 	None	Semua fitur di <i>Crime Analysis</i> .
6.	Money Laundering	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Secured Online Communication</i> (SOC) dari PPATK 	Medium	Analisis orang dan entitas bisnis.
7.	SI Interdiksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum ada aplikasi 	None	Semua fitur di Interdiksi.
8.	SI Tahanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aplikasi Tahanan ▪ Aplikasi Kunjungan Tahanan (dalam pengembangan) 	Medium	Administrasi tahanan dan monitoring tahanan dengan kemudahan penggunaan serta penggabungan antara aplikasi tahanan dengan kunjungan tahanan eksisting.
9.	SI Barang Bukti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aplikasi Barang Bukti 	Medium	Inventory Barang Bukti, monitoring Barang Bukti dan Laporan Data Barang Bukti dari BNNP dan BNNK.
10.	SI Manajemen Laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Laboratory Information System</i> 	Medium	Pendaftaran online SKBN, profiling, Pengecekan proses dan hasil

NO	SISTEM INFORMASI	SISTEM EKSISTING	PEMENUHAN	PELUANG PENGEMBANGAN
				pengujian.
11.	<i>Medical Record</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Medical Record</i> masih dikembangkan 	None	Semua fitur <i>medical record</i> .
12.	Adm. Klien	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum ada aplikasi 	None	Semua fitur Adm. Klien
13.	SI Farmasi RS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum ada aplikasi 	None	Semua fitur SI Farmasi RS.
14.	<i>E-Services</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Precursor</i> 	Medium	Layanan Penggiat Anti Narkoba, Layanan Pencegahan, Layanan Lembaga Rehab, Layanan Klien, Layanan Tes Urine, Layanan Hukum.
15.	Web Portal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Web BNN 	Medium	Portal hukum, portal kerjasama dan integrasi semua portal BNN.
16.	<i>Contact Center</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Contact Center</i> 2015 	Medium	Integrasi dengan Telpon, SMS dan social media.
17.	<i>Online Survey</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum ada aplikasi 	None	Semua fitur <i>Online Survey</i> .
18.	<i>Whistle Blowing</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum ada aplikasi 	None	Semua fitur <i>Whistle Blowing</i>

NO	SISTEM INFORMASI	SISTEM EKSISTING	PEMENUHAN	PELUANG PENGEMBANGAN
19.	SI manajemen Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monevgar 	Medium	<i>Strategic planning, planning&budgeting</i> , laporan kinerja dan integrasi dengan SIN untuk evaluasi kegiatan.
20.	<i>E-Audit</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Audit</i> 	Medium	Pengelolaan tindak lanjut dan analisis data.
21.	SI Manajemen SDM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SIMPEG 	Medium	Manajemen organisasi, analisis beban kerja, talent management, pengelolaan program pengembangan SDM termasuk pendaftaran Diklat.
22.	SI Manajemen Diklat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum ada aplikasi 	None	Semua fitur SI Manajemen Diklat.
23.	SI Manajemen Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SILABI ▪ SAS ▪ GPP ▪ SPAN Gaji 	Medium	Perjalanan dinas, manajemen kas brankas, perhitungan dan pelaporan pajak.
24.	<i>E-Procurement</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LPSE 	<i>High</i>	-
25.	<i>E-Library</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SI Manajemen Perpustakaan 	Medium	Optimalisasi OPAC system.
26.	<i>Datawarehous e-Business</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum ada aplikasi 	None	Semua fitur DW-BI.

NO	SISTEM INFORMASI	SISTEM EKSISTING	PEMENUHAN	PELUANG PENGEMBANGAN
	<i>Intelligence</i>			
27.	<i>Statistical Analysis</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SPSS 	Medium	Lisensi SPSS.
28.	<i>E-Office</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SITNDE 	Medium	Optimaliasi fitur yang sudah ada dan pengelolaan memo, laporan surat.
29.	SI Manajemen Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem Kearsipan Inaktif ▪ Sistem Kearsipan Aktif 	Medium	Digitasi, <i>seraching</i> , <i>backup</i> dokumen.
30.	<i>Situation Room</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum ada 	None	Semua fitur <i>Situation Room</i> .
31.	<i>Teleconference</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum ada 	None	Semua fitur <i>Teleconference</i> .
32.	Media Center	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum ada 	None	Semua fitur Media Center.

Pencegahan	Pemberdayaan Masyarakat	Pemberantasan	Rahabilitasi	Pelayanan	
SISTEM INFORMASI NARKOBA				E-Services	
Modul Pencegahan	Modul Pemberdayaan	Modul Pemberantasan	Modul Rehabilitasi	Layanan Pengilat	
				Layanan Lembaga Rehab	
SI Pemetaan P4GN				Layanan Klien	
Social Media Relationship Management	Crime Intelligence Database	SI Manajemen Laboratorium	Medical Record	Pengajuan Ex-Im Prekursor	
	Crime Analysis	Money Laundering	Farmasi RS	Uji Narkoba	
	SI Interdiksi	SI Tahanan	Adm. Pasien	Web Portal	
	SI Barang Bukti			Contact Center	
				Online Survey	
Planning & Governance:	SI Manajemen Perencanaan		E-Audit		
Resource Management:	SI Manajemen SDM		SI Manajemen Diklat		
	SI Manajemen Keuangan	E-Procurement	E-Library		
Analytical:	DW-BI		Stastical Analysis		
Collaboration:	E-Office	SI Manajemen Dokumen	Situation Room	Teleconference	Media Center

B. Analisis Kesenjangan Infrastruktur

NO	KOMPONEN	KONDISI EKSISTING DAN ANALISANYA	PEMENUHAN	PELUANG PENGEMBANGAN
1	Data Center	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangannya masih memiliki komponen yang tidak berhubungan dengan kebutuhan <i>data center</i>, seperti adanya tumpukan kertas. ▪ CCTV tidak berfungsi ▪ Peralatan deteksi asap belum pernah dicoba sehingga tidak diketahui apakah peralatan tersebut berfungsi atau tidak. ▪ <i>Backup</i> untuk data audit dan <i>atau warehouse</i> sebaiknya diadakan. 	Medium	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Data Center sesuai dengan standar (Contohnya TIA 942). ▪ Implementasi <i>Image Data Auditing Storage</i> menggunakan perangkat yang sudah ada; ▪ Pengadaan <i>Server Datawarehouse</i>.

NO	KOMPONEN	KONDISI EKSISTING DAN ANALISANYA	PEMENUHAN	PELUANG PENGEMBANGAN
2.	Jaringan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam melakukan komunikasi data, tidak ada jaringan WAN internal yang digunakan oleh balai-balai sehingga setiap balai mengandalkan jaringan publik yaitu koneksi internet. ▪ Pada segmen kritis, misalnya pada <i>Core Layer</i>, terdapat satu perangkat tunggal untuk melayani semua koneksi. ▪ Pada segmen server, layanan server Internet dan aplikasi layanan internal berada pada satu segmen. 	Medium	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Redudansi perangkat kritis: <i>core layer</i>; ▪ Redudansi link akses <i>layer/distribution layer</i>; ▪ Peningkatan Jaringan internal Balai Besar dan Diklat ▪ Jaringan WAN DC/DRC ▪ Pemisahan segmen server (misalnya server aplikasi internal dan server layanan Internet terpisah subnetnya).

NO	KOMPONEN	KONDISI EKSISTING DAN ANALISANYA	PEMENUHAN	PELUANG PENGEMBANGAN
3	<i>Disaster Recovery Center</i>	Berdasarkan ketersediaan layanan, BNN belum menggunakan <i>Disaster Recovery Center</i> .	Low	Terdapat <i>Disaster Recovery Center</i> sebagai fasilitas ketika terjadi <i>disaster</i> .
4	Keamanan Informasi	Belum tersedia jalur aman untuk berkomunikasi melalui email.	Low	Implementasi PGP untuk email terenkripsi.

C. Analisis Kesenjangan Tata Kelola TI

NO	KOMPONEN	KONDISI EKSISTING DAN ANALISANYA	PEMENUHAN	PELUANG PENGEMBANGAN
1	Fungsi Komite TI/Koordinasi Bisnis dan TI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum ada Komite TI. ▪ Forum adhoc dibentuk pada saat ada inisiatif lintas satker. ▪ Terdapat forum khusus untuk aplikasi SIN. 	Medium	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menetapkan suatu forum pimpinan sebagai pelaksana fungsi Komite TI
2	Struktur Organisasi Pengelola TI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang Teknologi Informasi dan 	Medium	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memenuhi

NO	KOMPONEN	KONDISI EKSISTING DAN ANALISANYA	PEMENUHAN	PELUANG PENGEMBANGAN
		<p>Komunikasi terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang, yakni: Sub Bidang Jaringan Komputer dan Sub Bidang Teknologi Informasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNNP belum memiliki staf yang memiliki tupoksi khusus terkait TIK. 		<p>kelengkapan fungsional dalam Organisasi TI agar organisasi dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menetapkan Jabatan Fungsional TI di BNNP/ BNNK/Balai
3	SDM TI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per Maret 2016, Sub Bidang Jaringan Komputer: 1 Kasubbid, 5 pegawai tetap, dan 4 pegawai 	Medium	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan jumlah SDM TI sesuai dengan kualifikasi yang

NO	KOMPONEN	KONDISI EKSISTING DAN ANALISANYA	PEMENUHAN	PELUANG PENGEMBANGAN
		<p>harian lepas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub Bidang TI: 1 Kasubbid, 6 pegawai tetap, dan 7 pegawai harian lepas. ▪ Belum ada program pengembangan SDM TI yang terstruktur untuk menutup <i>gap</i> kompetensi SDM TI. 		<p>dibutuhkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan implementasi pengembangan SDM TI
4	Kebijakan Tata Kelola TI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum ada Kebijakan Umum TI yang menjadi rujukan bagi aturan-aturan turunan pengelolaan TI yang lebih teknis. ▪ Saat ini terdapat Kebijakan terkait Sub Domain. Kebijakan tersebut 	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan, penetapan, dan implementasi Kebijakan Tata Kelola TI

NO	KOMPONEN	KONDISI EKSISTING DAN ANALISANYA	PEMENUHAN	PELUANG PENGEMBANGAN
		<p>dituangkan dalam suatu Surat Edaran dan mengikat seluruh Satker, termasuk BNNP/BNNK</p>		
5	Standar dan Prosedur Perencanaan TI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses perencanaan TI dilaksanakan mengikuti mekanisme perencanaan tahunan BNN. ▪ Belum ada Prosedur khusus terkait proses perencanaan TI. ▪ Sebagian Satker melakukan pengembangan sistem di luar perencanaan TI oleh Puslitdatin. ▪ Atas instruksi Kepala BNN, mulai tahun ini 	Medium	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan, penetapan, dan implementasi Standar dan Prosedur Perencanaan TI

NO	KOMPONEN	KONDISI EKSISTING DAN ANALISANYA	PEMENUHAN	PELUANG PENGEMBANGAN
		seluruh inisiatif pengembangan infrastruktur dan sistem informasi dilakukan satu pintu (Puslitdatin)		
6	Standar dan Prosedur pengembangan sistem	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Saat ini belum ada standar dan prosedur pengembangan sistem. 	Belum Ada	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan, penetapan, dan implementasi Standar dan Prosedur Pengembangan Sistem
7	Standar dan Prosedur Operasi Sistem	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Saat ini sudah ada beberapa Prosedur operasional TI, baik terkait pengelolaan infrastruktur TI maupun sistem aplikasi. ▪ Masih perlu dilakukan pengembangan prosedur, termasuk: pengelolaan kapasitas dan 	Medium	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan, penetapan, dan implementasi Standar dan Prosedur Operasi Sistem

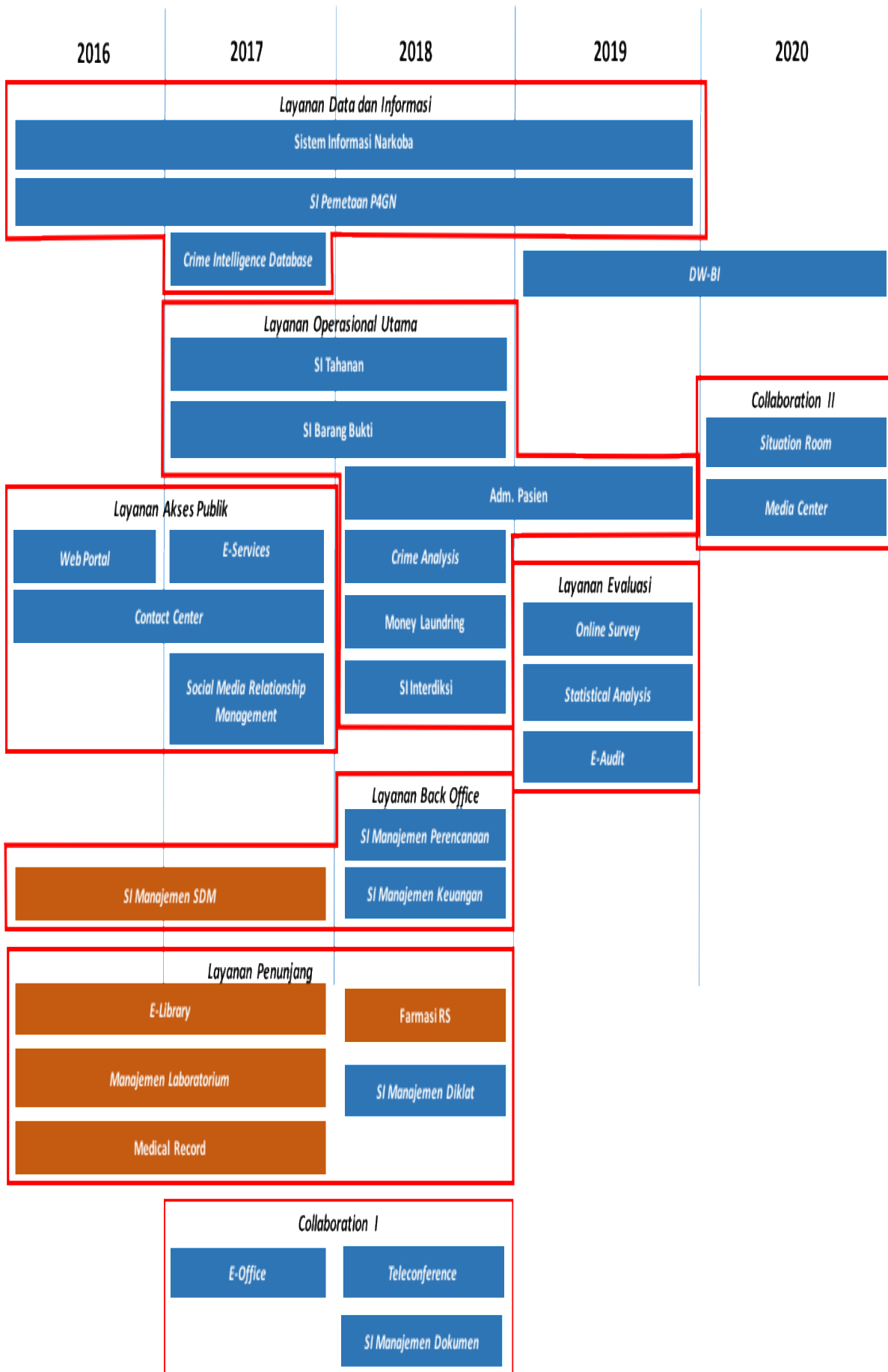
NO	KOMPONEN	KONDISI EKSISTING DAN ANALISANYA	PEMENUHAN	PELUANG PENGEMBANGAN
		<p>kinerja TI, serta pengelolaan insiden dan permasalahan TI.</p>		
8	<p>Standar dan Prosedur terkait <i>assurance</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Saat ini belum ada standar dan prosedur yang secara khusus mengatur pengelolaan keamanan informasi dan manajemen kualitas. 	<p>Belum Ada</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan, penetapan, dan implementasi Standar dan Prosedur Keamanan Informasi dan Manajemen Kualitas
9	<p>Pengelolaan layanan dan dukungan teknis layanan TI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan infrastruktur TI telah didukung oleh beberapa tools sebagaimana dipaparkan pada bagian Asesmen Infrastruktur TI. ▪ Belum ada tools terintegrasi dalam pengelolaan TI, 	<p>Medium</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Implementasi tool Service Management</i> • <i>Implementasi tool Application & Infrastructure Management</i>

NO	KOMPONEN	KONDISI EKSISTING DAN ANALISANYA	PEMENUHAN	PELUANG PENGEMBANGAN
		antara lain: pengelolaan tingkat layanan TI, serta insiden dan permasalahan TI.		

BAB VIII
PORTOFOLIO DAN BELANJA TI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

	2016	2017	2018	2019	2020
Tema	Core Services		Business Integration	Extended Services	Optimization
Indikator Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepuasan Pengguna atas Layanan Data dan informasi Utama Pusdatin ▪ Kepuasan Publik terhadap Akses Layanan Utama BNN yang terintegrasi Layanan TI Operasional Internal (SIN, SI Tahanan, SI Barang Bukti, E-Office). 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemudahan dan Kecepatan Akses Data (realtime), Koordinasi (Perencanaan, Implementasi) antara BNN, BNNP/K, Balai. ▪ Kemudahan dan Kecepatan Koordinasi antar Unit Kerja; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemudahan dan Kecepatan Akses Data (realtime) dan Koordinasi antara BNN dengan Komponen Eksternal (Instansi Pemerintah dan Komponen Masyarakat) ▪ Kontinuitas Layanan TI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemudahan analisis data untuk percepatan Indonesia bebas Narkoba; ▪ Sertifikasi ISO 27001
Stream Sistem Informasi	<p>The diagram shows the following services and their durations:</p> <ul style="list-style-type: none"> Layanan Data dan Informasi Pusdatin: 2016 - 2019 Layanan Akses Publik: 2017 - 2018 Analytical: 2019 - 2020 Layanan Operasional Utama BNN: 2016 - 2020 Collaboration II: 2020 Layanan Penunjang: 2016 - 2019 Layanan Evaluasi: 2019 - 2020 Back Office: 2016 - 2019 Collaboration I: 2017 - 2019 				
Stream Infrastruktur	<p>The diagram shows the following services and their durations:</p> <ul style="list-style-type: none"> DC I: 2016 - 2017 DC II: 2018 - 2019 DRC: 2019 - 2020 Pengadaan Jaringan I: 2018 - 2019 Pengadaan Jaringan II: 2019 - 2020 				
Stream Tata Kelola TI	<p>The diagram shows the following services and their durations:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyiapan Struktur dan SDM Tata Kelola TIK: 2016 - 2017 Sertifikasi ISO 27001: 2020 Penguatan Proses dan Tools Tata Kelola TI: 2017 - 2019 Keamanan Informasi: 2017 - 2018 Penyediaan Akses: 2017 - 2018 				

B. Strategi dan Indikator Kinerja Utama



C. Strategi Sumberdaya

NO	KATEGORI DAN JENIS LAYANAN	PENGEMBANGAN LAYANAN					OPERASI/DELIVERY LAYANAN		
		Tipe Produk & SDLC		Tipe Sumberdaya			Insourcing	Outsourcing	Co-Sourcing
		Akuisi Produk	Development	Insourcing	Outsourcing	Co-Sourcing			
A.	Layanan untuk ABC secara korporat/grup: berbasis aplikasi bisnis								
1.	Key Strategic: Sistem Informasi Narkoba		X	X			X		
2.	Key Strategic: SI Pemetaan P4GN		X		X		X		
3.	Key Strategic: Crime Intelligence Database	X			X		X		
4.	Key Strategic: Social Media Relationship Management	X			X		X		
5.	Key Strategic : Crime Analysis	X			X		X		
6.	Key Strategic: SI Money Laundering	X			X		X		
7.	Key Strategic: SI Interdiksi	X			X		X		
8.	Key Strategic: DWBI	X			X		X		
9.	Key Strategic: Situation		X		X		X		

NO	KATEGORI DAN JENIS LAYANAN	PENGEMBANGAN LAYANAN					OPERASI/DELIVERY LAYANAN		
		Tipe Produk & SDLC		Tipe Sumberdaya			Insourcing	Outsourcing	Co-Sourcing
		Akuisi Produk	Development	Insourcing	Outsourcing	Co-Sourcing			
	Room								
10.	Key Strategic: SI Manajemen Perencanaan		X		X		X		
11.	Key Strategic: Adm. Klien		X	X			X		
12.	Key Operation: SI Tahanan		X	X			X		
13.	Key Operation: SI Barang Bukti		X	X			X		
14.	Key Operation: E-Services		X	X			X		
15.	Key Operation: Teleconference	X			X		X		
16.	Key Operation: <i>Manajemen Laboratorium</i>		X		X		X		
17.	Key Operation: Medical Record		X		X		X		
18.	Key Operation: Farmasi		X		X		X		

NO	KATEGORI DAN JENIS LAYANAN	PENGEMBANGAN LAYANAN					OPERASI/DELIVERY LAYANAN		
		Tipe Produk & SDLC		Tipe Sumberdaya			Insourcing	Outsourcing	Co-Sourcing
		Akuisi Produk	Development	Insourcing	Outsourcing	Co-Sourcing			
	RS								
19.	Key Support: Web Portal		X	X			X		
20.	Key Support: E-Library		X		X		X		
21.	Key Support: SI Manajemen Diklat		X	X			X		
22.	Key Support: E-Office	X			X		X		
23.	Key Support: SI Manajemen Dokumen	X			X		X		
24.	Key Support: Manajemen Keuangan	X			X		X		
25.	Key Support: Online Survey		X	X			X		
26.	Key Support: Statistical Analysis	X			X		X		
27.	Key Support: E-Audit	X			X		X		
28.	Key Support: Media Center		X		X		X		
29.	Key Support:	X			X		X		

NO	KATEGORI DAN JENIS LAYANAN	PENGEMBANGAN LAYANAN					OPERASI/DELIVERY LAYANAN		
		Tipe Produk & SDLC		Tipe Sumberdaya			Insourcing	Outsourcing	Co-Sourcing
		Akuisi Produk	Development	Insourcing	Outsourcing	Co-Sourcing			
	Contact Center								
B.	Layanan untuk ABC secara korporat/grup: berbasis infrastruktur								
30.	Fasilitas DC dan DRC	X			X			X	
31.	Infrastruktur DC dan DRC (server, storage, perangkat jaringan di DC & DRC)	X			X			X (supervisi oleh ABC)	
32.	Jaringan: LAN BNN	X			X			X	
33.	Jaringan: Internet	X			X			X	
34.	Jaringan: WAN	X			X			X	
35.	Desktop Computing (penyediaan dan dukungan teknis desktop, laptop dan peripheral)	X			X			X	

D. Pemetaan Portofolio Program/Proyek

1. Pemetaan Portofolio Proyek Sistem Informasi

PROGRAM	PROYEK	2016	2017	2018	2019	2020
Layanan Data dan Informasi	Pengembangan SIN Core Services					
	Pengembangan SIN Integrated Business					
	Pengembangan SIN Eksternal					
	Pengembangan SI Pemetaan P4GN Core Services					
	Pengembangan SI Pemetaan P4GN Integrated Business					
	Pengembangan SI Pemetaan P4GN Eksternal					
	Pembangunan Crime Intelligence Database					
Layanan akses publik	Pembangunan E-Services					
	Pengembangan Web Portal					
	Pengembangan					

	Contact Center					
	Pembangunan <i>Social Media Relationship Management</i>					
	<i>Whistle Blowing</i>					
Layanan Operasional Utama BNN	Pengembangan SI Tahanan					
	Pengembangan SI Barang Bukti					
	Pembangunan Adm Klien Internal					
	Pembangunan Adm Klien Eksternal					
	Pembangunan Crime Analysis					
	Pembangunan SI Money Laundring					
	Pembangunan SI Interdiksi					
Layanan <i>Backoffice</i>	Pengembangan SI Manajemen Keuangan					
	Pengembangan SI Manajemen SDM					
	Pengembangan					

	SI Manajemen Perencanaan					
Layanan Penunjang	Pengembangan Manajemen Laboratorium					
	Pembangunan Medical Record					
	Pengembangan <i>E-Library</i>					
	Pembangunan Farmasi Rumah Sakit					
	Pembangunan SI Manajemen Diklat					
Layanan Evaluasi	Pembangunan Online Survey					
	Pembangunan <i>Statistical Analysis</i>					
	Pengembangan <i>E-Audit</i>					
Collaboration	Pembangunan <i>E-Office</i>					
	Pembangunan SI Manajemen Dokumen					
	Implementasi					

	<i>Situation Room</i>					
	Implementasi <i>Teleconference</i>					
	Implementasi Media Center					
Analytical	Implementasi DW-BI Tahap I <i>(Core Process)</i>					
	Implementasi DW-BI Tahap II <i>(Non-Core Process)</i>					

2. Pemetaan Portofolio Proyek Infrastruktur

PROGRAM	PROYEK	2016	2017	2018	2019	2020
Data Center	Penguatan Fasilitas Fisik Data Center					
	Peningkatan Kapasitas Komputasi/Pen yimpanan Data Center					
	Implementasi <i>Image Data Auditing Storage</i>					
	Pengadaan Server <i>Datawarehouse</i>					

Jaringan Komunikasi	Penyewaan Jaringan DC/DRC					
	Penyewaan Layanan Jaringan Internet oleh BNNP/K					
	Peningkatan Jaringan di Balai Besar dan Diklat					
	Penyediaan Perangkat Redundansi pada <i>Core Layer</i> sebagai fungsi <i>failover/load balancing</i> pada segmen utama					
	Penyediaan Link Redundan pada Akses <i>Layer</i> dan atau <i>Distribution Layer</i> sebagai fungsi penyediaan link backup pada akses klien.					
DRC	Pengadaan Fasilitas <i>Disaster Recovery Center</i>					

	Pengembangan <i>Disaster Recovery Center</i>					
	Pengadaan Komputasi/Pen yimpanan <i>Disaster Recovery Center</i>					
Keamanan Informasi	Penyediaan jalur aman untuk berkomunikasi melalui email.					
	Penyediaan <i>Access Management</i>					
	Penyediaan <i>Threat Management</i>					
	Penyediaan Anti <i>Malware</i>					
Penyediaan Akses	Penyediaan Sistem Akses yang Aman (VPN) sebagai fungsi pengendali akses <i>mobile user</i> dari luar organisasi ke dalam jaringan BNNP					

3. Pemetaan Portofolio Proyek Tata Kelola TI

PROGRAM	PROYEK	2016	2017	2018	2019	2020
Penguatan Struktur Tata Kelola TIK dan SDM TIK	Penetapan IT Committee					
	Penguatan Struktur Organisasi TIK					
	Penambahan FTE TIK					
	Penyusunan Rancangan Kurikulum dan Silabus IT Academy					
	Penyelenggaraan Program Pengembangan SDM TIK					
Penguatan Proses dan Tools Tata Kelola TIK	<i>Review dan Update</i> Kebijakan dan Prosedur TIK					
	Penyusunan IT DRP					
	Implementasi Tools ITSM					
Sertifikasi	Sertifikasi ISO 27001					

E. Deskripsi Portofolio Program/Proyek

1. Deskripsi Portofolio Proyek Sistem Informasi

PROGRAM	PROYEK	DESKRIPSI PROYEK	BPO
Layanan Data dan Informasi	Pengembangan SIN <i>Core Services</i>	Pengembangan SIN Core service dengan menambahkan fungsional fitur perencanaan, dokumentasi dan rekapitulasi otomatis dari SIN sebelumnya terutama untuk BNN BNN sedangkan SIN BNNP/K, Balai masih menggunakan fitur rekapitulasi kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Deputi Bidang Pemberantasan ▪ Deputi Bidang Pencegahan ▪ Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat ▪ Deputi Bidang Rehabilitasi
	Pengembangan SIN <i>Integrated Business</i>	Pengembangan <i>Integrated Business</i> dengan menambahkan fitur perencanaan, dokumentasi, dan rekapitulasi otomatis untuk BNNP/K, Balai dan terintegrasi dengan sistem lain di internal BNN serta sistem eksternal mitra BNN . Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat – BNNP/K ▪ Bidang Pencegahan – BNNP/K ▪ Bidang Pemberdayaan Masyarakat – BNNP/K ▪ Bidang Rehabilitasi–

PROGRAM	PROYEK	DESKRIPSI PROYEK	BPO
		dilakukan dengan mengembangkan SIN <i>Core Service</i> yang bisa mengatasi <i>overlapping</i> kegiatan antara BNN, BNNP/K, Balai.	BNNP/K <ul style="list-style-type: none"> ▪ Balai Rehabilitasi
	Pengembangan SIN Eksternal	Pengembangan SIN eksternal dengan penambahan fitur perencanaan, dokumentasi dan rekapitulasi yang digunakan oleh pihak Eksternal BNN baik dari Instansi Pemerintah maupun Komponen Masyarakat. Pengembangan dilakukan dengan mengembangkan SIN <i>Integrated Business</i> yang bisa mengatasi <i>overlapping</i> kegiatan antara BNN secara keseluruhan dengan komponen eksternal BNN.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat – BNNP/K ▪ Bidang Pencegahan – BNNP/K ▪ Bidang Pemberdayaan Masyarakat – BNNP/K ▪ Bidang Rehabilitasi– BNNP/K ▪ Balai Rehabilitasi ▪ Mitra BNN
	Pengembangan SI Pemetaan	Pengembangan SI untuk pemetaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Deputi Bidang Pemberantasan

PROGRAM	PROYEK	DESKRIPSI PROYEK	BPO
	P4GN <i>Core Services</i>	data secara geospasial, yang digunakan untuk program dan kegiatan P4GN dalam lingkup BNN dari data <i>SIN Core Services</i> .	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Deputi Bidang Pencegahan ▪ Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat ▪ Deputi Bidang Rehabilitasi
	<i>Pengembangan SI Pemetaan P4GN Integrated Business</i>	Pengembangan SI untuk pemetaan data secara geospasial, yang digunakan untuk program dan kegiatan P4GN dalam lingkup BNN, BNNP/K, Balai dari data <i>SIN Integrated Business</i> . Pengembangan dilakukan dari SI Pemetaan P4GN <i>Core Services</i> .	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat – BNNP/K ▪ Bidang Pencegahan – BNNP/K ▪ Bidang Pemberdayaan Masyarakat – BNNP/K ▪ Bidang Rehabilitasi – BNNP/K ▪ Balai Rehabilitasi
	Pengembangan SI Pemetaan P4GN Eksternal	Pengembangan SI untuk pemetaan data secara geospasial yang digunakan untuk program dan kegiatan P4GN dlam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat – BNNP/K ▪ Bidang Pencegahan –

PROGRAM	PROYEK	DESKRIPSI PROYEK	BPO
		<p>lingkup BNN, BNNP/K, Balai dan instansi diluar BNN seperti instansi pemerintah maupun lembaga penggiat anti narkoba. Kedepannya instansi eksternal tersebut akan melaporkan hasil program dan kegiatan P4GN kepada BNN dan bisa menggunakan data dari SI Pemetaan P4GN.</p>	<p>BNNP/K</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang Pemberdayaan Masyarakat – BNNP/K ▪ Bidang Rehabilitasi – BNNP/K ▪ Balai Rehabilitasi ▪ Mitra BNN.
	<p>Pembangunan <i>Crime Intelligence Database</i></p>	<p>Pembangunan Aplikasi <i>Crime Intelligence Database</i> yang bertujuan untuk memfasilitasi pengelolaan <i>database</i> pemberantasan. Aplikasi <i>Crime Intelligence Database</i> ini akan terintegrasi dengan beberapa aplikasi salah satunya</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Deputi Bidang Pemberantasan

PROGRAM	PROYEK	DESKRIPSI PROYEK	BPO
		<p>adalah aplikasi <i>Money Laundrying</i> terkait kasus TPPU dan SI Interdiksi terkait kasus interdiksi.</p>	
<p>Layanan akses publik</p>	<p>Pembangunan <i>E-Services</i></p>	<p>Pembangunan aplikasi E – Service yang bertujuan untuk mengembangkan layanan satu pintu yang mencakup pendaftaran, informasi dan pengajuan layanan. Beberapa fitur yang dikembangkan dalam aplikasi antarlain Layanan Penggiat Anti Narkoba, Layanan Pencegahan, Layanan Lembaga Rehab, Layanan Klien, pengajuan Tes Urine, Layanan Hukum.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Deputi Bidang Pemberantasan ▪ Deputi Bidang Pencegahan ▪ Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat ▪ Deputi Bidang Rehabilitasi
	<p>Pengembangan Web Portal</p>	<p>Pengembangan portal berbasis web yang mencakup beberapa modul</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat penelitian data, dan informasi ▪ Deputi

PROGRAM	PROYEK	DESKRIPSI PROYEK	BPO
		antara lain portal pencegahan, portal informasi, portal hukum dan portal kerjasama	Pencegahan
	Pengembangan Contact Center	Pengembangan aplikasi contact center yang berfungsi untuk memfasilitasi layanan pengaduan pelanggan secara terpusat dengan penambahan fitur utama seperti call center dan call recording	Biro Umum – Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi
	Pembangunan <i>Social Media Relationship Management</i>	Pembangunan paket teknologi yang tersedia di pasaran untuk membantu pengelolaan social media dan kampanye konten pencegahan. Fitur yang digunakan meliputi publikasi otomatis, kolaborasi sosial, manajemen kontak, manajemen konten, <i>social</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Direktorat Advokasi - Deputi Bidang Pencegahan ▪ Direktorat Diseminasi Informasi - Deputi Bidang Pencegahan

PROGRAM	PROYEK	DESKRIPSI PROYEK	BPO
		<i>engagement & monitoring</i> dan <i>social media analytics</i>	
	Pembangunan <i>Whistle Blowing</i>	Pembangunan aplikasi <i>whistle blowing</i> . Fitur <i>whistle blowing</i> meliputi pelaporan publik, pelaporan internal, <i>review</i> dan filterisasi pengaduan, tindak lanjut pengaduan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inspektorat Wilayah I ▪ Inspektorat Wilayah II ▪ Inspektorat Wilayah III
Layanan Operasional Utama BNN	Pengembangan SI Tahanan	Melakukan pengembangan SI Tahanan dengan menambahkan fungsional seperti administrasi tahanan dan monitoring tahanan	Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti - Deputi Bidang Pemberantasan
	Pengembangan SI Barang Bukti	Melakukan pengembangan SI Barang bukti dengan menambahkan fungsional aplikasi seperti administrasi barang bukti, inventory barang bukti dan	Direktorat Pengawasan Tahanan Dan Barang Bukti - Deputi Bidang Pemberantasan

PROGRAM	PROYEK	DESKRIPSI PROYEK	BPO
		monitoring barang bukti	
	Pembangunan Adm Klien Internal	Membangun aplikasi untuk pengelolaan administrasi klien bagi balai rehabilitasi yang dikelola BNN. Fungsional yang ditambahkan dalam aplikasi tersebut antara lain registrasi klien, screening klien, assesment user dan monitoring status klien	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Deputi Bidang Rehabilitasi ▪ Balai Rehabilitasi Internal
	Pembangunan Adm klien Eksternal	Membangun aplikasi untuk pengelolaan administrasi klien bagi balai rehabilitasi diluar naungan BNN seperti balai rehabiltasi yang dikelola masyarakat atau balai rehabilitasi milik pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Deputi Bidang Rehabilitasi

PROGRAM	PROYEK	DESKRIPSI PROYEK	BPO
	Pembangunan <i>Crime Analysis</i>	Membangun paket aplikasi dengan modul utama yaitu <i>association analysis</i> dan <i>geospatial analysis</i>	Deputi Bidang Pemberantasan
	Pembangunan SI <i>Money Laundering</i>	Membangun paket aplikasi dengan menambahkan fungsional aplikasi seperti analisis orang, analisis entitas bisnis, analisis rekening, analisis demografi dan analisis aset jaringan	Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang - Deputi Bidang Pemberantasan
	Pembangunan SI Interdiksi	Membangun paket aplikasi dengan menambahkan fitur antarlain analisis pergerakan orang dan analisis pergerakan barang	Direktorat Interdiksi - Deputi Bidang Pemberantasan
Layanan <i>Backoffice</i>	Pembangunan SI Manajemen Keuangan	Melakukan pembangunan SI Manajemen Keuangan dengan menambahkan beberapa fungsional seperti penganggaran,	Biro Keuangan

PROGRAM	PROYEK	DESKRIPSI PROYEK	BPO
		komitmen, gaji pegawai, perjalanan dinas, pembayaran, bendahara, persediaan, aset tetap, pelaporan dan akuntansi, perhitungan dan pelaporan pajak dan informasi nilai kas brankas	
	Pengembangan SI Manajemen SDM	Mengembangkan SI Manajemen SDM dengan penambahan fungsional seperti HR administration, manajemen organisasi, analisis beban kerja, penempatan pegawai, presensi, <i>talent management</i> , pengelolaan program Pengembangan SDM dan pengelolaan daftar diklat	Biro Kepegawaian dan Organisasi
	Pembangunan SI Manajemen Perencanaan	Membangun SI Manajemen Perencanaan	Biro Perencanaan - Sekretariat Utama

PROGRAM	PROYEK	DESKRIPSI PROYEK	BPO
		dengan penambahan fungsional seperti <i>strategic planning, planning & budgeting</i> , pengendalian anggaran, evaluasi kinerja & anggaran:, pelaporan	
Layanan Penunjang	Pengembangan Manajemen Laboratorium	Pengembangan SI Manajemen Laboratorium dengan menambahkan fungsional antara lain pendaftaran online skbn, manajemen laboratorium, pengecekan proses pengujian, pengecekan hasil pengujian	Balai Laboratorium
	Pembangunan <i>Medical Record</i>	Pengembangan aplikasi medical record dengan menambahkan fungsional antara lain tracking dokumen fisik,	Balai Besar Rehabilitasi

PROGRAM	PROYEK	DESKRIPSI PROYEK	BPO
		tindakan medik, data penunjang medik, kodifikasi medrec	
	Pengembangan <i>E-Library</i>	Pengembangan aplikasi <i>e-library</i> untuk membantu pengelolaan perpustakaan. Adapun fitur yang ditambahkan antara lain manajemen katalog, manajemen sirkulasi (keluar masuk buku), opac system:, barcode scanning RFID, statistik perpustakaan, <i>gate system</i> dan <i>drop box system</i>	Biro Umum – Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi
	Pembangunan Farmasi Rumah Sakit	Membangun aplikasi farmasi rumah sakit untuk membantu pengelolaan stok obat di gudang obat. Fungsional yang ditambahkan antaranya transfer stok, <i>pra-purchase</i>	Balai Rehabilitasi

PROGRAM	PROYEK	DESKRIPSI PROYEK	BPO
		<i>request</i> dan monitoring stok farmasi.	
	Pembangunan SI Manajemen Diklat	Membangun SI Manajemen Diklat untuk membantu pengelolaan pelatihan di lingkungan BNN. Adapun fungsional yang ditambahkan antara lain e-registrasi, pengelolaan diklat, <i>e-learning</i> , manajemen pengetahuan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan	Balai Diklat
Layanan Evaluasi	Pembangunan <i>Online Survey</i>	Membangun aplikasi <i>online survey</i> untuk membantu dalam pengelolaan survei terkait hal tertentu. fitur utama yang ditambahkan dalam aplikasi ini antara lain <i>questionnaire</i> , <i>interview schedule</i> dan <i>data collection</i>	Pusat penelitian data, dan informasi

PROGRAM	PROYEK	DESKRIPSI PROYEK	BPO
	Pembangunan <i>Statistical Analysis</i>	Membangun paket aplikasi yang tersedia di pasaran dimana bertujuan untuk memodelkan data secara statistika. Adapun fungsional yang digunakan antara lain <i>analytical decision management, modeling algorithms, automated modeling</i> dan analisis data	Pusat penelitian data, dan informasi
	Pengembangan E-Audit	Mengembangkan aplikasi untuk pengelolaan kegiatan audit. Adapun fitur yang digunakan antara lain adalah penilaian risiko, penjadwalan audit dan tim audit, pelacakan proyek audit dan masalah, dokumentasi audit, pengelolaan tindak lanjut, review dan catatan hasil audit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inspektorat Wilayah I ▪ Inspektorat Wilayah II ▪ Inspektorat Wilayah III

PROGRAM	PROYEK	DESKRIPSI PROYEK	BPO
Collaboration	Pembangunan <i>E-Office</i>	Membangun aplikasi <i>e-office</i> untuk pengelolaan surat menyurat. Fungsional yang ditambahkan pada aplikasi ini antara lain registrasi surat, disposisi surat masuk, pembuatan surat keluar, pembuatan surat keluar, pengelolaan memo dan laporan surat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Biro Umum – Bagian Tata Usaha
	Pembangunan SI Manajemen Dokumen	Membangun SI Manajemen Dokumen untuk membantu pengelolaan dokumen di BNN. Pengembangan dilakukan dengan menambahkan beberapa fungsional seperti manajemen dokumentasi, digitasi, searching dan <i>back up document</i>	Biro Umum – Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi

PROGRAM	PROYEK	DESKRIPSI PROYEK	BPO
	Implementasi <i>Situation Room</i>	Mengimplementasi situation room sebagai pusat monitoring data. Adapun fungsional yang ditambahkan antara lain monitoring data pemetaan P4GN, summary data penting & data teleconference serta fungsional Komunikasi dan Koordinasi yang berfungsi memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara petugas command center dengan <i>stackholder</i>	Pusat penelitian data, dan informasi
	Implementasi <i>Teleconference</i>	Mengimplementasi kan teknologi teleconference dengan fitur utama antara lain <i>multipoint video conference, gateway servicem dan lecture mode</i>	Pusat penelitian data, dan informasi

PROGRAM	PROYEK	DESKRIPSI PROYEK	BPO
	Implementasi Media Center	Mengimplementasi teknologi media center sebagai pusat penyajian informasi seputar kegiatan BNN terbaru secara up-to-date dengan penambahan fitur antara lain news update, kiosk informasi, permohonan informasi dan pelayanan keluhan	Biro Umum – Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi
<i>Analytical</i>	Implementasi DW-BI Tahap I (<i>Core Process</i>)	Mengimplementasi teknologi data warehouse dengan mengkonsolidasi dan menganalisa data – data yang berasal dari aplikasi inti/utama.	Pusat penelitian data, dan informasi
	Implementasi DW-BI Tahap II (<i>Non-Core Process</i>)	Mengimplementasi teknologi data warehouse dengan mengkonsolidasi dan menganalisa data - data yang berasal dari aplikasi pendukung.	Pusat penelitian data, dan informasi

2. Deskripsi Portofolio Proyek Infrastruktur

PROGRAM	PROYEK	DESKRIPSI PROYEK	BPO
Data Center (DC)	Penguatan Fasilitas Fisik Data Center	Fasilitas fisik data center akan mendukung keberlangsungan ketersediaan server. Fasilitas fisik data center seperti lemari server, pengatur suhu, pendeteksi asap, akses control, dan lain sebagainya.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang TIK Puslitdatin
	Peningkatan Kapasitas Komputasi/ Penyimpanan Data Center	Peningkatan kapasitas penyimpanan data akan mendukung ketersediaan data yang lengkap dan kompleks.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang TIK Puslitdatin
	Implementasi <i>Image Data Auditing Storage</i>	<i>Storage</i> ini digunakan sebagai media penyimpanan <i>Image Data Auditing</i> .	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang TIK Puslitdatin
	Pengadaan Server <i>Datawarehouse</i>	Data Warehouse merupakan pusat repositori informasi yang dapat memberikan informasi dan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang TIK Puslitdatin

PROGRAM	PROYEK	DESKRIPSI PROYEK	BPO
		mendukung proses pengambilan keputusan. Sumber data warehouse berasal dari berbagai database yang digunakan dalam sistem dan proses bisnis.	
Jaringan Komunikasi	Pengadaan Jaringan DC/DRC	WAN digunakan sebagai jaringan <i>private</i> setiap balai untuk berkomunikasi terhadap BNN.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang TIK Puslitdatin
	Peningkatan Layanan Jaringan Internet oleh BNNP/K	Dengan adanya peningkatan jaringan, maka proses komunikasi akan lebih cepat dan <i>reliable</i> .	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BNNP/K
	Peningkatan Jaringan di Balai Besar/Diklat	Peningkatan jaringan internal masing-masing Balai Besar dan Balai Diklat.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang TIK Puslitdatin/ Balai
	Penyediaan Perangkat Redundansi pada <i>Core Layer</i>	Penyediaan Perangkat Redundansi pada <i>Core Layer</i> sebagai fungsi <i>failover/load</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang TIK Puslitdatin

PROGRAM	PROYEK	DESKRIPSI PROYEK	BPO
		<i>balancing</i> pada segmen utama	
	Penyediaan Link Redundan pada Akses <i>Layer</i> dan atau <i>Distribution Layer</i>	Penyediaan Link Redundan pada Akses <i>Layer</i> dan atau <i>Distribution Layer</i> sebagai fungsi penyediaan link backup pada akses klien.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang TIK Puslitdatin
<i>Disaster Recovery Center (DRC)</i>	Pengadaan Fasilitas <i>Disaster Recovery Center</i>	<i>Disaster Recovery Center</i> merupakan fasilitas pengganti pada saat <i>Data Center</i> mengalami gangguan atau tidak dapat berfungsi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang TIK Puslitdatin
	Pengembangan <i>Disaster Recovery Center</i>	DRC direkomendasikan memiliki arsitektur sama dengan DC.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang TIK Puslitdatin
	Pengadaan Komputasi/ Penyimpanan <i>Disaster Recovery Center</i>	Penyimpanan pada DRC direkomendasikan sama dengan penyimpanan pada DC.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang TIK Puslitdatin
Keamanan Informasi	Penyediaan jalur aman untuk	Email terenkripsi memberikan keamanan terhadap	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang TIK Puslitdatin

PROGRAM	PROYEK	DESKRIPSI PROYEK	BPO
	berkomunikasi melalui email.	ancaman penyadapan.	
	Penyediaan <i>Access Management</i>	Keamanan pada <i>Access Management</i> yaitu dengan menerapkan akses kontrol yang mencakup regulasi dan batasan atas akses pengguna terhadap informasi dan fungsionalitas layanan perusahaan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang TIK Puslitdatin
	Penyediaan Threat Management	Layanan ini memberikan kemampuan identifikasi dini terhadap ancaman yang akan terjadi. Komponen pada entitas ini dapat berupa <i>Firewall, Intrusion Detection System (IDS)</i> .	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang TIK Puslitdatin
	Penyediaan Anti Malware	Layanan ini memastikan penggunaan anti malware pada setiap desktop di perusahaan. Selain itu, terdapat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang TIK Puslitdatin

PROGRAM	PROYEK	DESKRIPSI PROYEK	BPO
		standar antimalware yang digunakan serta memastikan signature selalu diperbarui.	
Penyediaan Akses	Penyediaan Sistem Akses yang Aman (VPN)	Penyediaan Sistem Akses yang Aman (VPN) sebagai fungsi pengendali akses <i>mobile user</i> dari luar organisasi ke dalam jaringan BNNP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang TIK Puslitdatin

3. Deskripsi Portofolio Proyek Tata Kelola

PROGRAM	PROYEK	DESKRIPSI PROYEK	BPO
Penguatan Struktur Tata Kelola TIK dan SDM TIK	Penetapan IT Committee	Pembentukan dan penetapan Komite TI Badan Narkotika Nasional. Komite TI dibentuk untuk membantu Kepala Badan dalam pengelolaan dan pengawasan berbagai hal yang berhubungan dengan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang TIK Puslitdatin

		Informasi Badan Narkotika Nasional.	
Penguatan Struktur Organisasi TIK	Perancangan dan penetapan rancangan struktur Organisasi TIK yang dimaksudkan untuk menguatkan kapasitas pengelolaan TIK sesuai dengan tantangan dan kebutuhan Badan Narkotika Nasional.		▪ Bidang TIK Puslitdatin
Penambahan FTE TIK	Penyesuaian jumlah <i>Full Time Employee</i> / FTE, yang dimulai dengan kegiatan estimasi kebutuhan SDM TIK hingga rekrutmen SDM TIK (baik internal maupun eksternal) sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam organisasi.		▪ Bidang TIK Puslitdatin
Penyusunan Rancangan Kurikulum dan Silabus IT Academy	Penyusunan kurikulum IT Academy Badan Narkotika Nasional yang berbasis pengembangan kompetensi SDM		▪ Bidang TIK Puslitdatin

		TIK.	
	Penyelenggaraan Program Pengembangan SDM TIK	Implementasi rangkaian program pengembangan SDM TIK sesuai dengan kurikulum yang telah dirancang.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang TIK Puslitdatin
Penguatan Proses dan <i>Tools</i> Tata Kelola TIK	Review dan Update Kebijakan dan Prosedur TIK	<p><i>Review</i> dan <i>update</i> terhadap Kebijakan dan Prosedur TIK dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan struktur organisasi • Pengembangan arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang TIK Puslitdatin
	Penyusunan IT DRP	Penyusunan IT Disaster Recovery Plan yang disesuaikan dengan arsitektur yang akan diimplementasikan saat ini dan ke yang akan datang,	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang TIK Puslitdatin

		<p>khususnya yang terkait dengan arsitektur jaringan komunikasi dan backup data.</p>	
	<p>Implementasi Tools ITSM</p>	<p>Implementasi <i>tools IT Service Management</i> untuk meningkatkan kapabilitas pengelolaan layanan TIK. Tool ITSM yang dimaksud diharapkan dapat terintegrasi sepenuhnya dengan <i>infrastructure management</i> dan <i>application management</i> yang ada.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang TIK Puslitdatin
<p>Sertifikasi</p>	<p>Sertifikasi ISO 27001</p>	<p>Melakukan persiapan dan sertifikasi ISO 27001 untuk meningkatkan kualitas sistem manajemen keamanan informasi Badan Narkotika Nasional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang TIK Puslitdatin

BAB IX
PENUTUP

Grand Design TIK ini merupakan rencana strategis TIK organisasi sebagai konsekuensi atas keberadaan Rencana Strategis tahun 2015-2019 untuk mendukung tujuan dan strategi organisasi. Sebagai rencana strategis TIK, *Grand Design* TIK ini mencakup semua inisiatif strategis TIK di organisasi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Oleh karena itu setiap inisiatif TIK organisasi mengacu ke inisiatif yang telah dinyatakan dalam *Grand Design* TI ini. Inisiatif tersebut salah satunya dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi.

Grand Design TIK ditentukan oleh perkembangan bisnis dan perkembangan teknologi. Bisnis dan teknologi sewaktu-waktu bisa berubah. Oleh karena itu diperlukan review terhadap *Grand Design* TIK ini secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, agar *Grand Design* TI ini tetap dapat berkontribusi optimal terhadap organisasi.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

ttd

BUDI WASESO